

SUHAIRI, MAHRUS AS'AD,
KHOIRURIJAL, ABDUL MUJIB



KONFLIK SOSIAL di LAMPUNG TENGAH

Akar Geneologis, Identitas Sosial, dan Penanganannya

Konflik Sosial di Lampung Tengah

Konflik Sosial di Lampung Tengah

Akar Geneologis, Identitas Sosial, dan Penanganannya

Suhairi, Mahrus As'ad, Khoirurijal, Abdul Mujib



Krapyak Wetan No. 40 RT 02/54, Panggunharjo,
Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, 55188

Konflik Sosial di Lampung Tengah

Akar Geneologis, Identitas Sosial, dan Penanganannya

© Suhairi, Mahrus As'ad, Khoirurijal, Abdul Mujib

2020

Penyunting : Muhamad Nasrudin, MH

Desainer : Nuria Indah Kurnia Dewi, S.Sn, M.Sn

Lay-outer : Lintang Publishing Service

Diterbitkan pertama kali oleh:

Penerbit Pustaka Pranala

Jalan Nogobondo No 07,

Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta

Bekerjasama dengan

Lintang Rasi Aksara Books

Krapyak Wetan No. 40 RT 02/54, Panggunharjo,

Sewon, Bantul, DI Yogyakarta, 55188

Email: redaksi.lintang@gmail.com,

redaksi@lintangpublishing.com

www.lintangpublishing.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT) Perpustakaan Nasional RI

Suhairi, dkk, Konflik Sosial di Lampung Tengah; Akar Geneologis,

Identitas Sosial, dan Penanganannya,

- Cet. 1. - Yogyakarta: Pustaka Pranala dan

Penerbit Lintang Rasi Aksara Books, 2020

1.Lampung Tengah. 2.Konflik Sosial.

15x23 cm, viii + 190 halaman.

Cetakan 1, 2020.

ISBN: 978-623-7173-67-0

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAH segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan banyak anugerah sehingga buku ini bisa tuntas dan tersaji di hadapan sidang pembaca. Solawat dan salam terhaturkan ke junjungan Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin.

Sepanjang dua dekade terakhir, Lampung Tengah pernah mengalami berbagai konflik sosial yang bernuansa SARA. Tercatat lebih dari 17 kali konflik terjadi. Yang paling parah adalah dibakarnya lebih dari 40 rumah oleh massa di desa Tanjung Harapan, Anak Tuha, Lampung Tengah.

Dalam berbagai konflik yang terjadi tersebut ada satu hal yang perlu mendapat perhatian. Bahwa hampir semua konflik menempatkan etnik Lampung dan Jawa, dua komunitas etnis mayoritas di Lampung Tengah, secara berhadapan. Kondisi ini kemudian mengkonstruksi persepsi masyarakat bahwa kedua etnis tersebut saling bermusuhan.

Berangkat dari titik inilah, tim peneliti dari STAIN Jurai Siwo—kini telah berubah menjadi IAIN Metro—menggali apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat? Tim peneliti kemudian terjun ke berbagai wilayah terdampak konflik kemudian menggali dan mengurai akar konflik sosial yang terjadi.

Dari kajian mendalam, ditemukan bahwa konflik sosial ini bukanlah semata-mata konflik antar-etnis karena tidak menerima pendatang sebagaimana dipahami selama ini. Akar konflik ternyata adalah tindakan kriminalitas yang tidak ditindak tegas oleh aparat hukum.

Lemahnya penegakan hukum kemudian berimplikasi kepada merosotnya kepercayaan warga kepada aparat dan hukum. Warga etnik Jawa kemudian mengorganisir diri dalam paguyuban dan melakukan tindakan main hakim sendiri

terhadap pelaku kriminalitas yang kebetulan beretnis Lampung.

Tindakan main hakim sendiri ini tak jarang berujung pada hilangnya nyawa terduga pelaku kriminal. Gayung pun bersambut, solidaritas dari etnik Lampung kemudian terkristal dan melakukan pembalasan.

Ujungnya, konflik antar kelompok etnik tidak bisa dihindarkan dan menelan korban puluhan rumah, ratusan warga luka, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Buku ini menguraikan bagaimana proses tersebut terjadi secara kronologis dengan pendekatan *social function* untuk memetakan akar, geneologi, identitas etnik, dan menawarkan beberapa saran penyelesaian.

Atas terbitnya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada STAIN Jurai Siwo Metro atas dukungan pendanaan sehingga penelitian ini bisa tuntas dan terpublikasikan. Kepada penerbit dan editor, tim penulis menyampaikan terima kasih telah berkenan mengupayakan penerbitan buku ini.

Terkhusus kepada pembaca, kami sampaikan selamat membaca. []

Metro, 10 Maret 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	5
C. Kajian Terdahulu yang Relevan	5
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis, Pendekatan, dan Desain Penelitian	8
2. Lokasi Kajian	9
3. Informan.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Analisis Data	10
BAB II.....	13
TEORI KONFLIK SOSIAL.....	13
A. Menggali Hakikat Konflik.....	13
B. Bentuk-Bentuk Konflik.....	18
C. Sebab-Sebab Timbulnya Konflik	21
D. Pendekatan dan Teori Konflik	26
E. Dampak Konflik bagi Masyarakat	61
F. Strategi Penanganan Konflik	63
G. Penanganan Konflik Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	67

BAB III.....	75
PROFIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	75
A. Sejarah Singkat	75
B. Kondisi Geografi	79
C. Administrasi Pemerintahan	80
D. Kependudukan.....	83
E. Kondisi Ekonomi.....	85
BAB IV	90
TEMUAN LAPANGAN KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG TENGAH.....	91
A. Kampung Kusumadadi Kecamatan Bekri	92
B. Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha 101	
C. Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu.....	108
BAB V.....	117
TELAAH KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG TENGAH.....	117
A. Identifikasi Akar Geneologi Konflik.....	117
B. Penegakan Hukum sebagai Solusi	126
C. Menguatnya Solidaritas Internal	127
D. Dampak Solidaritas Sosial	131
E. Potensi Negatif Solidaritas Sosial.....	134
BAB VI	137
PENUTUP	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Rekomendasi.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN.....	148
TENTANG PENULIS	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KONFLIK adalah tragedi kemanusiaan yang menyisakan luka berkepanjangan dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Tesis Dahrendrof menyebutkan bahwa konsensus dan konflik hadir sekaligus dalam masyarakat sebagai hubungan sebab akibat. Masyarakat tidak akan mempunyai konflik tanpa ada konsensus atau kesepakatan sebelumnya. Konflik terjadi karena telah melanggar konsensus.¹ Dalam kasus berbaurnya masyarakat Lampung dan Jawa—jauh sebelum Indonesia merdeka—konsensus itu sudah terbentuk sebagai bagian dialektika kebudayaan satu sama lain. Maka sebenarnya konflik muncul dari persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*).² Jawa sebagai suku pendatang di bumi Lampung sebisa mungkin dapat beradaptasi dengan masyarakat Lampung agar tidak terjadi konflik.

Konflik juga dapat dipicu oleh dominasi kekuasaan. Dalam ranah etnis kekuasaan primordial atau pemangku kepentingan adat masing-masing dapat mempengaruhi terjadinya konflik. Dalam hal ini, posisi kekuasaan antara suku satu dan yang lainnya merasa saling terancam

¹ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 154

² Dean G Pruitt & Jeffrey . Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 21

sehingga pengaruh elit dapat menambah lebar konflik yang sebenarnya hanya terjadi pada akar rumput. Dalam hal ini, kekerasan terorganisir dan didorong oleh legitimasi kekuasaan tertentu. Kekerasan ini disebut sebagai 'kekerasan struktural'.³ Kekerasan struktural terjadi atas legitimasi kekuasaan, ketidakadilan pembangunan, peminggiran budaya tertentu oleh dominasi elit penguasa, sehingga menjadikan kekerasan struktural ini melahirkan konflik berkepanjangan. Kepemimpinan yang tidak memberikan keadilan bagi semua, atau hanya mengunggulkan sebagian golongan menjadikan struktur-struktur masyarakat semakin terpecah belah. Giddens⁴ menyebut ada dua faktor penyebab kekerasan struktural tersebut. *Pertama*, dominasi tokoh elit dan *kedua*, legitimasi atas perlakuan berbeda. Konflik terjadi bukan hanya soal suku, ras, agama dan antar golongan (SARA), tapi konflik bisa terjadi akibat faktor ekonomi dan politik. Konflik kemudian melebar menjadi fenomena kerusuhan ke wilayah SARA.

Kymlicka berpendapat tentang inklusivitas didasarkan pada nalar liberal, mendudukkan inklusi kelompok yang spesifik seperti komunitas adat atau agama yang harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi liberal yaitu kesetaraan dan partisipasi.⁵ Namun lain halnya dengan Parekh bahwa prinsip liberalisme akan sulit dipraktikkan jika demokrasi belum menjadi norma dan

³ Haryatmoko, *Etika Politik Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 48

⁴ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. (Pasuruan: Pedati, 2003), h. 313

⁵ Kymlicka, W, *Multicultural Citizenship: Liberal theory of Minority Rights*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).

perilaku.⁶ Masyarakat atau komunitas yang tidak dibangun dengan partisipasi aktif antar individu akan menemukan kesulitannya. Kaitannya dengan fakta multikulturalisme dalam praktik harmoni akan mengalami hambatan.

Salah satu penyebab kekerasan struktural terus berlangsung adalah akibat dari sikap diam dan pasrah (*pasivisme*). Biasanya sikap ini ditunjukkan oleh minoritas karena ketidakberdayaan menghadapi kekerasan yang berlangsung. Maka kekerasan akan tetap terjadi, sebagaimana Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa kekerasan dan ketidakadilan dilegalkan dan dipertahankan oleh sikap pasif dalam diri manusia itu sendiri.⁷ Salmi membagi kekerasan dalam empat kategori, yaitu kekerasan langsung, tidak langsung, kekerasan represif, dan kekerasan aleniatif.⁸

Penelitian ini membahas “Konflik di Lampung Tengah”. Sebagaimana kita tahu bahwa konflik di Lampung terjadi begitu saja tanpa ada upaya deteksi konflik, misal Perguruan Tinggi sebagai laboratorium masyarakat berpengetahuan. Hadirnya beberapa komunitas yang hadir di Lampung Tengah dalam rangka menangkal konflik etnis juga penting untuk menjadi bagian kerjasama penanganan

⁶ Parekh, B, *Rethinking Multiculturalism: Cultural diversity and Political Theory*, (MacMillan: Press Ltd, 2000).

⁷ Frans Magnis Suseno, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: PP Kesehatan Remaja Muhammadiyah, 2005), h. 179

⁸ Jamil Salmi, *Violence and Democratic Society*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 32-40

konflik⁹ Fenomena maraknya berbagai konflik bernuansa suku, agama, dan ras (SARA) yang terjadi di Lampung Tengah (Lamteng) harus ditangkal dengan deteksi pengetahuan. Menurut data, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, konflik bernuansa SARA di Lampung Tengah telah terjadi sebanyak 17 kali.¹⁰ Yang paling terkenal adalah dibakarnya 40 rumah lebih oleh massa di desa Tanjung Harapan, kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah.¹¹ Menurut Kahfi¹² seorang warga Lampung di Lampung Tengah menyatakan bahwa, ada pemahaman masyarakat yang mulai bergeser, pemahaman bersama tentang persaudaraan, kebangsaan, dan nilai-nilai persatuan semakin tereduksi. Semua entitas penting membangun kehidupan bersama, saling menghormati, dalam semangat persaudaraan.¹³ Munculnya berbagai komunitas, peguyuban, dan kelompok harmoni dapat menjadi penanda bahwa masyarakat Lampung Tengah memiliki wawasan dan gagasan yang cukup baik dan menjadi potensi untuk menyatukan segala perbedaan yang ada khususnya di Bumi

⁹<http://www.pojoksamber.com/komunitas-sekelik-sedulur-sebuah-ikhtiar-membangun-persaudaraan/> diunduh 21 Februari 2016.

¹⁰<http://www.pojoksamber.com/komunitas-sekelik-sedulur-sebuah-ikhtiar-membangun-persaudaraan/> diunduh 21 Februari 2016.

¹¹ Koran Tempo, *Pasca Bentrok, Lampung Tengah Masih Mencekam*, 28 November 2014.

¹² Wawancara Abdul Mukahfi, Koordinator Komunitas Sekelik Sedulur (10/03/2016).

¹³<http://lampost.co/berita/anang-prihantoro-hadiri-dialog-kebudayaan-dan-pentas-seni> diunduh 21 Februari 2016.

Beguwai Jejamo Wawai.¹⁴ Penelitian ini mencoba mengurai akar konflik di Lampung Tengah.

B. Fokus Kajian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus buku ini adalah: “Bagaimanakah akar permasalahan konflik yang terjadi antara Suku Lampung dan suku Jawa di Lampung Tengah?”

Buku ini mengurai dan menjelaskan akar permasalahan konflik antara suku Lampung dan suku Jawa di Lampung Tengah. Buku ini juga memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait dengan mengurai dan menjelaskan akar permasalahan konflik antara suku Lampung dan Jawa di Lampung Tengah. Semoga kajian dalam buku ini dapat menjadi referensi pemikiran dan pijakan membangun harmoni di masyarakat multikultural. Selain itu, juga sebagai landasan penelitian lanjutan terkait dengan masalah tersebut.

C. Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian terkait konflik suku Lampung dan Jawa di Lampung Tengah belum banyak dilakukan oleh berbagai lembaga dan peneliti khususnya terkait dengan menggali akar konflik. Namun beberapa penelitian dapat menjadi rujukan referensi, karena keterbatasan *space*, dalam penelitian ini hanya dua saja yang dipaparkan:

Pertama, kajian yang telah dilakukan oleh Putut Ary Sadewo berjudul “Dinamika Konflik Agraria dalam

¹⁴ Sebutan untuk bumi Lampung Tengah yang artinya bekerja atau berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat.

Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sendang Ayu dan Surabaya Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah.” Kajian tersebut mengungkap bagaimana dinamika konflik agraria terjadi di Lampung Tengah. Riset tersebut mendayagunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *case study*. Temuan riset tersebut menyatakan bahwa dinamika konflik agraria dalam kehidupan sosial masyarakat Kampung Sendang Ayu dan Surabaya yaitu: *Pertama*, dinamika konflik terjadi sejak tahun 1970, konflik memunculkan konflik terbuka dan tertutup. *Kedua*, penyebab konflik yaitu sewa tanah tidak sesuai dengan akad awal. *Ketiga*, pemicu dan pemacu terjadinya konflik adalah perusahaan melakukan tindakan kekerasan terhadap warga untuk menguasai tanah. *Keempat*, penyelesaian konflik dilakukan antara perusahaan, warga tiga desa dan pemerintah daerah melalui perundingan. *Kelima*, akibat konflik yang tidak kunjung usai telah memunculkan tiga dampak, yaitu dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁵

Kedua, kajian M. Alie Humaidi berjudul “Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung” dari penelitian tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa bencana sosial, seperti konflik Lampung, sangat berbahaya, konflik membuahkan banyak kerugian jiwa, harta, mental, dan hancurnya martabat kemanusiaan dan bangsa. Perseteruan antar kepentingan politik ekonomi juga perbedaan kebudayaan pola pikir, perbedaan pandangan

¹⁵ Putut Ary Sadewo, *Dinamika Konflik Agraria dalam kehidupan sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu*, (Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014).

hidup dan praktik budaya yang dipresentasikan kelompok-kelompok etnik di Lampung, menjadi alasan pecahnya konflik. Pertanyaannya, bagaimana proses akulturasi kebudayaan antara suku asli Lampung dengan Bali yang memecah menjadi serangkaian konflik itu dapat terjadi? Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memungkinkan para pihak membangun kesadaran dini atas konflik sosial di berbagai daerah yang memiliki kemiripan dengan keadaan Lampung. Penelitian ini menemukan hasil bahwa kegagalan akulturasi budaya antara suku Lampung adalah akar masalah dari konflik Lampung. Interaksi homogen dan sempit dan tidak ada ruang-ruang pertemuan lintas budaya menjadi penyebab kegagalan akulturasi sehingga tidak terciptanya pemahaman dan kemauan kerjasama atau akulturasi budaya.¹⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapat dijelaskan perbedaan kajian tersebut dengan buku ini. Kajian Putu Ary Sadewo difokuskan pada konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat. Sedangkan kajian Alie Humaedi difokuskan pada akulturasi budaya dan isu agama terhadap konflik antara suku Lampung dan Bali. Dari pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa buku ini berbeda dari keduanya. Buku ini mengurai akar permasalahan konflik yang terjadi di Lampung Tengah antara suku Lampung dengan suku Jawa.

¹⁶ M. Alie Humaedi, *Kegagalan Akulturasi Budaya Dan Isu Agama Dalam Konflik Lampung*, Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014, h. 149-162

D. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Desain Penelitian

Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹⁷ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis. Desain penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif tidak hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal tapi juga mengungkap hubungan antara satu variabel dengan variabel lain.¹⁸

Data yang digunakan dalam buku ini adalah kualitatif lapangan (*field research*) maka pengumpulan data untuk buku ini, penulis terlibat aktif mendalami akar konflik di lokasi. Sumber data dikategorikan dalam dua kelompok besar: *Pertama*, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian antara lain peristiwa konflik di Lampung Tengah. Untuk memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara (*interview*) dengan beberapa informan yaitu para warga etnis, aparat kampung. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen seperti

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Bumi Aksara: Jakarta 2009) Cet XI h 28

¹⁸ M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

buku, jurnal, artikel dan majalah baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan kajian buku ini.

2. Lokasi Kajian

Buku ini merupakan hasil penelitian di Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha, Kampung Kusuma Dadi Kecamatan Bekri serta Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu.

3. Informan

Yang menjadi informan adalah Kepala Kampung, Tokoh Adat/ Masyarakat, Ketua Paguyuban dan Masyarakat di Lampung Tengah yang meliputi Kampung Kusumadadi Kecamatan Bekri, Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha dan Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara Semi Terstruktur (*Semi Structured Questions*)

Wawancara Semi Terstruktur yaitu metode *interview* yang dilakukan oleh *interviewer* dengan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dan tertata, kemudian satu per satu

diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut¹⁹ dan wawancara mendalam (*dept interview*), yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Selain itu, pengumpulan data dilakukan juga dengan *focus group discussion* (FGD).

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya tentang Konflik di Lampung Tengah antara Suku Jawa dan Suku Lampung.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sampai akhir pengumpulan data. Kemudian data dianalisis kembali serta dilakukan triangulasi dari subjek lain yang tidak menjadi subjek utama penelitian seperti orang yang dekat dengan subjek. Selanjutnya hasil analisis data dideskripsikan dalam pembahasan.

Sementara terkait dengan analisis, data yang bersifat kualitatif, setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptis-analitis, yaitu

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197

²⁰Koentjaraningrat, "*Metode Wawancara*" dalam *Koentjaraningrat* (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. II. (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 138-140.

suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta kondisi, dan sistem pemikiran. Buku ini mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, fenomena faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan dan menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. *Kedua*, interpretasi data, yaitu tahap penyusunan fakta dalam kerangka logis dan harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Kegiatan penyusunan ini disebut juga dengan proses sintesis atau interpretasi. *Ketiga*, penulisan, yaitu tahap ketika hasil interpretasi ditulis secara sistematis, logis, harmonis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun alur pembahasan. Secara teoritik, analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya.²²

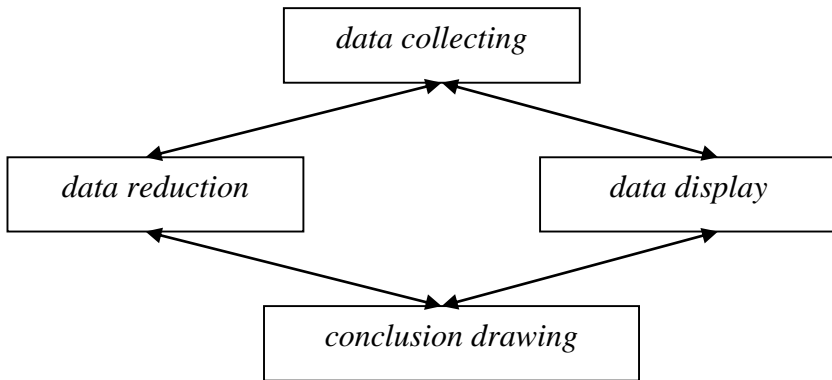
Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat tiga komponen pokok yang akan dilalui peneliti, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.²³ Tiga

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), h. 4-8

²³ Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, (Surakarta: Puslit UMS, 1988), h. 34.

komponen analisis ini berlaku saling menjamin, baik sebelum, pada waktu, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel yang disebut dengan model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Untuk lebih jelasnya, model ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Interactive Model of Analysis

BAB II

TEORI KONFLIK SOSIAL

A. Menggali Hakikat Konflik

Lampung dikenal sebagai lumbung konflik. Berbagai kasus bentrok etnis dan konflik agraria muncul ke permukaan akibat dari ketidakmampuan *stakeholder* di Lampung membangun kerukunan. Konflik adalah tabiat alamiah manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia, konflik adalah bagian dari hubungan interaksi satu dengan yang lainnya. Maka manusia sering juga disebut *homo conflictus* atau makhluk konfliktis.²⁴ Menggali akar konflik yang terjadi di Lampung Tengah perlu dilakukan untuk mendeteksi agar titik konflik dapat teredam dan tidak menyebar menjadi frustrasi sosial yang berkepanjangan.

Sebagaimana Hoda Lecey menyatakan konflik merupakan “*a fight, a collision; a struggle, a contest; opposition of interest, opinion or purpose; mental strife, agony*”.²⁵ Perbedaan menjadi penyebab utama konflik hadir dan tidak kunjung usai. Sikap untuk terbuka dan menghargai perbedaan tidak mewujud dalam laku kehidupan warga. Sedangkan Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menyatakan bahwa istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan

²⁴ Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 8

²⁵ Hoda Lecey, *How to Resolve Conflict in The Work Place*, terj. Bern. Hidayat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 17-18

“fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.²⁶ Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.²⁷ Menurut Lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.²⁸ Dalam definisi yang lain, konflik adalah bentrokan sikap, pendapat, perilaku, tujuan dan kebutuhan yang saling bertentangan.²⁹ Kata ‘bertentangan’ di sini dapat dieksploitasi berulang-ulang sehingga dapat menjadikan konflik semakin melebar dan membangun jarak.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.345.

²⁷ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), h.156

²⁸ Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: universitas terbuka 1994).hal.53

²⁹ Sabian Utsman, *Anatomi Konflik & Solidaritas: Masyarakat Nelayan sebuah Penelitian Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

Konflik pada hakikatnya adalah suatu keadaan dimana sekelompok orang dengan identitas yang jelas terlibat pertentangan secara sadar dengan satu kelompok lain atau lebih, karena mengejar tujuan-tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan, baik dalam nilai serta klaim terhadap status, kekuasaan ataupun sumber daya.³⁰ Selama kepentingan tidak terakomodir maka selalu ada alasan untuk memelihara konflik sebagai hubungan sosial dihitung untung rugi atas dasar ketidakpercayaan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Sebagaimana Dahrendrof bahwa konflik dapat bersifat laten atau

³⁰ M. Atho Mudzhar, *Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik sosial Bernuansa Agama*, dalam Moh. Soleh Isre, (ed), *Konflik Etno Religius*, h. 2

manifes.³¹ Disebut “laten’ karena kepentingan konflik belum disadari, cenderung tersembunyi dan tidak muncul di permukaan. Sedangkan bersifat manifes karena kepentingan konflik sudah disadari oleh individu atau kelompok yang berkonflik. Konflik ini adalah ledakan dari konflik yang tersembunyi.³²

Salah satu alasan konflik yaitu keyakinan agama yang berbeda. Zulfan Tadjoeidin menyatakan bahwa fenomena konflik sosial keagamaan mulai muncul dan meningkat pada awal 1990-an. Semua ini disebabkan karena potensi dan struktur sosial masyarakat Indonesia yang majemuk.³³ Agama adalah ekspresi budaya tentang keyakinan orang terhadap sesuatu yang suci. Kebudayaan yang ada mempengaruhi cara pandang seseorang dalam beragama. Maka sulit diterima jika seseorang dapat beragama secara murni tanpa campur tangan budaya disekitarnya. Lingkungan kulturalnya membentuk tradisi yang sering bercampur-baur dengan pola praktik keagamaan khususnya agama yang menyangkut hubungan *horizontal* lain halnya dengan implementasi *transendent* adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Maka dalam memperdebatkan kebenaran agama yang wilayahnya lebih pada implementasi horizontal ekspresi beragama yang diyakini setiap orang merupakan ekspresi kebudayaan

³¹ Ralf Dahrendrof, *Class and Class Conflict in Industrial society*, (California: Standford University Press, 1956), h. 173

³² Sartono Kartodirjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).

³³ Mohammad Zulfan Tadjoeidin, *Anatomi Kekerasan Sosial di Indonesia: Kasus Indonesia 1999-2001*, (Jakarta: UNSFIR, 2002), h. 22.

yang cenderung multitafsir dan bersifat relatif atas kebenaran Tuhan yang absolut.³⁴

Satu contoh ketika kalangan Islam memperdebatkan ekspresi kebudayaan bercorak agama pada kalangan warga NU soal Yasinan dan Tahlilan, di sisi lain kalangan Muhammadiyah tidak menjalankan ekspresi kebudayaan tersebut, maka yang dibutuhkan dua ormas Islam tersebut adalah kesadaran atas konsep multikulturalisme dari kebudayaan beragama di bumi Nusantara. Sikap untuk terbuka dan saling menghargai penting untuk dilakukan mengingat sesuatu keyakinan yang ditafsirkan secara berbeda juga dapat menyulut perpecahan di masyarakat dan lebih parah lagi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Moeslim Abdurrahman menyebut ekspresi kebudayaan umat Islam Indonesia ini dengan menyebut ber-Islam secara kultural.

Dalam pandangan kalangan Islam kultural, Islam Arab tidak bisa diuniversalkan di bumi Indonesia, selalu proses Islamisasi mengalami akulturasi kebudayaan atau nilai-nilai adat istiadat di masyarakat setempat. Semangat membumikan Islam tentu berbeda dengan semangat Arabisasi.³⁵ Maka Islam kultural menemukan ruang dinamisasi dalam membangun harmoni di tengah perbedaan interpretasi beragama. Gerakan pribumisasi Islam yang pernah di gagas Abdurrahman Wahid—atau

³⁴ Moeslim Abdurrahman, , *Islam sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2003) h. 149.

³⁵ Abd Moqsith Ghazali dan Mustafa Basyir Rasyad, *Islam Pribumi: Mencari Model Keberislaman ala Indonesia*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.) *Menjadi Indonesia: 13 abad Eksistensi Islam di Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 658-659

akrab dipanggil Gusdur—mengadaptasi nilai-nilai universal Islam dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang tumbuh sejak lama di masyarakat. Pribumisasi Islam adalah suatu konsep pemahaman Islam yang dibangun berdasarkan dialog Islam dan budaya lokal sehingga membentuk tradisi baru dan hal ini sesuai dengan semangat gotong royong di Indonesia.

Konflik terjadi bukan hanya soal suku, ras, agama dan antar golongan (SARA), tapi konflik bisa terjadi akibat faktor ekonomi dan politik. Dalam konflik yang umum terjadi pada beberapa wilayah lokal, tidak semua menyangkut persoalan agama dan etnis. Tapi lebih jauh soal politik dan ekonomi. Konflik agama cenderung lebih efektif digunakan untuk menutupi perebutan sumber daya ekonomi yang terjadi di sebuah wilayah. Konflik kemudian melebar menjadi fenomena kerusuhan pada wilayah SARA. Saat Gusdur menjadi presiden Indonesia, konflik yang dipicu oleh krisis ekonomi menjalar ke berbagai daerah dengan melibatkan banyak konflik termasuk SARA.

Sampai hari ini konflik seperti Aceh, Maluku, Papua dan konflik lain seperti tanah masih terjadi di berbagai daerah. Khusus konflik tanah misalnya yang terbaru konflik warga Samin dengan perusahaan semen di Rembang Jawa Tengah, juga Reklamasi Teluk Benua di Bali dengan masyarakat adat dipicu oleh keserakahan kapitalisme global yang merusak lingkungan alam di daerah tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Konflik

Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk, yaitu:

1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.³⁶

Sementara Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 86.

4. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.³⁷

Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini:

1. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

(a). Konflik Destruktif

Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.

(b). Konflik Konstruktif

Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan

³⁷ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h. 102

menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.³⁸

2. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

(a). Konflik Vertikal

Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.

(b). Konflik Horizontal

Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

(c). Konflik Diagonal

Merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.³⁹

C. Sebab-Sebab Timbulnya Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah

³⁸ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h.98

³⁹ Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), h. 67

ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat.⁴⁰

Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai *status need*. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu:

1. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai

⁴⁰ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 361.

yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.

2. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial kerana ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial.⁴¹

Namun beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu:

1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu.⁴² Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan disini tidak selalu diartikan sebagai pembinasan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang

⁴¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 361.

⁴² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 68.

tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

2. Perbedaan kebudayaan.⁴³ Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan khalayak kelompok yang luas. Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.
3. Perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana.⁴⁴

Perbedaan pendirian, budaya, kepentingan, dan sebagainya tersebut di atas sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Dengan demikian perubahan-perubahan sosial itu secara tidak langsung dapat dilihat sebagai penyebab juga terjadinya (peningkatan) konflik-

⁴³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 68.

⁴⁴ Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 2006), h.70

konflik sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat ini akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, secara umum penyebab konflik itu bisa disederhanakan sebagai berikut:⁴⁵

1. Konflik Nilai;
2. Kurangnya Komunikasi;
3. Kepemimpinan yang Kurang Efektif;
4. Ketidakcocokan Peran;
5. Produktivitas Rendah;
6. Perubahan Keseimbangan;
7. Konflik atau Masalah yang Belum Terpecahkan.

Tujuh penyebab konflik di atas adalah penyebab yang sifatnya umum, namun demikian, jika mencermati konflik-konflik yang terjadi khususnya masyarakat di Lampung Tengah bisa merunut, paling tidak ada salah satu penyebab seperti di atas. Dengan mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa berharap bahwa konflik akan dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik.

Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara umum,

⁴⁵ Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal "Hukum & Pembangunan", Tahun Ke-46 No. 1, Januari - Maret 2016, halaman 82.

untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:⁴⁶

- a. Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik,
- b. Penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,
- c. Pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif;
- d. Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan,
- e. Transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif.

D. Pendekatan dan Teori Konflik

1. Pendekatan Konflik

Terdapat banyak model penyelesaian konflik secara teoretis, akan tetapi ada beberapa model yang akan di sajikan dalam tulisan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal "Hukum & Pembangunan", Tahun Ke-46 No. 1, Januari - Maret 2016, halaman 82-83.

⁴⁷ Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal "Hukum & Pembangunan", Tahun Ke-46 No. 1, Januari - Maret 2016, halaman 84.

- a. Model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal;
- b. Model *Boulding*. Model ini menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik;
- c. Model pluralisme budaya. Model ini dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan

perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama;

- d. Model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni *coercion*, *arbitrasi*, dan *mediasi*. *Coercion* adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. Arbitrasi adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, mediasi berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di atas, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Berbagai contoh penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui metode penyelesaian konflik primitif seperti forum *abulo sibatang* (Makassar) atau *Mabulo sibatang* (bugis). Sistem peradilan adat di Papua dan sebagainya.

Ada beberapa prinsip dalam konsep *Restorative justice* antara lain:⁴⁸

- a. *Victim support and healing is a priority* (Dukungan dan pemulihan korban merupakan prioritas);

⁴⁸ Mariam Liebmann, "*Restorative Justice: How it Works*", (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007), h. 26-27.

- b. *Offenders take responsibility for what they have done* (Pelanggar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan);
- c. *There is dialogue to achieve understanding* (Ada dialog untuk mencapai kesepahaman);
- d. *There is an attempt to put right the harm done* (Ada upaya untuk mengganti kerugian dengan tepat);
- e. *Offenders look at how to avoid future offending* (Pelanggar melihat bagaimana masa depan untuk menghindari penyesalan/rasa bersalah);
- f. *The community helps to reintegrate both victim and offender* (Masyarakat membantu pengintegrasian kembali antara korban dan pelaku).

Konsep *restorative justice* ini, sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat.⁴⁹ Pendekatan *restorative justice* digunakan juga dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat Papua, mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban. Jadi fokus kesepakatan penyelesaian perkara pada pemulihan korban.

Metode penyelesaian perkara Pidana dengan konsep *restorative Justice* dilakukan melalui konfrensi dan musyawarah melalui forum-forum komunikasi, dialog dan

⁴⁹ Sukardi, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam hukum Pidana*, "Jurnal hukum Univertistas Yapis Jayapura", Vol. 2 Nomor 1, Mei 2012 (ISSN 2088 – 5466), h. 15.

persuasi. Oleh karena itu, metode penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice* ini memerlukan wadah berupa forum komunikasi penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan aparat penegak hukum, dengan landasan kepercayaan dan kemitraan. Konsep ini dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan masyarakat, terutama korban, serta memberikan manfaat bagi semua pihak, serta memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan itu sendiri.

Resolusi konflik sosial yang pada dasarnya berakar dari sumber permasalahan sosial, justru dapat dengan mudah diselesaikan dengan pola-pola kearifan lokal daerah. Pola-pola tradisional pada dasarnya telah meletakkan pranata-pranata sosial yang dapat digunakan secara efektif untuk mengidentifikasi berbagai akar masalah dari konflik sosial yang terjadi, merumuskan dan mengimplementasikan solusi *problem solvingnya*. Dengan demikian, penyelesaian pasca konflik akan menjadi lebih mudah. Mekanisme ini merupakan prinsip-prinsip resolusi konflik dalam konsep keadilan restorasi yang menitik beratkan pada prinsip rekonsiliasi.

2. Teori Konflik

Ada beberapa teori konflik, di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Teori Konflik Ralf Dahrendorf muncul untuk menentang secara langsung terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya

bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural.⁵⁰

Kalau menurut teori Fungsional Struktural masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan, maka menurut teori konflik sebaliknya. Masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Kalau menurut teori Fungsional Struktural setiap elemen atau setiap institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas, maka teori Konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial.

Kontras lainnya adalah bahwa kalau penganut teori Fungsional Struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.⁵¹

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa

⁵⁰ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 26.

⁵¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 26.

fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama.⁵²

Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui, bahwa masyarakat tak kan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.⁵³

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama

⁵² Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2000), h. 131.

⁵³ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.154.

menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat.⁵⁴

Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan didistribusikan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.

b. Teori Konflik Karl Marx

Teori konflik yang muncul pada abad 18 dan 19 dapat dimengerti sebagai respon dari lahirnya sebuah revolusi, demokratisasi dan industrialisasi. Teori sosiologi konflik adalah alternatif dari sebuah ketidakpuasan terhadap fungsionalisme struktural Talcot Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Perspektif konflik dalam melihat masyarakat ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh klasik seperti Karl Marx, Max Weber, dan George Simmel.

Teori konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsionalisme struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. “Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini

⁵⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 26.

adalah pemikiran Karl Marx dan pada tahun 1950-an, teori konflik yang semakin mulai merebak.”⁵⁵

Teori ini bertujuan untuk menganalisis asal usulnya suatu kejadian terjadinya sebuah pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang yang berperilaku menyimpang. Konflik di sini menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, karena kekuasaan yang dimiliki kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka.

“Konflik berasal dari kata kerja latin *“Configere”* yang berarti *“saling memukul”*. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya”.⁵⁶ Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut di antaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan adanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, maka konflik merupakan situasi yang wajar terjadi dalam setiap bermasyarakat dan tidak ada satu pun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok

⁵⁵ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007) h. 54.

⁵⁶ Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011), h. 113

masyarakat yang lain, konflik ini hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya sebuah masyarakat itu sendiri.

Perspektif sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain, guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. “Dalam pandangan ahli sosiologi, masyarakat yang baik ialah masyarakat yang hidup dalam situasi konfliktual. Konflik sosial dianggap sebagai kekuatan sosial utama dari perkembangan masyarakat yang ingin maju ketahap – tahap yang lebih sempurna”.⁵⁷ Teori konflik sosial memandang antar elemen sosial memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebut yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan di antara elemen lainnya.

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Kunci untuk memahami Marx adalah idenya tentang konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai.

⁵⁷ Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011), h. 92.

Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian, dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.

Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menaikkan gaji para buruh.

Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Tetapi konflik tersebut bisa membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila golongan-golongan bawah bisa membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin. Dan tak banyak konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan yang merusak kehidupan

masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tak berjalan dengan sangat baik.

Konflik tentang buruh misalnya, yang menginginkan upah minimum yang bisa menghidupi kebutuhan hidup layak keluarganya. Hal tersebut bisa menjadi merambat menjadi besar dan membuat keributan yang berakibat fatal, apabila pihak perusahaan atau pemerintah tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat permasalahan tersebut dan memberikan pengertian yang bisa dipahami oleh pihak-pihak buruh dan tidak seandainya memberikan tanggapan atau keputusan yang kurang bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Karl Marx mengemukakan beberapa pandangannya tentang kehidupan sosial⁵⁸, yaitu:

- 1). Masyarakat sebagai arena yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk pertentangan.
- 2). Negara dipandang sebagai pihak yang terlibat aktif dalam pertentangan dengan berpihak kepada kekuatan yang dominan.
- 3). Paksaan (*coercion*) dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial, seperti milik pribadi (*property*), perbudakan (*slavery*), kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan.
- 4). Negara dan hukum dilihat sebagai alat penindasan yang digunakan oleh kelas yang berkuasa (kapitalis) demi keuntungan mereka.

⁵⁸ Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), h. 258.

- 5). Kelas-kelas dianggap sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan sendiri yang bertentangan satu sama lain, sehingga konflik tak terelakkan lagi.

Segi-segi pemikiran Karl Marx berpusat pada usaha untuk membuka sebuah kedok sistem masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Meski dalam pandangannya, tidak seluruhnya kepentingan ditentukan oleh struktur kelas ekonomi, tetapi hal tersebut sangat mempengaruhi dan dipaksa oleh struktur tersebut. Pentingnya sebuah kondisi materiil yang terdapat dalam struktur masyarakat, membatasi pengaruh budaya terhadap kesadaran individu. Beberapa segi kenyataan sosial yang Marx tekankan, yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, yaitu pengakuan terhadap adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang dalam kelas yang berbeda, pengaruh besar yang berdampak pada kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang serta bentuk kesadaran dan berbagai konflik kelas yang muncul menimbulkan perubahan struktur sosial yang mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting.

Penyebab terjadinya konflik menurut Marx, sejarah kehidupan masyarakat ditentukan oleh sebuah materi atau benda yang berbentuk alat produksi, dan alat produksi ini untuk menguasai kehidupan masyarakat. Alat produksi adalah setiap alat yang dihasilkan akan menghasilkan komoditas dan komoditas

tersebut diperlukan masyarakat secara sukarela. Bagi Marx fakta terpenting adalah materi ekonomi karena konflik ini bisa terjadi ketika faktor ekonomi dijadikan sebagai penguasaan terhadap alat produksi.

Berdasarkan alat produksi Marx membagi perkembangan masyarakat ke dalam lima tahap:

- 1). Tahap I : Masyarakat Agraris Primitif. Dalam masyarakat agraris alat produksi berupa tanah. Dalam masyarakat seperti ini penindasan akan terjadi antara pemilik alat produksi, yaitu pemilik tanah dengan penggarap tanah.
- 2). Tahap II : Masyarakat Budak. Dalam masyarakat seperti budak sebagai alat produksi, tetapi dia tidak memiliki alat produksi. Penindasan terjadi antara majikan dan budak.
- 3). Tahap III : Dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah.
- 4). Tahap IV : Masyarakat borjuis. Alat Produksi sebagai industri. Konflik terjadi antara kelas borjuis dan buruh. Perjuangan kelas adalah perjuangan kelas borjuis dan kelas proletar.
- 5). Tahap V : Masyarakat komunis.⁵⁹

Selain tahapan-tahapan di atas, maka Marx juga membagi perkembangan masyarakat berdasarkan Kelas Sosial. Adapun yang dimaksud dengan Kelas sosial adalah sebuah penggolongan manusia dalam bentuk

⁵⁹ George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 185.

penggolongannya yang tidak sederajat dengan kelompok sosial. Jika kelompok sosial lebih menekankan pada pengelompokan manusia atas dasar perbedaan yang bersifat horizontal, tetapi dalam kelas sosial manusia dikelompokkan berdasarkan perbedaan kualifikasi kolektif secara vertikal. Pengkualifikasian sosial secara vertikal, manusia dikelompokkan menurut kelas masing-masing, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.

Secara ekonomi, manusia dikelompokkan menurut pada kepemilikan harta benda, sehingga seseorang yang memiliki harta benda dalam kapasitas yang banyak seperti perusahaan, tanah pertanian yang luas, mobil, rumah mewah dan sebagainya bisa disebut kelompok kelas atas, akan tetapi jika harta benda yang dimiliki hanya dikategorikan lebih dari kecukupan tetapi tidak melimpah, maka bisa disebutkan dalam kelompok kelas menengah dan bagi mereka yang memiliki harta kurang dari berkecukupan akan digolongkan dalam kelompok kelas bawah.

Permasalahan yang terjadi di kehidupan sosial bermasyarakat ini adalah mengapa selalu terdapat di dalam pengelompokan kelas-kelas sosial. Dalam kehidupannya, manusia tidak ada yang menginginkan kemapanan dalam hidup, mereka selalu senantiasa berusaha untuk mendapatkannya. Dari sebuah perjuangan tersebut, maka akhirnya akan muncul untuk terbagi dalam kelas-kelas sosial sesuai dengan apa yang telah didapatkannya setelah perjuangannya tersebut. Bekerja keras dan bekal dari keterampilannya atau keahliannya, maka ia akan menduduki kelas sosial tertentu berdasarkan kekayaan yang ia dapatkan.

Teori kelas dari Marx berdasarkan pemikiran bahwa: “sejarah dari segala bentuk masyarakat dari dahulu hingga sekarang adalah sejarah pertikaian antar golongan”. Menurut pandangannya⁶⁰, sejak masyarakat manusia mulai dari bentuknya yang primitif secara relatif tidak berbeda satu sama lain, masyarakat itu tetap mempunyai perbedaan-perbedaan fundamental antara golongan yang bertikai di dalam mengejar kepentingan masing-masing golongannya. Dalam dunia kapitalisme misalnya, inti dari kapitalisme yaitu pabrik lebih merupakan tempat utama terjadinya pertentangan-pertentangan antara golongan yaitu mereka yang mengeksploitatif dan mereka yang dieksploitatif, antara pembeli dan penjual dan antara buruh dan majikan; daripada merupakan tempat terjadinya kerja sama yang fungsional. Kepentingan golongan serta konfrontasi fisik yang ditimbulkannya adalah merupakan faktor utama dari proses sosial di dalam sejarah.

Marx mengajukan konsepsi penting tentang konflik, yaitu tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, akan tetapi menunjukkan bahwa dalam masyarakat, pada waktu itu, terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin (proletar). Kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial yang hirarkis, dan borjuis melakukan eksploitasi terhadap proletar dalam sistem produksi kapitalis.

Teori ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx yang melihat, masyarakat berada dalam konflik yang

⁶⁰ George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2011), h. 153

terus-menerus di antara kelompok dan kelas sosial. Disisi lain, konflik masyarakat juga dikuasai oleh sebagian kelompok atau individu yang mempunyai kekuasaan dominan. Dengan demikian, maka tampaklah bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai, keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin akan bertentangan.

Secara umum pendekan konflik dibagi menjadi dua dan Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi (*property*), yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas borjuis⁶¹ adalah kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi yang dalam hal ini adalah perusahaan sebagai modal dalam usaha. Kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi sehingga dalam pemenuhan akan kebutuhan ekonominya tidak lain hanyalah menjual tenaganya. Konflik antar kelas terjadi melalui proses produksi sebagai salah satu kegiatan ekonomi di mana dalam proses produksi terjadi kegiatan pengeksploitasian terhadap kelompok proletar oleh kelompok borjuis. Perubahan sosial justru membawa dampak yang buruk bagi para kaum buruh (proletar) karena perubahan sosial berdampak pada semakin banyaknya jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk akan menyulitkan kehidupan kelompok proletar karena tuntutan akan lapangan pekerjaan semakin tinggi, sementara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bertambah (konstan). Tingginya jumlah

⁶¹ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 200.

penawaran tenaga kerja akan berpengaruh pada rendahnya ongkos tenaga kerja yang diterimanya, sehingga kehidupan selanjutnya justru kian buruk. “Sementara kehidupan kelompok kapitalis (borjuis) akan semakin berlimpah dengan segala kemewahannya.⁶² Gejala inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pangkal pada konflik sosial.”

“Konflik antar kelas sosial biasanya berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antara kelas sosial atas dan kelas sosial bawah.⁶³ Konflik ini terjadi karena kepentingan yang berbeda antar dua golongan atau kelas sosial yang ada.” Konflik antar kelas sosial biasanya lebih ditekankan pada konflik antara buruh dan majikan di dalam struktur masyarakat industri, konflik antara patron dan klien dalam struktur masyarakat feodal. Golongan buruh yang menuntut perbaikan upah kepada pemerintah maupun perusahaan adalah wujud dari salah satu konflik antar golongan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah wujud dari konflik sosial antar kelas sosial yang ada. Faktor utama yang menjadi pemicu konflik biasanya terletak pada perbedaan pendapat dimana majikan yang memiliki modal usaha memiliki pendapatan yang lebih besar, sedangkan para buruh yang memiliki tenaga memperoleh pendapatan

⁶² Elly M Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*. (Jakarta : Kencana, 2011), h. 366.

⁶³ George Ritzer dan Goodman J Douglas, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2011), h. 360.

yang kecil, sehingga keadaan ini memunculkan isu ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan sebagainya.

Ketegangan hubungan produksi dalam sistem produksi kapitalis antara kelas borjuis dan kelas proletar menyebabkan suatu bentuk gerakan sosial besar, yaitu sebuah revolusi. Ketegangan hubungan produksi terjadi ketika kelas proletar telah menyadari akan eksploitasi borjuis terhadap mereka. Sampai tahap ini “Marx adalah seorang yang sangat yakin terhadap perubahan sosial radikal dan merindukannya, tetapi terlepas dari moral Marx, esensi akademiknya adalah realitas kekuasaan kelas terhadap kelas yang lain yang lemah, konflik antar kelas ini terjadi karena adanya eksploitasi tersebut”⁶⁴ dan suatu perubahan sosial, proses dialektika yang sangat berkaitan dengan konflik dan determinisme ekonomi.

Konflik yang terjadi antara kelas borjuis dan proletar ini bersifat mendalam dan sulit untuk diselesaikan karena memiliki perbedaan dalam kesadaran kelas bukan dalam cara hidup. Perbedaan kelas borjuis dan kelas proletar ini tidak hanya terdapat pada cara hidup mereka, akan tetapi juga cara berfikir mereka.

Kaitannya ini berhubungan dengan demonstrasi buruh yang sedang marak terjadi untuk menuntut hak-hak mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai pekerja yang berada di dalam naungan sebuah perusahaan, sebagai contoh misalnya demo petani plasma udang Windu Dipasena yang berada di bawah kekuasaan CP Prima yang berada di Kabupaten Tulang

⁶⁴ George Ritzer dan Goodman J Douglas, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2011), h. 355.

Bawang, Lampung. Kaitannya ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat atau para petani plasma/buruh yang bekerja dalam perusahaan tersebut, dengan adanya sebuah demonstrasi para petani plasma/buruh tersebut konflik dalam kehidupan masyarakat semakin bertambah setiap harinya karena mereka menginginkan hak-hak para petani plasma/buruh terpenuhi dengan semakin melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok yang makin sulit untuk didapatkan dengan hasil yang kurang memadai. Dan sebagai fungsi untuk mempersatukan pendapat para petani plasma/buruh agar tidak tertindas oleh kelas borjuis (pemilik modal), upaya yang dilakukan oleh para petani plasma/buruh tersebut untuk meningkatkan ketidakadilan yang didapatkan selama bekerja. Kehidupan yang para petani plasma/buruh lakukan tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari dengan menggunakan otot, pikiran dan waktu mereka agar menghasilkan upaya atau usaha untuk sandang, pangan dan papan.⁶⁵

Teori konflik sosial ini sangatlah sepadan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan para buruh yang merasa tertindas dengan ketidakadilan yang mereka dapatkan dari usaha mereka selama bekerja, maka dari itu para buruh menuntut adanya keseimbangan yang tidak mereka dapatkan dari kaum-kaum kapitalis. Perbedaan-perbedaan kelas membuat kehidupan

65

<https://nasional.tempo.co/read/news/2011/08/05/179350258/8-kesepakatan-atasi-konflik-dipasena>, diunduh 3 November 2016.

masyarakat menimbulkan sebuah konflik sosial yang semakin memusingkan masyarakat, perbedaan kelas tersebut membuktikan bahwa kehidupan masyarakat atau para buruh seperti dijadikan mainan oleh para kaum kapitalis yang mana mereka mempunyai kedudukan yang penting dan memiliki kepentingan yang harus mereka lakukan dengan menjadikan kelas proletar (buruh) untuk melakukan kepentingan-kepentingan pribadi yang diinginkan. Walaupun dalam kehidupan hal tersebut sangatlah saling berkaitan karena kelas borjuis dan kelas proletar saling membutuhkan untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan.

Teori merupakan suatu usaha untuk menjelaskan pengalaman sehari-hari kita mengenai dunia, pengalaman kita yang terdekat dalam kaitannya dengan sesuatu yang tidak begitu dekat yang terjadi pada orang lain, pengalaman masa lalu, serta emosi-emosi yang bisa kita nalarkan. Dalam proses penjelasan, penerangan serta pemahaman pengalaman, ide-ide serta masalah-masalah yang ada secara lebih sistematis disebut teori sosial.

Dari penjelasan di atas, dikatakan bahwa pandangan teori konflik tentang masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda dari pandangan teori fungsionalisme struktural karena keduanya sama-sama memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian. Perbedaan antara keduanya terletak dalam asumsi mereka yang berbeda-beda tentang elemen-elemen pembentuk masyarakat itu. Menurut teori fungsionalisme struktural, elemen-elemen itu fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa berjalan secara normal. Sedangkan teori konflik, elemen-elemen itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda

sehingga mereka berjuang untuk saling mengalahkan satu sama lain guna memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Walaupun terdapat konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang membeda-bedakan kepentingan-kepentingan pribadi dan membeda-bedakan kelas borjuis dan kelas proletar, akan tetapi permasalahan tersebut dapat menimbulkan sebuah hubungan yang bisa mempersatukan keadaan bermasyarakat, namun hal-hal tersebut dapat menimbulkan sebuah dampak atau konsekuensi dalam kehidupan mereka.

c. Teori Konflik Lewis A. Coser

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Lewis A. Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan.⁶⁶ Lewis A. Coser juga mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, fungsionalistas konflik dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok sosial sebagai berikut:

1. Permusuhan dengan kelompok sosial yang intim. Bila konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antar konflik

⁶⁶ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 184-185

realistis dan non realistis lebih sulit untuk dipertahankan. Semakin dekat suatu hubungan, maka semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanamkan makin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan.

2. Fungsionalitas konflik, Lewis A. Coser menyatakan bahwa yang penting dalam menentukan apakah suatu konflik fungsional atau tidak ialah tipe isu yang merupakan subjek konflik itu. Konflik fungsional positif bilamana tidak mempertanyakan dasar-dasar hubungan dan fungsional negatif jika menyerang suatu nilai inti.
3. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok menurut Lewis A. Coser, konflik dengan kelompok luar akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Sebaliknya konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi didalam kelompok.

Menurut paradigma fakta sosial kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri. Lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, jika masyarakat dilihat dari struktur sosialnya, tentunya memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Kehidupan sosial manusia merupakan fakta tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu

semata.⁶⁷ Bagi Lewis A. Coser, konflik yang terjadi di dalam masyarakat tidak semata-mata menunjukkan fungsi negatifnya saja, akan tetapi dapat pula menimbulkan dampak yang positif. Oleh karena itu konflik itu bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti juga halnya dengan George Simmel, yang berkomentar bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam pelbagai cara yang tidak terhitung jumlah dan bersifat kompleks.

Lewis A. Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang dari persediaannya tidak mencukupi. Lewis A. Coser menyatakan, perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan (*Collectivities*), atau antara individu dan kumpulan. Bagaimanapun, konflik antar kelompok maupun intra kelompok senantiasa ada di tempat orang hidup bersama. Menurut Lewis A. Coser bahwa konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting, dan sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah ataupun merusak. Konflik bisa saja menyumbang banyak kepada kelesatarian kelompok dan mempererat hubungan antar anggotanya seperti menghadapi musuh bersama dapat

⁶⁷ I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), h. 2-3

mengintegrasikan orang, menghasilkan solidaritas dan keterlibatan, dan membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri.

Fungsi positif dari konflik menurut Lewis A. Coser merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser, yaitu:

1. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
2. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.
3. Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan, dan semakin tingginya tekanan pada consensus dan konformitas.
4. Para menyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
5. Dan sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul kepermukaan dan

dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi, umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Pemikiran Lewis A. Coser tentang suatu hubungan antara kelompok luar dan dalam ini memang ada sedikit kemiripan dengan George Simmel seperti proporsi Simmel yang menggambarkan tentang fungsi positif konflik eksternal bagi kelompok internal sebagai berikut:

“ Conflict with pther group constringes to establishment and reaffirmation of the identity of the group and maintains its boundaries against the surrounding social world” (Coser,1964:38)

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Lewis A. Coser bahwa fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya, sehingga kelompok-kelompok (pemimpin kelompok) dapat berusaha memancing antagonisme dengan kelompok luar atau menciptakan musuh dengan orang luar supaya mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal.⁶⁸

Konflik memang kadang kala bernuansa kekerasan. Arti dari kekerasan itu sendiri adalah *violence* secara etimologis berasal dari bahasa latin “*Vis*” yang artinya kekuatan, kehebatan, kedahsyatan,

⁶⁸ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, h. 108

dan kekerasan dan latus yang artinya membawa. Dari istilah tersebut berarti "*vislotus*" berarti membawa kekuatan, kehebatan, kadahsyatan dan kekerasan. Namun secara terminologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang atau kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik pada barang. Menurut Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.

Kekerasan dalam arti sempit menunjuk pada tindakan yang berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Dengan demikian, kekerasan menunjuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, artinya mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung, dan aktual.

Kekerasan dalam arti luas, menunjuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan secara sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan secara struktural adalah kekerasan yang terjadi didalam struktur sosial, seperti penindasan yang dilakukan oleh Negara otoriter, sistem yang membuat kehidupan sosial tidak adil.

Lewis A. Coser dalam bukunya "*The Fungtions of Social Conflict* (1956)", mengemukakan bahwa tidak

ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena konflik, mulai dari pertikaian antar pribadi melalui konflik kelas sampai peperangan internasional. Oleh karena itu *coser* tidak mengkonstruksi teori umum.⁶⁹

Konflik sebagai agen untuk mempersatukan masyarakat adalah sebuah pemikiran yang sejak lama diakui oleh tukang propaganda yang dapat menciptakan musuh yang sebenarnya tak ada, atau mencoba menghembus antagonism terhadap lawan yang tidak aktif.

Konflik mempunyai dua wajah, pertama, memberikan kontribusi terhadap integrasi sistem sosial. Kedua, mengakibatkan terjadinya perubahan sosial.⁷⁰ Pengertian ini banyak merujuk pada gagasan *Simmel*, sekalipun dalam melihat oposisi serta konsekuensinya bagi individu secara keseluruhan dalam total versi konflik fungsional yang dikemukakan Lewis A. Coser, ternyata lepas dari penetrasi pandangan *Simmel*.⁷¹ Konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi atau hubungan melalui aliansi dengan kelompok lain. Dalam satu

⁶⁹ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

⁷⁰ Abdul Munir Mul Khan dkk. *Membongkar Praktir Kekerasan Mengagas Kultur Nir Kekerasan*, (Yogyakarta: Sinergi Press, 2002), h. 7

⁷¹ Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Mengugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membantu*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 178

masyarakat, konflik dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Pada dasarnya konflik juga dapat membantu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tak percaya terhadap posisi musuh mereka, tetapi akibat konflik, posisi dan batas antar kelompok ini sering menjadi diperjelas. Karena itu individu bertambah mampu memutuskan untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hubungannya dengan musuh mereka. Konflik juga memungkinkan pihak yang bertikai menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan relatif mereka dan meningkatkan kemungkinan untuk saling mendekati atau saling berdamai.

Lewis A. Coser dalam kajian sosiologisnya memfokuskan pada fungsi konflik sosial. Lewis A. Coser berpendapat bahwa tidak selamanya konflik berkonotasi negatif, sebaliknya konflik sosial dapat menjadikan penguat kelompok sosial tertutup. Dalam masyarakat tertentu secara internal bisa menampakkan kecenderungan disintegrasi, namun konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal tersebut. Konflik dengan sebuah kelompok mungkin membantu menghasilkan kohesi karena ada serangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain.⁷²

d. Teori Konflik Max Weber

⁷² Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*, (Surabaya: LPAM, 2002), h. 210

Terkait dengan konflik Max Weber menyatakan bahwa ketika kekuasaan, dominasi dan disiplin dilanggar atau disalah gunakan oleh seorang aktor yang memberi perintah dengan menciptakan legitimasi yang salah, maka dari sanalah akan muncul perlawanan yang melahirkan konflik.

Sebab seperti yang diutarakan oleh Morton Deutsch, Konflik merupakan pergumulan kekuasaan atas berbagai perbedaan: informasi atau keyakinan yang berbeda; kepentingan, keinginan atau nilai-nilai, kemampuan-kemampuan yang berbeda dalam memperoleh sumber-sumber yang dibutuhkan.⁷³ Yang berarti bahwa konflik lahir dari berbagai perbedaan baik informasi, kepentingan, keinginan, nilai serta kemampuan dalam memperoleh atau mungkin memperebutkan sumber-sumber yang dibutuhkan yang tentunya pastilah bersifat langka sehingga harus diperebutkan.

Lebih dalam lagi, konflik lahir sebab individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda dan untuk itulah konflik seringkali merupakan persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*Perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Memahami maksud dari pernyataan ini, nampaklah bahwa setiap konflik memiliki sebab yang

⁷³ Morton Deutsch dalam Hugh F Halverstadt, *Conflict: Productive and Destructive* "Mengelola Konflik Gereja", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 5.

berbeda-beda, tergantung dengan objek terjadinya konflik tersebut, serta pihak apa yang sedang berkonflik.

Objek konflik pastilah terkait dengan “kepentingan”. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Apa yang sesungguhnya ia inginkan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Ada kepentingan yang bersifat universal, seperti kebutuhan akan rasa aman, isentitas, restu sosial (*social approval*), kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat manusia yang bersifat fisik. Namun, beberapa kepentingan lain bersifat spesifik bagi pelaku-pelaku tertentu, misalnya keinginan bangsa Palestina untuk memiliki tanah air. Beberapa kepentingan memiliki prioritas yang lebih tinggi dari pada yang lain, dan tingkat prioritas tersebut berbeda pada masing-masing orang. Beberapa kepentingan mendasari kepentingan lainnya; sebagai contoh, kepentingan Amerika atas keamanan mendasari kepentingannya untuk mempertahankan kekuatan aliansi Barat.

Konflik yang didefinisikan sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin dalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.

Dalam suatu hubungan ada yang disebut antagonism. Secara sosiologis antagonisme merupakan suatu unsur yang tidak pernah tidak ada dalam kerja sama. Sebuah pertentangan karena antagonisme seperti ini berlangsung dengan harapan bahwa antagonisme akan berhenti apabila mencapai taraf tertentu, karena kesadaran bahwa hal itu tidak memiliki manfaat atau karena telah jenuh berkelahi. Sebab konflik atau pertentangan yang terjadi antara kedua pihak karena mengejar tujuan yang sama.⁷⁴

Konflik biasanya terjadi juga ketika orang cenderung mengidentifikasi diri dengan para anggota kelompok lain yang dekat dengannya atau yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri. Bila kelompok tersebut berprestasi yang lebih baik, maka dari sanalah tercipta konflik akibat dari peningkatan aspirasi diri sendiri. Hal seperti ini juga dapat terjadi pada individu, di mana fenomena seperti tersebut ini disebut sebagai *invidious comparison* (perbandingan yang menyakitkan hati). Hal ini akan menstimulasi peningkatan aspirasi untuk alasan yang dianggap realistis (karena rasanya masuk akal ketika orang tersebut dapat melakukan hal itu maka ia pun dapat melakukannya) maupun bersifat idealistis (karena orang tersebut berpikir hasil kerjanya harus sebaik hasil kerja orang yang menjadi perbandingannya).

Aktor yang terlibat konflik biasanya adalah pihak yang kepentingannya – tujuan, kebutuhan, keinginan,

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *George Simmel: Beberapa Teori Sosiologis* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22-23.

tanggung jawab dan/atau komitmennya – bertabrakkan dengan tujuan, kebutuhan, keinginan, tanggung jawab dan/atau komitmen dari sekurang-kurangnya satu pihak lain. Mereka terkait konflik karena ada yang mereka pertaruhkan dalam perbedaan-perbedaan yang bertabrakkan. Jika ingin agar konflik selesai maka perbedaan inilah yang harus diselesaikan dan hal tersebut hanya sanggup diselesaikan oleh mereka sendiri.⁷⁵

Pelaku konflik karena tanggung jawab institutional mereka disebut sebagai para pelaku struktural, sedangkan yang bertikai karena status yang mereka miliki disebut sebagai pelaku budaya. Baik staf yang digaji, ketua komisi dan anggota majelis yang bekerja secara sukarela termasuk dalam para pelaku struktural ketika mereka terkait dalam konflik. Dengan demikian, para aktor konflik struktural ini pastilah akan menggunakan kekuasaan guna pencapaian keinginan.

e. Teori Konflik George Simmel

George Simmel lahir di pusat kota Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ia belajar berbagai bidang studi di Universitas Berlin.⁷⁶ George Simmel membagi konflik dalam dua jenis sebagaimana telah dikatakan di atas

⁷⁵ Morton Deutsch dalam Hugh F Halverstadt, *Conflict: Productive and Destructive* “Mengelola Konflik Gereja”, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 69.

⁷⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (terjemahan), (Jakarta: Kreasi Kencana, 2011), h. 172.

bahwa Coser sependapat dengan George Simmel tentang teori konflik maka sudah pasti pemikiran mereka tidaklah jauh berbeda.

Pertama, konflik dapat dilihat dalam dinamika kelompok dalam (*in-group*) dengan hubungan kelompok luar (*out-group*). Dengan pengertian bahwa solidaritas dan integrasi kelompok dalam semakin bertambah tinggi jika konflik dengan pihak luar makin bertambah. Sebab sesungguhnya menurut Simmel ketegangan atau konflik dengan pihak luar akan meningkatkan dan mempertahankan solidaritas. Kelompok dalam ini lebih menyalahkan pihak luar atas kesulitan-kesulitan internalnya daripada membiarkan kesulitan-kesulitan ini menghasilkan perpecahan atau konflik dalam kelompok tersebut.⁷⁷ Dengan demikian George Simmel lebih melihat dampak konflik pada sisi positifnya, yakni meningkatkan dan mempertahankan solidaritas secara khusus dalam kelompok itu sendiri (*in-group*) ketika berkonflik dengan kelompok luar (*out-group*).

Kedua, George Simmel juga mengemukakan bahwa konflik internal atau konflik di dalam diri kelompok tersebut juga sama halnya dengan konflik dengan kelompok luar, yaitu keduanya memiliki dampak konflik yang positif serta negatif. Tak terelakkan bahwa ketegangan dan perasaan negatif merupakan hasil dari keinginan individu untuk meningkatkan kesejahteraannya, kekuasaannya,

⁷⁷ Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi, Klasik dan Modern (terjemahan), Robert M.Z. Lawang (Jilid 2; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 196-197.

prestise, dukungan sosial atau penghargaan-penghargaan lainnya. Apapun alasannya konflik internal memang sering dihindari sebab dianggap jelek dan tidak diinginkan terjadi. Di lain pihak, anggota kelompok tersebut secara terbuka mengakui kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, khususnya untuk hal yang tidak terlalu penting sehingga membangun sebuah mekanisme untuk penyelesaiannya. Namun, ketika tidak menemukan sebuah kerangka consensus atau tak ada lagi dasar untuk kesatuan kelompok, maka konflik internal dapat mengakibatkan disintegrasi atau perpecahan kelompok. Tapi antagonistik dan ketidaksepakatan akan berkurang ketika masalah-masalah pokok dibicarakan dengan terbuka dan bukan dipendam. Baiknya, konflik internal terjadi karena ketika suatu hubungan begitu erat pastilah akan ada sikap antagonistik dari masing-masing individu di dalam kelompok tersebut, yang sudah seharusnya dikeluarkan atau disampaikan dengan terbuka, sehingga tidak menggunung dan menghasilkan konflik yang lebih besar. Serta dampaknya pun tidak begitu buruk, semua dirundingkan secara eksplisit.⁷⁸

Jadi, berdasarkan uraian pemikiran Simmel di atas, sebuah konflik internal tercipta memang bisa berdampak negatif, yaitu terjadinya disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok tersebut ketika tidak mencapai suatu konsensus terhadap perbedaan yang menghasilkan sikap antagonistik tersebut. Tapi sisi

⁷⁸Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern (terjemahan)*, Robert M.Z. Lawang (Jilid 2; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 200-201

positifnya adalah tidak terpendam lebih lama lagi perasaan antagonistik dan permusuhan yang ada sehingga dampaknya pun tidak akan begitu parah, atau dapat dibicarakan secara terbuka.

Dalam sebuah konflik internal, masuknya pihak ketiga dalam kelompok, sejumlah peran sosial menjadi mungkin. Sebagai contoh, pihak ketiga dapat memainkan peran sebagai penengah atau mediator pada perselisihan dalam kelompok, tetapi pihak ketiga dapat juga memanfaatkan perselisihan antar dua pihak yang lain demi keuntungannya sendiri atau menjadi sasaran yang dapat diperebutkan dua pihak lain. Anggota ketiga pun dapat secara sengaja mendorong terjadinya konflik antar dua pihak lain untuk memperoleh superioritas (memecah belah dan menguasai).⁷⁹

Sering kali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lama dengan menghabiskan sumber-sumber yang dimiliki dan pengorbanan yang besar. Akan tetapi, kedua belah pihak yang terlibat konflik tidak mau mengalah untuk menyelamatkan muka. Menyelamatkan muka sering kali terjadi jika konflik berkaitan dengan harga diri atau citra diri.

E. Dampak Konflik bagi Masyarakat

Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat

⁷⁹ <http://perilakuorganisasi.com/georg-simmel-masyarakat-sebagai-interaksi.html>, Ferry Roen, 8 Oktober 2016.

disosiatif. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik akan tergantung dari persoalan-persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik. Oleh karena itu, ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat, yaitu:

1. Dampak Positif Konflik

- a) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok.⁸⁰ Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
- b) Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

2. Dampak Negatif Konflik

Adapun dampak negatif konflik, di antaranya adalah:

⁸⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 68.

- a) Hancurnya kesatuan kelompok.⁸¹ Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- b) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.⁸²
- c) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidak patuhan anggota masyarakat akibat dari konflik.⁸³

F. Strategi Penanganan Konflik

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative*

⁸¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 377.

⁸² Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 378.

⁸³ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 70.

processes). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.⁸⁴

Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi (paksaan), *détente*. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama membawa hasil.⁸⁵

Nasikun menyatakan bahwa pengendalian konflik itu ada empat bentuk, yaitu:

a. Konsiliasi (*conciliation*)

Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.

b. Mediasi (*mediation*)

⁸⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 77

⁸⁵ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 22.

Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.

- c. Arbitrasi berasal dari kata latin *arbitrium*, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi.
- d. Perwasitan

Di dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.⁸⁶

Berdasarkan keempat bentuk pengendalian konflik sebagaimana tersebut di atas, maka menurut peneliti perlu ditambahkan integrasi social masyarakat yang sama-sama ikut serta menyelesaikan konflik di masyarakatnya, misalnya dalam bentuk paguyuban, organisasi kepemudaan dan lain-lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa "integrasi" memiliki makna

⁸⁶ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 25.

pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.⁸⁷ Kata “kesatuan” mengisyaratkan berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain mengalami proses pembauran. Jika pembauran telah mencapai suatu perhimpunan, maka gejala perubahan ini dinamakan sebagai integrasi. Dalam bahasa Inggris, integrasi (*integration*) antara lain bermakna “pengintegrasian” atau “penggabungan.”⁸⁸

Jika berbagai macam elemen yang berbeda satu sama lain merujuk pada kemajemukan sosial yang telah pula mencapai suatu kehidupan bermasyarakat, maka proses ini dinamai integrasi sosial. Dalam sosiologi, integrasi sosial berarti proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Dengan demikian, ada dua unsur pokok integrasi sosial. Unsur pertama adalah pembauran atau penyesuaian, sedangkan unsur kedua adalah unsur fungsional. Jika kemajemukan sosial gagal mencapai pembauran atau penyesuaian satu sama lain, maka kemajemukan sosial berarti disintegrasi sosial. Dengan kata lain, kemajemukan gagal membentuk (disfungsional) masyarakat.

Keakraban relasi sosial antar anggota kelompok bergantung pada intensitas kontak langsung antar anggota. Keakraban relasi sosial berjalan seiring dengan proses homogenasi cita-cita kelompok, dan berpengaruh langsung terhadap kelanggengan kehidupan bersama.

⁸⁷ <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh pada 21 November 2016.

⁸⁸ <http://kamusbahasainggris.org>, diunduh pada 21 November 2016.

Jika keakraban relasi sosial telah terjalin sedemikian lama, maka menciptakan keakraban sosial itu sendiri menjadi tujuan masyarakat pedesaan.⁸⁹

Dengan demikian jelas bahwa hubungan-hubungan antara individu-individu sebagai anggota kelompok tidak semata hanya didasarkan atas perjanjian, peraturan-peraturan yang ada dan pola perilaku yang berhasil diciptakan yang telah disepakati bersama. Akan tetapi yang paling penting bagi kelanggengan bagi hubungan itu adalah terletak pada tinggi atau rendahnya rasa kesetiaan dan pengabdian dari setiap anggota terhadap kesatuan kelompok yang diselenggarakan menurut pola perilaku dan norma yang telah diakui bersama.

G. Penanganan Konflik Sosial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Penanganan konflik sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Kemudian diikuti dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Konflik Sosial. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2015 tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

⁸⁹ Eka Hendry Ar., dkk, *Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnik*, "Walisongo", Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, h. 195.

Undang-Undang nomor 7 tahun 2012, dalam konsiderannya menyatakan pertimbangan dibentuknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib,
- b. damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda;
- c. bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkeompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;
- d. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial.⁹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, pengertian konflik sosial adalah:

⁹⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.⁹¹

Adapun tujuan penanganan konflik sebagaimana dimuat dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.⁹²

Ruang lingkup penanganan konflik menurut Undang-Undang ini adalah:

- a. Pencegahan Konflik;

⁹¹ Pasal 1, poin a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

⁹² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.⁹³

Sumber konflik disebutkan dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. persetujuan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;
- e. atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.⁹⁴

Pencegahan konflik menurut Undang-Undang ini dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi Konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.⁹⁵

Dalam pasal 7, dinyatakan:

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, setiap orang berkewajiban:

⁹³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

⁹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

⁹⁵ Pasal 6, ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.⁹⁶

Penyelesaian perselisihan secara damai dimuat dalam pasal 8, diurai sebagai berikut:

- 1). Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
- 2). Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- 3). Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

⁹⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

Dalam pasal 9, dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan sebagai kewajiban pemerintah dalam rangka meredam konflik sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal;
- h. dan menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.⁹⁸

Sedangkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015, dinyatakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan konflik adalah sebagai berikut:

- a. penguatan kerukunan umat beragama;
- b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;

⁹⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

- g. pendidikan kewarganegaraan;
- h. pendidikan budi pekerti;
- i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik;
- j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. pembinaan kewilayahan;
- l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. pengentasan kemiskinan;
- o. desa berketahanan sosial;
- p. penguatan akses kearifan lokal;
- q. penguatan keserasian sosial; dan
- r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana termuat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2015 sebagai berikut:

- 1). Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, secara umum meliputi:
 - a. pangan;
 - b. sandang;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. pelayanan kesehatan;

⁹⁹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

- e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
 - f. pelayanan psikososial;
 - g. penampungan serta tempat hunian; dan
 - h. dapur umum.
- 2). Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik perempuan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi ketersediaan kebutuhan untuk:
- a. pelayanan kesehatan reproduksi; dan
 - b. penyembuhan dari trauma.
- 3). Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi spesifik anak-anak, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga meliputi:
- a. pengasuhan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan anak;
 - d. tempat bermain; dan
 - e. penyembuhan dari trauma.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015.

BAB III

PROFIL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

A. Sejarah Singkat

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Gunung Sugih. Sejarah singkat Lampung Tengah terdiri dari beberapa waktu yakni:

a. Zaman pemerintahan Belanda

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sekarang ini, pada zaman pemerintahan Belanda merupakan Onder Afdeling Sukadana yang dikepalai oleh Seorang Controleur berkebangsaan Belanda dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang

Demang Bangsa Pribumi/Indonesia, yaitu :

- (1). Onder Distrik Sukadana
- (2). Onder Distrik Labuhan Maringgai
- (3). Onder Distrik Gunung Sugih

Masing-masing Onder Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang berkedudukan sebagai pembantu Demang untuk mengkoordinir Pesirah. Masing-masing Onder Distrik terdiri dari marga-marga, yaitu:

- (1). Onder Distrik Sukadana terdiri dari Marga Sukadana, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai Way Seputih.

- (2). Onder Distrik Labuhan Maringgai terdiri dari Marga Melinting, Marga Sekampung Ilir, Marga Sekampung Udik, Marga Subing Labuhan.
- (3). Onder Distrik Gunung Sugih terdiri dari Marga Unyi, Marga Subing, Marga Anak Tuha, Marga Pubian.

b. Zaman Jepang (1942-1945)

Wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada waktu tata Pemerintahan Jepang adalah wilayah Bun Shu Metro dan Bun Shu Metro terbagi dalam beberapa Gun Shu, Marga-Marga dan kampung-kampung. Bun Shu dikepalai oleh seorang Bun Shu Cho dan Gun Shu dikepalai oleh Gun Shu Cho, sedangkan Marga dikepalai oleh Marga Cho, dan kampong dikepalai oleh seorang kepala kampung.

c. Zaman Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dan dengan berlakunya peraturan peralihan pasal 2 UUD 1945, maka Bun Shu Metro berubah menjadi Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati pertama Kabupaten Lampung Tengah adalah Burharuddin dengan masa jabatan tahun 1945-1948.

d. Masa Pemerintahan Negeri (1953-1975)

Dengan dibubarkannya Pemerintahan Marga sebagai gantinya dibentuk Pemerintahan Negeri. Pemerintahan Negeri terdiri dari seorang Kepala Negeri dan Dewan Negeri. Kepala Negeri dipilih oleh Dewan Negeri dan para Kepala Kampung. Pada masa ini di Kabupaten Lampung Tengah terdapat Sembilan Negeri, yaitu:

- 1). Negeri Trimurjo dengan pusat pemerintahan di Simbarwaringin
- 2). Negeri Metro dengan pusat pemerintahan di Metro
- 3). Negeri Pekalongan dengan pusat pemerintahan di Pekalongan
- 4). Negeri Tribawono dengan pusat pemerintahan di Banarjoyo
- 5). Negeri Sekampung dengan pusat pemerintahan di Sumbergede
- 6). Negeri Sukadana dengan pusat pemerintahan di Sukadana
- 7). Negeri Labuhan Maringgai dengan pusat pemerintahan di Labuhan Maringgai
- 8). Negeri Way Seputih dengan pusat pemerintahan di Gunung Sugih
- 9). Negeri Seputih Barat dengan pusat pemerintahan di Padang Ratu.

Dalam praktek sistem Pemerintahan Negeri tersebut dirasakan adanya kurang keserasian dengan Pemerintahan Kecamatan dan keadaan ini menyulitkan tugas Pemerintah. Oleh karena itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung mulai tahun 1972 mengambil kebijaksanaan secara bertahap menghapus Pemerintahan Negeri dengan jalan tidak mengangkat lagi Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya dan dengan demikian secara bertahap Pemerintahan Negeri di Lampung Tengah dihapus, sedangkan hak dan kewajiban Pemerintahan Negeri beralih kepada Pemerintahan Kecamatan setempat. Menurut beberapa pengamat secara yuridis hapusnya Pemerintahan Negeri

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.

e. Pemekaran Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan pemekaran wilayah/daerah sebagai bentuk tindak lanjut dari:

- (1). Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/340/B.I/HK/1993 tanggal 6 Agustus 1993, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (2). Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.45/652/01/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Renstra Penataan dan Pengembangan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- (3). Hasil rapat panitia pelaksana rencana pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II di Provinsi daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung tanggal 31 Agustus 1993.
- (4). Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor: B/Sprint-159/01/1994 tanggal 13 Desember 1994 tentang Tim Pelaksana Teknis Penyiapan Rencana Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota

Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Dampak dari pemekaran wilayah tersebut maka Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berpusat di Metro dipindahkan ke Gunung Sugih.

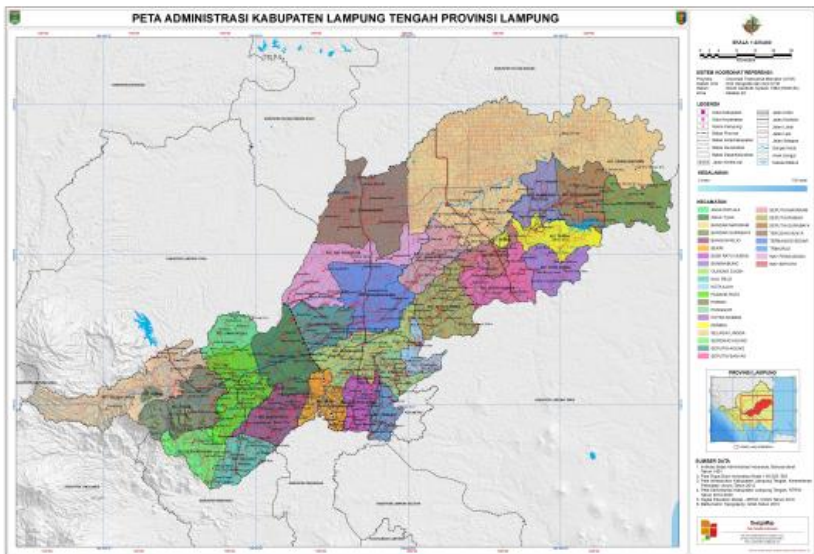
B. Kondisi Geografi

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Ibu Kota Kabupaten Lampung Tengah adalah Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah meliputi areal daratan seluas 4789, 82 km², terletak di bagian tengah Provinsi Lampung yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada kedudukan 104° 35' Bujur Timur sampai 105° 50" Bujur Timur dan 4° 30' Lintang Selatan sampai 4° 15' Lintang Selatan.

Gambar 1
Peta Kabupaten Lampung Tengah



C. Administrasi Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Lampung Tengah dibagi menjadi 28 Kecamatan serta 307 kampung/kelurahan (termasuk UPT). Berikut adalah nama-nama Kecamatan yang ada di Lampung Tengah disertai luas wilayah dan jumlah kelurahan per Kecamatan.

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Kampung	Luas Wilayah	
			Luas Area (km ²)	(%) Terhadap Total
1.	Padang Ratu	15	204,44	4,27
2.	Selaga Lingga	13	308,52	6,44
3.	Pubian	20	173,88	3,63
4.	Anak Tuha	12	161,64	3,37
5.	Anak Ratu Aji	6	68,39	1,43
6.	Kalirejo	16	101,31	2,12
7.	Sendang Agung	9	108,89	2,27
8.	Bangun Rejo	16	132,63	2,77
9.	Gunung Sugih	15	130,12	2,72
10.	Bekri	8	93,51	1,95
11.	Bumi Ratu Nuban	10	65,14	1,36
12.	Trimurjo	14	68,43	1,43
13.	Punggur	9	118,45	2,47
14.	Kota Gajah	7	68,05	1,42
15.	Seputih Raman	14	146,65	3,06
16.	Terbanggi Besar	10	208,65	4,36

17.	Seputih Agung	9	122,27	2,55
18.	Way Pengubuan	7	210,72	4,40
19.	Terusan Nunyai	7	302,05	6,31
20.	Seputih Mataram	12	120,01	2,51
21.	Bandar Mataram	12	1.055,28	22,03
22.	Seputih Banyak	13	145,92	3,05
23.	Way Seputih	6	77,84	1,63
24.	Rumbia	8	106,09	2,21
25.	Bumi Nabung	6	108,94	2,27
26.	Putra Rumbia	10	95,02	1,98
27.	Seputih Surabaya	13	144,60	3,02
28.	Bandar Surabaya	10	142,39	2,97
	Lampung Tengah	307	4.789,82	100

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2016.

Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah 4.789,82 km². Kabupaten Lampung Tengah merupakan Kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung. Data di atas menunjukkan bahwa Kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas adalah wilayah

Kecamatan Bandar Mataram dengan luas 1.055,28 km². Sementara itu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban merupakan Kecamatan yang paling sempit wilayahnya yang hanya seluas 65,14 km².

D. Kependudukan

Penduduk Lampung Tengah berdasarkan sensus penduduk tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 masing-masing sebanyak 997.349 jiwa, 1.690.947 jiwa, 1.901.630 jiwa, 1.059.795 jiwa, dan 1.170.717 jiwa. Pertumbuhan penduduk pada periode 1971-1980 sekitar 5,97 persen per tahun turun menjadi 1,18 persen per tahun pada periode 1980-1990. Pertumbuhan penduduk tersebut kembali mengalami penurunan pada periode 1990-2000 dan 2000-2010 masing-masing sekitar 0,85 persen per tahun dan 1,05 persen per tahun. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Lampung Tengah berjumlah 1.192 958 jiwa sehingga laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000-2012 mencapai 1,14 persen. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang per Kecamatan.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Kecamatan	Penduduk		Kepadatan Penduduk per km ²
		Jumlah (jiwa)	(%) terhadap total	
1.	Padang Ratu	48.359	4,05	237

2.	Selaga Lingga	31.847	2,67	103
3.	Pubian	41.284	3,46	237
4.	Anak Tuha	35.985	3,02	223
5.	Anak Ratu Aji	15.662	1,31	229
6.	Kalirejo	64.001	5,36	632
7.	Sendang Agung	36.690	3,08	337
8.	Bangun Rejo	56.281	4,72	424
9.	Gunung Sugih	63.222	5,30	486
10.	Bekri	25.553	2,14	273
11.	Bumi Ratu Nuban	28.959	2,43	445
12.	Trimurjo	49.757	4,17	727
13.	Punggur	36.602	3,07	309
14.	Kota Gajah	32.200	2,70	473
15.	Seputih Raman	46.670	3,91	318
16.	Terbanggi Besar	109.429	9,17	524
17.	Seputih Agung	46.797	3,92	383
18.	Way Pengubuan	37.551	3,15	178
19.	Terusan Nunyai	45.205	3,79	150
20.	Seputih Mataram	46.505	3,90	388
21.	Bandar Mataram	73.561	6,17	70

22.	Seputih Banyak	42.418	3,56	291
23.	Way Seputih	17.198	1,44	221
24.	Rumbia	34.137	2,86	322
25.	Bumi Nabung	31.318	2,63	287
26.	Putra Rumbia	17.571	1,47	185
27.	Seputih Surabaya	45.108	3,78	312
28.	Bandar Surabaya	33.088	2,77	232
	Lampung Tengah	1.192.958	100	249

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka 2016.

E. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah cenderung mengalami fluktuatif dari tahun 2009-2012. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,10 persen. Angka ini menurun pada tahun 2010 menjadi 5,88 persen. Pada tahun 2011 kembali turun menjadi 5,75 persen. Tahun 2012 pertumbuhan PDRB Lampung Tengah naik menjadi 6,37 persen. Berikut adalah tabel PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 4.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Lampung Tengah.

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	2.838. 854	2.972. 952	3.099. 064	3.231. 116
2.	Pertambangan dan penggalian	78 703	82 783	89 785	95 039
3.	Industri Pengolahan	858 495	899 714	942 022	996 678
	a. Industri minyak dan gas bumi	-	-	-	-
	b. Industri tanpa migas	858 495	899 714	942 022	996 678
4.	Listrik, gas dan air bersih	24 776	25 391	28 423	30 569
5.	Konstruksi	345 309	362 071	388 190	408 997
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	869 268	929 442	992 655	1 064 290

7.	Pengangkutan dan komunikasi	158 508	189 129	218 230	260 154
	a. Pengangkutan	84 804	94 751	108 481	126 704
	b. Komunikasi	73 704	94 378	109 749	133 450
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	331 644	378 018	423 212	484 516
9.	Jasa-jasa	377 490	389 293	405 585	435 277
	a. Pemerintahan Umum	314 272	321 000	332 085	357 106
	b. Swasta	63 218	68 294	73 500	78 171
	PDRB	5 883 047	6 228 793	6 587 165	7 006 637

Sumber: Lampung Tengah dalam Angka 2016.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah terjadi pada semua sektor. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan cukup dominan adalah sektor transportasi dan komunikasi sekitar 19,21 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami pertumbuhan 14,49 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor jasa-jasa yang tumbuh 7,32 persen.

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2012 masih bertumpu pada sektor

pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Lampung Tengah bertumpu di sektor pertanian. Sektor pertanian di Kabupaten Lampung Tengah masih menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tabel distribusi PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007-2012.

**Tabel 4.4 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007-2012**

No.	Sektor	2010	2011	2012
	Sektor Primer	52,88	53,36	53
1.	Pertanian	50,81	51,32	51
2.	Penggalian	2,07	2,04	2
	Sektor sekunder	17,62	17,00	17
3.	Industri pengolahan	12,93	12,26	12
4.	Listrik dan air	0,61	0,64	1
5.	Bangunan	4,08	4,10	4
	Sektor tersier	29,50	29,64	30
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	11,90	12,08	12
7.	Angkutan dan komunikasi	5,23	5,80	6

8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	4,48	4,61	5
9.	Jasa-jasa	7,88	7,15	7
	PDRB	100	100	100

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka 2016

Sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pembentukan PDRB sebesar 51 persen pada tahun 2012. Selain itu, pertumbuhannya meningkat dari 4,24 tahun 2011 menjadi 4,26 di tahun 2012. Selain sektor pertanian yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembentukan PDRB, sektor lain yang berpengaruh adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sekitar 12 persen dan industri pengolahan 12 persen. Pada tahun 2012 kedua sektor ini mampu tumbuh masing-masing sekitar 7,22 persen dan 5,80 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil terhadap pembentukan PDRB adalah listrik, gas dan air bersih yang hanya menyumbang 1 persen bagi PDRB serta pertambangan dan penggalian yang hanya menyumbang 2 persen bagi PDRB. Pada tahun 2016 kedua sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan yakni 7,55 persen dan 5,85 dari tahun sebelumnya.

BAB IV

TEMUAN LAPANGAN KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG TENGAH

Masyarakat Lampung Tengah cukup majemuk, paling tidak yang mendominasi adalah pendatang yang berasal dari pulau Jawa atau suku Jawa. Kehidupan masyarakat pendatang suku Jawa dan masyarakat asli suku Lampung, sudah barang tentu terwujudnya interaksi dalam kehidupan keseharian. Ada perbedaan kepentingan atau kepentingan yang bertolak belakang dalam kehidupan sebuah masyarakat yang multi etnik, adanya kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok yang hidup dalam satu wilayah, memiliki aspirasi/kepentingan, kemudian muncul pertentangan terbuka.

Buku ini mendedahkan konflik di Lampung Tengah dengan mengkaji 3 (tiga) kampung di Lampung Tengah dengan karakter yang berbeda. Kampung Kusumadadi mewakili kampung yang didominasi suku Jawa, berada di kecamatan Bekri. Kampung Tanjung Harapan mewakili kampung yang relatifimbang jumlah suku Lampung dengan suku Jawa, walaupun tetap lebih banyak suku Jawa. Kampung Tanjung Harapan berada di kecamatan Anak Tuha. Sedangkan Kampung Kuripan merupakan kampung yang mayoritas penduduknya suku Jawa, relatif aman, tidak pernah terjadi konflik yang berarti. Kampung Kuripan berada di kecamatan Padang Ratu.

A. Kampung Kusumadadi Kecamatan Bekri

Kampung Kusumadadi salah satu kampung di Kecamatan Bekri dengan luas wilayah sebesar 38,52 km², jumlah penduduk 5.397 jiwa dengan kepadatan 251 jiwa/km². Secara administratif Kusumadadi sebagai Ibukota Kecamatan Bekri. Kampung Kusumadadi merupakan kampung yang berada di pusat kecamatan.

Kampung Kusumadadi merupakan potret sebuah kampung yang berada di Lampung Tengah yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa. Sementara masyarakat lainnya yang merupakan sebagian kecil dari masyarakat di Kusumadadi adalah suku Lampung, Banten dan Semendo.¹⁰⁸

Tahun 2011 terjadi kerusuhan berupa amuk massa/penyerangan yang dilakukan oleh warga Kampung Buyut kepada masyarakat suku Jawa di dusun Sidorejo 1 Kampung Kusumadadi. Amuk massa/penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung dengan melakukan pembakaran rumah, sebagai reaksi dibunuhnya seorang dari dua orang yang dituduh maling sapi. Menurut Mujibullah, serangan dilakukan oleh masyarakat suku Lampung sebagai tindakan atas dibunuhnya seorang yang dituduh maling sapi. Masyarakat Kusumadadi kehilangan sapi, pagi-pagi ditemukan ada orang asing, warga menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah pelakunya. Warga berdatangan, massa tidak terbendung lagi dan menghakimi orang yang diduga pelaku pencurian sapi, sehingga yang bersangkutan meninggal dunia. Warga kampung Buyut (dekat kampung Wates), tidak terima atas meninggalnya salah satu warga mereka. Terlebih lagi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Kampung Kusumadadi,

informasi yang disampaikan atau berkembang adalah; ada warga Buyut sedang berkunjung ke rumah gadis di kampung Kusumadadi (*nganjang*), motornya diambil dan dimassa/dipukuli hingga meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang dipelintir tersebut-bukan informasi sesungguhnya, sesuai fakta-¹⁰⁹ maka warga Buyut dengan dibantu warga kampung-kampung suku Lampung lainnya melakukan penyerangan dengan melakukan pembakaran dan perusakan rumah.¹¹⁰

Secara detail, ketegangan ini berawal insiden yang terjadi pada Kamis tanggal 18 Oktober 2011, di Kampung Kesumadadi. Ketika itu, warga Kampung Buyut yang diduga mencuri tiga ekor sapi dibakar massa di areal kebun sawit kampung setempat. Pelaku mencuri satu ekor sapi jantan dan dua betina milik Suja'i (41 th), salah satu warga Dusun IV, Kampung Kesumadadi. "Sekitar pukul 03.00 WIB, kakak Suja'i mengontrol kandang sapi miliknya yang berdampingan dengan kandang Suja'i. Ketika itu, ia terperangah lantaran tiga ekor sapi milik adiknya tidak ada di tempat," cerita Kanitreskrim Polsek Gunungsugih Aipda Erson ketika itu. Mengetahui hal ini, lanjutnya, sang kakak

¹⁰⁹ Hal yang sama, pernah terjadi seorang warga suku Lampung dengan seenaknya mengambil (mencuri dengan terang-terangan) buah kelapa milik warga kampung Kusumadadi dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan mobil. Pihak keluarga yang memiliki pohon kelapa melakukan perlawanan, sehingga pelaku pencurian terdesak dan lari meminta bantuan warga suku Lampung lainnya dengan menyampaikan informasi bahwa yang bersangkutan sedang membawa kelapa menggunakan mobil, dicegat oleh warga suku Jawa.

¹¹⁰ Wawancara dengan Kadus Kampung Kusumadadi, sekaligus koordinator Paguyuban Masyarakat Bersatu (PAMBERS), bapak Mujibullah

korban melapor kepada ketua RT setempat. Kemudian diumumkan melalui pengeras suara masjid. Tak pelak, massa berbondong-bondong keluar rumah menuju kediaman Suja'i. Nah, ketika itulah massa melihat ada orang yang berlari di sawah yang terletak di belakang rumah pemilik sapi. Massa mengejar dan berhasil menangkap. Kemudian massa membakar pelaku di kebun sawit.¹¹¹

Ratusan massa asal Kampung Buyut, Kecamatan Gunung Sugih mendatangi Kampung Kusumadadi, Kecamatan Bekri sejak pukul 16.00, tanggal 8 November 2011. Massa saat itu menggunakan ratusan kendaraan roda dua dan tiga unit truck meluncur ke kampung Kesumadadi sekitar pukul 15.00, usai memakamkan Khairil Anwar (29) warga Buyut Udik. Berbekal berbagai senjata tajam seperti tombak, pedang, celurit, bom molotov, dan senjata lainnya. Namun gelombang massa ini berhasil diblokade aparat gabungan dari Polres Lampung Tengah. Kodim 0411, Satbrimobda Polda Lampung di perempatan Wates, Kecamatan Bekri. Sayang, minimnya jumlah aparat membuat blokade aparat jebol. Massa berhasil masuk ke Desa Kesumadadi. Hanya dalam hitungan menit, massa yang terbakar emosi mulai merusak rumah-rumah dan membakarnya. Tercatat 13 rumah ludes terbakar dan 70 rumah rusak lantaran amuk masa. Bahkan, sejumlah warung kelontongan ikut menjadi sasaran penjarahan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebab, sejak isu penyerangan muncul pada Selasa (6/11), aparat desa, pemerintah daerah sudah meminta ratusan warga Kesumadadi mengungsi. Saat penyerangan terjadi Kapolres Lampung Tengah AKBP Hery Setyawan, Wakil

¹¹¹ <http://www.jpnn.com/read>

Bupati Lamteng Ir . Mustafa dan Dandim 0411/LT Letkol Onf M. Ridwan yang ada di tengah-tengah kampung tak kuasa menahan amuk massa. Namun setelah bantuan dari Polres Metro dan Satbrimob Polda Lampung tepat pukul 17.30, massa berhasil dipukul mundur hingga ke perbatasan desa Kusumadadi dan membuat blokade berlapis.¹¹²

Penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Buyut dibantu dengan kampung-kampung masyarakat suku Lampung lainnya menyebabkan masyarakat ratusan warga mengungsi di Pondok Pesantren Darul Mutaqin, Sementara ratusan lainnya mengungsi di empat wilayah lainnya. Tempat-tempat itu di antaranya, Desa Bangun Sari, Kesumajaya, Buras, Sidorejo 2 dan Rengas. Warga Desa Kusuma Dadi kurang lebih 300 orang diungsikan di Pondok Pesantren Darul Mustakhin yang berada di sekitar desa tersebut.¹¹³

Kondisi pengungsi dapat terlihat dalam gambar berikut:¹¹⁴

¹¹² <http://www.jpnn.com/read>

¹¹³ <http://www.radarbangka.co.id>

¹¹⁴ <http://www.bandarlampungnews.com> dan <http://www.radarbangka.co.id>



Menurut keterangan Pak Sarikun (kepala Kampung Kusumadadi), maupun Pak Mujibullah (Kadus sekaligus koordinator PAMBERS kampung Kusumadadi), tindakan warga Kusumadadi menghakimi dan menghabisi nyawa

warga kampung Buyut yang diduga pelaku pencurian sapi, dikarenakan warga/masyarakat suku Jawa sudah habis tingkat kesabarannya. Menurut mereka selama ini tindakan-tindakan kriminal sering dialami oleh warga suku Jawa yang berada di Kusumadadi. Tindakan kriminal seperti begal/pencurian motor, pencurian beras, ayam, HP, TV dan sebagainya, sawit, pemalakan seringkali dialami oleh warga suku Jawa yang dilakukan oleh warga suku Lampung yang berasal dari kampung-kampung tetangga. Tindakan pencurian, bahkan terkadang dilakukan secara terang-terangan (dilakukan siang hari bahkan terkadang di hadapan pemiliknya), seperti pencurian buah sawit di siang hari dengan menggunakan peralatan untuk mengunduh sebagaimana mestinya, membawa mobil dan dalam jumlah yang besar. Pelaku pencurian jika kepergok pemilik kebun sawit akan mengancam dengan senjata tajam (badik, golok, bahkan terkadang senjata api). Tindakan-tindakan seperti ini bukan hanya sekali, dua kali dialami oleh masyarakat suku Jawa, akan tetapi sudah seringkali, berulang-ulang.

Ketidaktegasan aparat keamanan/polisi terhadap pelaku-pelaku tindakan kriminal di kampung Kusumadadi menyebabkan terjadinya akumulasi kekecewaan. Akumulasi kekecewaan tersebut direalisasikan melalui tindakan menghakimi sendiri pelaku-pelaku tindakan kriminal. Hal inilah yang terjadi terhadap pelaku yang diduga mencuri sapi.¹¹⁵

¹¹⁵ Walaupun dalam hal ini, menurut Tri Sujatno, salah satu tokoh pemuda di kampung Kusumadadi, orang yang meninggal dunia akibat dimassa sebenarnya masih berdasarkan dugaan semata, karena malam hari ada warga yang kehilangan sapi, pagi harinya ditemukan seorang warga dari kampung lain (Buyut) berada di kampung Kusumadadi.

Menurut Mujibullah, para tokoh masyarakat di kampung Kusumadadi prihatin, mengapa negara sudah maju seperti ini, negara hukum, akan tetapi pelaku-pelaku tindakan kriminalitas tidak ditindak secara tegas.¹¹⁶ Demikian pula ditegaskan oleh Sarikun, selama ini aparat keamanan/polisi jika menerima laporan tidak cepat melakukan tindakan. Sehingga kami sebagai warga lebih sering melaporkan ke aparat di koramil. Terkadang pelaku tindakan kriminal sudah kita serahkan kepada aparat kepolisian, besoknya sudah bebas berkeliaran, tidak ada tindakan/sanksi yang diberikan oleh aparat kepolisian.¹¹⁷

Berdasarkan peristiwa pembakaran rumah di dusun 1 kampung Kusumadadi yang dilakukan warga suku Lampung dari kampung Buyut dan solidaritas dari kampung-kampung lain, maka beberapa tokoh di kampung Kusumadadi menemui pengurus pusat Paguyuban Masyarakat Bersatu (PAMBERS) yang berada di kampung Jayasakti. Kami sebagai perwakilan warga kampung Kusumadadi menyatakan keinginan bergabung dengan PAMBERS. Paguyuban pusat di kampung Jayasakti sudah terbentuk sekitar 6 tahun yang lalu. Keinginan warga Kusumadadi bergabung dengan paguyuban PAMBERS dikarenakan keinginan adanya rasa aman. Rata-rata kampung-kampung yang tergabung dalam paguyuban memiliki pengalaman yang sama seperti kampung Kusumadadi. Keberadaan PAMBERS di kampung Jayasakti dilatarbelakangi hal yang sama. Tindakan pencurian, pemalakan, pembegalan seringkali dialami oleh masyarakat suku Jawa. Selama ini pelaku-pelaku tindakan kriminal

¹¹⁶ Wawancara dengan Mujibullah.

¹¹⁷ Wawancara dengan Sarikun.

tidak ditindak oleh aparat kepolisian, warga suku Jawa tidak berani melawan. Bahkan yang muncul sikap apatis, tidak peduli dan tidak mau membantu jika ada kawan/saudaranya yang terzalimi, yang penting diri mereka selamat. Melalui paguyuban PAMBERS, maka muncul keberanian warga suku Jawa. Dengan berhimpun dalam wadah paguyuban, menjadikan mereka memiliki keberanian untuk melawan atas tindakan-tindakan kriminal yang terjadi pada mereka.

Aksi pertama yang mereka lakukan di Wates, di mana banyak terjadi pemalakan. Warga kampung Kusumadadi jika menyusul saudaranya yang datang, maka di Wates dimintai uang. Jika tidak mau memberikan uang, maka perlakuan kasar sudah pasti akan mereka terima, bahkan pemukulan dan sebagainya. Mobil yang melintas di Wates, diminta uang, jika tidak mau memberi maka akan mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan.¹¹⁸ Maka warga sepakat ngepam/menjaga setiap titik/lokasi yang rawan terjadi tindakan pemalakan, di perempatan dan pasar Wates terutama pada saat lebaran/idul fitri. Alhamdulillah sekarang di Wates pun menjadi aman.

Peristiwa selanjutnya terjadi di kampung Sukajawa, ada warga yang dibegal, kebetulan pengurus PAMBERS oleh warga Gunung sugih, maka massa sudah berdatangan-para anggota PAMBERS-hanya untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk melakukan penyerangan. PAMBERS selalu mengedepankan proses melalui jalur hukum. Pelaku

¹¹⁸ Kondisi seperti ini juga peneliti (Suhairi, A. Mujib) saksikan. Pada saat sering melalui perempatan Wates menaiki angkutan umum, menjadi pemandangan yang biasa penumpang diminta ongkos dua kali, supir yang melintasi diminta uang.

kriminalitas kita serahkan ke aparat kepolisian agar diproses dan ditindak secara hukum. Jika aparat penegak hukum/kepolisian sudah memproses secara hukum dan menindak pelaku kriminalitas, maka PAMBERS tidak akan melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Namun, jika aparat kepolisian sudah dilaporkan/diserahkan pelaku kriminal kepada mereka dan tidak ada tindakan tegas sebagaimana mestinya, maka jangan salahkan jika paguyuban melakukan tindakan dengan caranya sendiri.¹¹⁹

Prinsipnya jika ada anggota yang terzalimi (mengalami tindakan pemalakan, pencurian, pembegalan dan sebagainya), maka kita bela. Dalam melakukan pembelaan terhadap warga suku Jawa yang terzalimi, paguyuban tidak bertindak gegabah. Kita kirim dulu utusan untuk menyelidiki dan mengetahui dengan sesungguhnya fakta di lapangan. Jika yang terjadi adalah warga suku Jawa yang melakukan tindakan yang tidak benar, maka kami tidak akan bela, bahkan kami serahkan kepada aparat kepolisian. Niat kami sebagai anggota paguyuban adalah untuk membantu pemerintah, terutama aparat kepolisian. Yang kami inginkan adalah penegakan hukum secara adil, tidak tebang pilih, pelaku tindakan kriminal diproses secara hukum, tidak dibela. Pada hakikatnya yang kami inginkan adalah terwujudnya rasa aman, terwujudnya keamanan dengan baik.¹²⁰

Setelah warga Kusumadadi bergabung dalam Paguyuban Masyarakat Bersatu, maka cenderung aman. Masyarakat ikut serta dalam mewujudkan keamanan, seperti pos-pos keamanan terutama pada saat lebaran.

¹¹⁹ Wawancara, Mujibullah.

¹²⁰ Wawancara, Mujibullah.

Pelaku-pelaku tindakan kriminal pun tidak dengan seenaknya melakukan tindakan kriminal di siang hari bahkan di hadapan pemiliknya. Demikian pula, aparat keamanan pun juga sudah memperhitungkan keberadaan paguyuban, laporan dan penyerahan pelaku tindakan kriminal sudah direspons dan diproses sebagaimana mestinya.

B. Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha

Kampung Tanjung Harapan salah satu kampung di kecamatan Anak Tuha memiliki luas wilayah sebesar 1.664 km² dengan jumlah penduduk 3.391 jiwa dengan kepadatan 219 jiwa/km². 40% Lampung, 45% Jawa, 14% Sunda, dan 1% lainnya. Dusun 1 Lampung, Dusun 2 Jawa, Dusun 3 Jawa, Sunda.

Terjadi konflik di kampung Tanjung Harapan, tepatnya pada tanggal 27 Nopember 2014. Masyarakat Lampung Dusun 1 menyerang dusun 2 (Tanjungrejo), membakar rumah sejumlah 117 rumah, sebagai reaksi 2 orang pelaku pencurian dibunuh dan ditenggelamkan di kali, yaitu Kurniajaya dan Angga Wirayuda. Rumah-rumah yang dibakar berada di RT 03, 05, 06 dan sebagian kecil (hanya 4 rumah) di RT 04.

Menurut Kepala Kampung (Kakam) saat ini, Pak Ibrahim, tindakan menghabisi pelaku kriminal sebagai akumulasi kekesalan tindakan pencurian yang sering dilakukan, Kepala Kampung sebelumnya cenderung melindungi, aparat kepolisian tidak menindak tegas pelaku kriminalitas. Dibunuhnya 2 (dua) orang pelaku pencurian dikarenakan keluarga pelaku pembunuhan sudah

seringkali mengalaminya.¹²¹ Menurut seorang warga di dusun 2, pihak keluarga yang membunuh pelaku pencurian sudah sekitar 7 kali mengalami pencurian.¹²² Puncaknya adalah, pihak keluarga yang akan melangsungkan seserahan dalam rangka pernikahan, sudah membeli barang-barang yang akan diserahkan esok hari. Namun sore hari, saat rumah kosong barang-barang yang sudah dibeli untuk diserahkan pada acara seserahan dicuri oleh kedua pelaku. Pihak mana yang tidak akan merasa tersakiti dan menyebabkan kekesalan dan kemarahan yang membunyah. Seserahan akan dilakukan besok pagi, tidak ada waktu lagi untuk membeli barang-barang seserahan, mau ditaruh mana muka dan nama baik keluarga besar mereka. Kekesalan dan kemarahan yang sudah membunyah, rasa malu terhadap pihak calon besan, menyebabkan tiga kakak beradik (iparan), Edi, Rusdi dan Yanto bersepakat untuk menghabisi kedua nyawa pelaku pencurian. Kedua pelaku pencurian, diculik, dimasukkan karung, dibunuh dan dimasukkan dalam kali dengan harapan tidak ketahuan jejak tindakan mereka. Namun kebetulan sandal 2 orang pelaku pencurian yang telah dibunuh, ditemukan di rumah pelaku pembunuhan, ada percikan darah dan rokok. Pihak keluarga dan warga suku Lampung dusun 1 berkeyakinan bahwa warga dusun 2 yang menghabisi nyawa kedua korban. Mereka terus menyelidiki, menanyakan kepada warga dusun 2 atas hilangnya kedua korban. Kebetulan seorang wanita yang mereka tanya dan interogasi adalah

¹²¹ Wawancara dengan Ibrahim, Kepala Kampung Tanjung Harapan.

¹²² Wawancara dengan Anang, warga dusun 2, sebelumnya pernah menjabat Kepala Dusun, dan termasuk rumahnya yang dibakar.

kurang waras (gangguan jiwa) yang kebetulan melihat dan mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Maka ketika ditanya, yang bersangkutan mengiyakan dan membenarkan bahwa kedua orang yang hilang telah dibunuh dan ditenggelamkan/dimasukan ke dalam kali. Ketika mengetahui bahwa 2 orang warga dusun 1 yang hilang, telah dibunuh oleh warga dusun 2, maka mereka bergerak menyerang dusun 2 dengan dibantu oleh warga suku Lampung dari kampung-kampung lain.¹²³

Kondisi pada saat konflik dapat terlihat dalam gambar sebagai berikut:



Bupati Lampung Tengah Bapak Hi. A. Pairin bersama jajaran kepolisian melihat langsung kondisi lapangan di kampung Tanjung Harapan. Hal ini terlihat dalam gambar sebagai berikut:

¹²³ Wawancara dengan Ibrahim.



Ketiga pelaku yang membunuh/menghabisi nyawa kedua pelaku pencurian, sebenarnya adalah orang-orang baik.¹²⁴ Demikian pula yang dinyatakan oleh Bapak Anang dan Ibu Asiyah. Ketiga pelaku adalah orang-orang yang sangat baik, taat beribadah, ramah, sopan. Setiap ada kegiatan di kampung Tanjung Harapan, atau kegiatan gotong royong, sambatan, pasti mereka ada. Mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi dan sering membantu tetangga atau orang lain. Kami tidak percaya jika mereka adalah pelaku yang membunuh kedua pelaku pencurian, setelah betul-betul terbukti, baru mereka mempercayainya.¹²⁵

¹²⁴ Wawancara dengan Kepala Kampung Tanjung Harapan, Ibrahim

¹²⁵ Wawancara dengan Anang (tokoh masyarakat, sebelumnya pernah menjabat Kadus) dan Asiyah warga dusun 2

Dampak konflik/penyerangan yang dialami oleh masyarakat dusun 2 kampung Tanjung Harapan cukup traumatik. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Asiyah, ketika terjadi penyerangan kami semua mengungsi ke rumah-rumah saudara-saudara kami di daerah lain, bahkan tidak bertemu dengan keluarga selama 1 (satu) minggu. Rasa takut masih membayangi kami, bahkan sampai sekarang anak laki-lakinya belum mau tidur/minap di rumah, ia minap di tempat saudaranya. Kami sama sekali tidak menginginkan kejadian seperti ini terulang kembali.¹²⁶ Menurut kepala kampung, Ibrahim, orang tua, istri, dan anak-anak pelaku yang membunuh sampai dengan pertengahan tahun 2016 belum berani pulang ke rumah mereka, ada yang mengungsi ke Mesuji dan lain-lain. Setelah serah terima jabatan sebagai kepala kampung, pada bulan Agustus 2016, saya pulangkan mereka dan saya jamin atas keselamatan mereka.¹²⁷

Kepala kampung Tanjung Harapan, Bapak Ibrahim, ketika ditanyakan apa yang menjadi pemicu atau penyebab potensi terjadinya konflik di Tanjung Harapan, maka ia menjelaskan pemicunya adalah pelaku-pelaku tindakan kriminal yang cenderung dilindungi.¹²⁸ Atau bisa kita nyatakan, aparat kampung, kepala kampung sebelumnya, demikian juga aparat keamanan kepolisian tidak menindak secara tegas dan memberikan sanksi hukum kepada pelaku-pelaku tindakan kriminal. Tidak ada upaya dari aparat

kampung Tanjung Harapan, keduanya yang mengalami rumah dibakar massa.

¹²⁶ Wawancara dengan Asiyah.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibrahim.

¹²⁸ Wawancara dengan Ibrahim.

kampung, demikian pula aparat kepolisian dalam mewujudkan keamanan di kampung Tanjung Harapan. Sebagai akibat dari tindakan pembiaran-kalau tidak mau menyebutnya sebagai tindakan melindungi- terhadap pelaku-pelaku tindakan kriminal di kampung Tanjung Harapan, menjadikan maraknya tindakan kriminalitas.

Menurut penuturan Pak Ibrahim, pada tahun 2015, terjadi pembegalan kendaraan yang melewati kampung Tanjung Harapan sebanyak 41 TKP (tempat kejadian perkara). Banyak terjadi tindakan-tindakan kriminal, pencurian dan sebagainya, seperti pihak keluarga yang membunuh kedua pelaku pencurian sudah seringkali mengalami pencurian, sehingga puncak kekesalan mereka sampai menghabisi pelaku pencurian.¹²⁹ Demikian pula yang disampaikan Pak Anang, pihak keluarga pelaku pembunuhan terhadap kedua pelaku pencurian sudah seringkali mengalaminya, tidak kurang dari 7 kali.¹³⁰

Sejak sekitar 5 bulan diamanahi sebagai kepala kampung, Bapak Ibrahim berusaha berlaku adil, mengayomi semua warga, memberikan rasa aman bagi warganya, terbuka dalam hal pembangunan. Sejak ia menjabat kampung Tanjung Harapan relatif aman. Jika ada pencurian yang terjadi, maka tidak sampai 24 jam barang curian dikembalikan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada bulan Agustus 2016. Seorang warganya mengalami kehilangan sebuah televisi akibat pencurian. Maka ia bergerak cepat, berkoordinasi dengan pamong dan setelah diketahui pelakunya, maka ia meminta agar televisi yang dicuri segera dikembalikan. Alhamdulillah televisi yang

¹²⁹ Wawancara dengan Ibrahim.

¹³⁰ Wawancara dengan Anang.

dicuri tidak sampai 24 jam bisa ditemukan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pada Idul Fitri 2015 terjadi pembegalan kendaraan motor sebanyak 41 peristiwa, maka pada tahun 2016, setelah ia menjabat tidak ada peristiwa pembegalan.¹³¹

Ketika ditanyakan kepada Pak Ibrahim selaku kepala kampung Tanjung Harapan saat ini, apa yang menjadi kiat-kiat atau upaya-upaya yang dilakukan sehingga berhasil menekan tindakan kriminalitas, maka ia memberikan jawaban dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak muda serta bekerjasama dengan masyarakat. Bersama-sama menjaga keamanan, menggalakkan siskamling, kalau ada warga yang tidak dikenal ditanya, dalam hal ini saya tekankan tetap dilakukan dengan cara yang baik dan mengedepankan tata krama. Bahkan ia pun menegaskan, saat ini Tanjung Harapan saya jamin aman, melakukan perjalanan pada jam 02 atau 03 dini hari insya Allah aman.¹³²

Demikian pula yang disampaikan oleh Pak Anang dan Bu Asiyah, setelah kepala kampung dijabat oleh Pak Ibrahim, kampung Tanjung Harapan menjadi aman. Hanya pada bulan Agustus terjadi pencurian televisi dan berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan Pak Anang menyatakan, yang menjabat kepala kampung Tanjung Harapan selama ini, maka Pak Ibrahim adalah yang terbaik. Hanya saja ia menegaskan semoga ini bisa selamanya, tidak hanya di awal masa jabatan saja.¹³³

¹³¹ Wawancara dengan Ibrahim.

¹³² Wawancara dengan Ibrahim.

¹³³ Wawancara dengan Anang dan Asiyah.

Berkaitan dengan kerukunan warga kampung Tanjung Harapan, ditegaskan oleh Pak Anang selama ini sebenarnya rukun. Jika warga dusun 1 ada yang hajatan, atau pindahan rumah, maka kami warga dari dusun 2 datang dan membantu. Demikian pula sebaliknya, jika warga dusun 2 ada hajatan, atau pindahan rumah, maka warga dusun 1 datang dan membantu. Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa permasalahannya adalah tindakan kriminalitas. Pelaku-pelaku tindakan kriminalitas di kampung Tanjung Harapan adalah anak-anak muda, dengan mencuri ayam, beras, HP dan sebagainya, tapi sudah kebangetan karena sering dilakukan. Menurutnya, sebenarnya pelakunya adalah dari satu keluarga saja.¹³⁴

Demikian pula yang disampaikan oleh kepala kampung Pak Ibrahim, pada saat terjadi penyerangan massa dengan membakar rumah warga dusun 2, maka saat itu ia bolak-balik membantu warga dusun 2 mengungsi. Dengan menggunakan kendaraan motor, maka ia ikut berjibaku menyelamatkan dan mengungsikan warga dusun 2 ke tempat-tempat yang aman. Ketika ditanyakan, mengapa ia melakukan hal tersebut dan tidak khawatir kalau diserang oleh warga dusun 2, atau sebaliknya dianggap pengkhianat oleh warga dusun 1, maka ia menegaskan sama sekali tidak. Karena menurutnya ia tidak memiliki permasalahan dengan warga dusun 2.

C. Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu

Pada zaman dahulu Kampung Kuripan berasal dari sekala beghak Lampung Barat yang pindah melalui jalur

¹³⁴ Wawancara dengan Anang.

darat membuat kampung di utara kampung Kuripan Sekarang letaknya di wilayah Rugak nama Duyang. Pada tahun 1776 secara kelompok membuat kampung yang sekarang ini “Kuripan“. Di bawah pimpinan Batin Nata Yuda, beliau adalah moyang Abu Bakar, KSR. Kepala kampung sekarang, berlanjut antara 1883 diangkat pimpinan adat Sultan Nata Marga sampai dengan tahun 1935, dibentuk pesirah di bawah pimpinan Tuan Rajo Yang Menimbang, Beliau adalah orang tua Kepala Kampung sekarang. Kampung Kuripan merupakan salah satu dari 14 kampung dari wilayah Kecamatan Padang Ratu, yang terletak 3 km ke arah timur dari kota Kecamatan. Kampung Kuripan mempunyai wilayah seluas 1.257,75 hektar. Kampung Kuripan mempunyai jumlah penduduk 6.629 jiwa, yang tersebar dalam 8 dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kampung Kuripan

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
497	331	764	1.083

Kampung Kuripan merupakan kampung pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3. Mata Pencarian

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.281	89	29	2.294

Komposisi kependudukan masyarakat kampung Kuripan berdasarkan etnis atau suku adalah sebagai berikut: 80% Jawa, 15% Lampung, 5% Lainnya (Sunda, Bali, Batak dan lain-lain). Kampung Kuripan secara historis memiliki latar yang cukup menarik. Dalam hal ini, keberadaan masyarakat suku Jawa di kampung Kuripan adalah berdasarkan ajakan Tuan Rajo Yang Menimbang, orang tua Pak Abu Bakar sebagai Pesirah di wilayah tersebut. Menurut Pak Abu Bakar, keberadaan warga suku Jawa di kampung Kuripan atas ajakan dan undangan orang tua beliau. Orang tua beliau, Tuan Rajo Yang Menimbang, mengajak masyarakat suku Jawa dari Pringsewu, Kalirejo bahkan dari pulau Jawa untuk tinggal dan hidup bersama di kampung Kuripan. Maksud orang tua Pak Abu Bakar mengajak dan mengundang masyarakat suku Jawa untuk tinggal dan hidup bersama di kampung Kuripan adalah untuk sama-sama membangun dan meramaikan kampung Kuripan.

Tuan Rajo Yang Menimbang pada saat itu adalah tuan tanah, memiliki tanah dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan mengajak dan mengundang masyarakat suku Jawa ke kampung Kuripan, maka yang bersangkutan memberikan jatah tanah pekarangan dan peladangan untuk mereka. Demikian pula masyarakat suku Lampung, sebagai pribumi dan penduduk asli diberikan bagian tanah pekarangan dan peladangan. Setelah masyarakat suku Jawa dan suku Lampung diberikan jatah tanah pekarangan dan peladangan, menurut Pak Abu Bakar, tanah peninggalan orang tuanya masih banyak dan sangat luas, sampai dengan daerah Sidomulyo, Kalirejo. Akan tetapi tanah-tanah peninggalan orang tuanya yang sangat banyak itu saat ini sudah banyak yang ia jual. Ketika ditanyakan mengapa

tanah-tanah peninggalan orang tuanya banyak yang dijual, apakah karena terlalu luas sehingga tidak bisa diurus atau disebabkan hal lain, maka dengan tegas ia menyatakan karena butuh uang.¹³⁵ Demikian pula dinyatakan oleh kepala urusan (KAUR) Pemerintahan kampung Kuripan, bahwa jasa orang tua Pak Abu Bakar membawa masyarakat suku Jawa ke kampung ini, diberi tanah, dilindungi, ini yang diingat oleh masyarakat suku Jawa. Pak Abu Bakar sebagai anak keturunannya pun melakukan hal yang sama, bisa mengayomi, melindungi dan mewujudkan rasa aman.¹³⁶

Mengingat jasa orang tua Pak Abu Bakar, demikian juga kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Pak Abu Bakar, maka beliau menjabat kepala kampung Kuripan selama 33 tahun 3 bulan. Setiap pemilihan kepala kampung yang dilakukan, rata-rata tidak ada calon. Pernah ada yang mencalonkan, yang bersangkutan hanya mendapatkan suara sebanyak 200, sedangkan bapaknya 3.000 suara. Masyarakat kampung Kuripan masih menghendaki Pak Abu Bakar menjabat kepala kampung, akan tetapi karena terbenur peraturan, maka yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan dan tidak dapat dipilih sebagai kepala kampung.¹³⁷ Hal yang sama dinyatakan oleh kepala urusan pemerintah-yang merupakan suku Jawa-, bahwa masyarakat kampung Kuripan, terutama masyarakat Jawa, jika tidak terbentur peraturan masih menghendaki Pak Abu

¹³⁵ Wawancara dengan Pak Abu Bakar.

¹³⁶ Wawancara dengan KAUR Pemerintahan.

¹³⁷ Wawancara dengan pak Abdullah, kepala kampung Kuripan saat ini. Beliau adalah anak laki-laki tertua dari pak Abu Bakar.

Bakar sebagai kepala kampung.¹³⁸ Setelah Pak Abu Bakar tidak memungkinkan lagi untuk mencalonkan dan menjabat kepala kampung, maka masyarakat kampung Kuripan akhirnya meminta Pak Abdullah- sebagai anak laki-laki tertua Pak Abu Bakar- untuk mencalonkan dan menjabat kepala kampung. Pada saat pemilihan yang belum lama dilangsungkan, calon lain mendapat suara sekitar 300 suara, sementara Pak Abdullan sekitar 3.500 suara.¹³⁹

Masyarakat kampung Kuripan sangat beragam, bisa dikatakan sebagai kampung multi etnik. Masyarakat kampung Kuripan terdiri dari suku Lampung, Jawa, Sunda, Batak, dan Bali. Kampung Kuripan terdiri dari 8 dusun, dusun 1 saja yang suku pribumi Lampung, dusun-dusun lainnya mayoritas Jawa, sebagian ada Sunda, Batak dan Bali. Demikian pula dari sisi agama, mayoritas beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Sehingga tempat ibadah pun beragam, ada masjid, mushalla, gereja dan pura.¹⁴⁰

Keragaman masyarakat kampung Kuripan, baik dari segi etnik/suku, agama, tetap menjadikan masyarakat Kuripan bisa hidup berdampingan. Masyarakat suku Jawa, sebagaimana dituturkan oleh kepala urusan pemerintah yang nota bene suku Jawa, merasa aman dan nyaman. Beliau menyatakan bahwa masyarakat kampung Kuripan merasa terayomi dan terlindungi oleh kepala kampung. Selama tinggal di kampung Kuripan yang bersangkutan tidak pernah mengalami pencurian atau pembegalan. Masyarakat kampung Kuripan tidak pernah *diresehin* dari kampung lain, karena kepala kampung melindungi

¹³⁸ Wawancara dengan kepala urusan pemerintah.

¹³⁹ Wawancara dengan Abdullah.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Abdullah.

warganya dari gangguan tindakan-tindakan kriminal dari pelaku-pelaku kampung lain. Bahkan ketika terjadi konflik di Tanjung Harapan, masyarakat suku Jawa dilindungi dan diamankan oleh kepala kampung. Ia mengibaratkan, tidak ada satu batang singkong pun yang rubuh. Pengibaratannya seperti ini menurutnya sangking dilindunginya warga kampung Kuripan ketika terjadi konflik.¹⁴¹

Menurut kepala kampung Kuripan saat ini, Pak Abdullah, walaupun beragamnya suku dan agama masyarakat kampung Kuripan, tetapi saling menghargai. Semisal ia mencontohkan, di kampung Kuripan pernah diadakan Prasmanan Kilat para generasi mudah umat Hindu yang datang dari kurang lebih 20 kecamatan di Lampung Tengah, terutama Seputih Banyak dan Rumbia. Masyarakat dan aparat kampung Kuripan sepenuhnya mendukung kegiatan tersebut. Sebagai kepala kampung, ia hadir dan memberikan sambutan pada saat pembukaan dan penutupan.

Demikian pula yang dituturkan oleh Pak Anang, bahwa sesungguhnya kehidupan masyarakat kampung Kuripan hidup rukun. Jika masyarakat dusun 1 ada hajatan atau pindah rumah, masyarakat dari dusun 2 datang dan membantu, demikian pula sebaliknya.¹⁴² Pak Ibrahim, sebelum menjabat kepala kampung pun menyatakan bahwa ketika terjadi penyerangan di dusun 2, maka ia bolak-balik mengendarai motor ikut mengungsikan masyarakat suku Jawa ke tempat-tempat aman. Hal ini ia lakukan karena

¹⁴¹ Wawancara dengan kepala urusan pemerintah.

¹⁴² Wawancara dengan Anang.

menurutnya, antara dia dengan masyarakat dusun 2 yang nota bene mayoritas Jawa tidak ada masalah.¹⁴³

Lebih lanjut Pak Anang menuturkan, bahwa tindakan-tindakan kriminal berupa pencurian yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung terhadap masyarakat suku Jawa, sebenarnya pelakunya itu-itu saja dari satu keluarga. Objek pencurian di lingkungan kampung ini pun sebenarnya berupa ayam, beras, HP. Akan tetapi karena sering dilakukan, hal tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan di kampung Kuripan.¹⁴⁴

Walaupun kampung Kuripan terlihat cenderung aman, tidak ada permasalahan antara masyarakat suku Lampung dan suku Jawa. Namun jika dicermati masih terdapat ketidaknyamanan masyarakat suku Jawa akibat tindakan masyarakat suku Lampung. Hal ini sebagaimana terlontar oleh Pak Abu Bakar, tanah-tanah/sawah-sawah milik masyarakat suku Lampung mayoritas sudah dijual, menjadikan mereka ikut upahan/*derep* pada saat panen padi milik masyarakat suku Jawa. Ia menyatakan sering menimbulkan keributan, dikarenakan masyarakat suku Lampung dengan seenaknya memanen tanaman padi masyarakat suku Jawa tanpa pembicaraan/kesepakatan sebelumnya. Pemberitahuan yang dilakukan secara mendadak untuk memanem tanaman padi milik masyarakat suku Jawa tanpa persetujuan dari pemiliknya. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, masyarakat suku Lampung memberitahu akan memanen tanaman padi, sudah berada di lahan sawah, bahkan terkadang sudah

¹⁴³ Wawancara dengan Ibrahim.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Anang.

mulai memanen. Jika terjadi demikian, maka ia mengatakan kepada masyarakat suku Jawa, bahwa mereka datang ke kampung ini awalnya tidak memiliki tanah/sawah, maka seharusnya mereka memberikan izin kepada masyarakat suku Lampung untuk ikut upahan memanen/*derep*. Demikian pula ia mengatakan kepada masyarakat suku Lampung, seharusnya mereka tidak semena-mena memanen tanaman padi milik masyarakat suku Jawa. Karena tanah/sawah itu sudah menjadi milik mereka, sehingga seharusnya walaupun mau ikut upahan memanen/*derep* dengan persetujuan masyarakat suku Jawa sebagai pemilik lahan.¹⁴⁵ Demikian pula Pak Ibrahim menyatakan, bahwa di kampung Kuripan seringkali terjadi permasalahan dalam panen padi. Di mana masyarakat suku Lampung dengan semena-mena memanen padi di sawah milik masyarakat suku Jawa, tanpa persetujuan sebagaimana mestinya dari pemiliknya.¹⁴⁶

Selain persoalan panen-memanen tersebut, tidak kalah menjadi sumber permasalahan antara masyarakat suku Lampung dengan masyarakat suku Jawa di kampung Kuripan adalah masalah tanah. Masyarakat suku Lampung sebagai pribumi, suka buat *reseh*, tanah sudah dijual, diajakan dan dijual kembali kepada orang lain.¹⁴⁷ Demikian pula yang disampaikan oleh Pak Abu Bakar, bahwa seringkali masyarakat suku Lampung membuat ulah dalam hal tanah. Tanah sudah dijual, semisal 1 hektar, maka di kemudian hari diukur kembali, jika lebih dari 1 hektar,

¹⁴⁵ Wawancara dengan Abu Bakar.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ibrahim.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Abdullah.

maka diambil kembali atau diminta uang sebagai penggantinya.¹⁴⁸ Selain permasalahan tanah, juga menurut Pak Abdullah, masyarakat suku Lampung suka *reseh*, pinjam motor tidak dikembalikan.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Wawancara dengan Abu Bakar.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Abdullah.

BAB V

TELAAH KONFLIK SOSIAL DI LAMPUNG TENGAH

A. Identifikasi Akar Geneologi Konflik

Berdasarkan paparan data lapangan tersebut, maka konflik yang pernah terjadi di kampung Kusumadadi dan kampung Tanjung Harapan disebabkan tindakan menghakimi sendiri bahkan membunuh pelaku tindakan kriminal. Tindakan menghakimi sendiri, dengan membunuh pelaku tindakan kriminal dilakukan karena sudah terakumulasinya kekesalan atas tindakan kriminal yang seringkali dilakukan. Demikian pula, hal tersebut disebabkan karena tidak ditindak secara tegas oleh aparat kepolisian terhadap tindakan-tindakan kriminal yang terjadi.

a. Lemahnya Penegakan Hukum

Mencermati fakta di atas, maka akar permasalahan terjadinya konflik antar masyarakat di Lampung Tengah, dalam hal ini suku Lampung dengan suku Jawa adalah sebagai akibat akumulasi kekecewaan terhadap penegakan hukum atas tindakan-tindakan kriminal yang terjadi. Dalam hal ini, sebagian masyarakat suku Lampung, seringkali melakukan tindakan kriminal berupa pencurian, pemalakan, pembegalan dan sebagainya. Tindakan-tindakan kriminal yang sering dilakukan tanpa adanya tindakan tegas dari aparat keamanan. Kalaupun pelaku tindakan kriminal diserahkan/ditangkap oleh aparat

kepolisian, maka esok harinya yang bersangkutan sudah dilepaskan dan bebas berkeliaran tanpa adanya sanksi yang tegas. Tindakan yang cenderung membiarkan dan tidak menindak tegas pelaku-pelaku tindakan kriminal di Lampung Tengah, menjadikan para pelaku tidak jera, terus melakukannya. Tindakan kriminal yang dilakukan, bahkan cenderung semakin berani, semisal mengambil/memanen sawit/kelapa di kebun di siang hari. Terkadang dilakukan di hadapan pemilik kebun, ataupun jika kepergok pelaku akan mengancam dan menakuti pemilik dengan senjata tajam, bahkan menggunakan senjata api.

Sedangkan yang terjadi di kampung Tanjung Harapan, selain tidak tegasnya tindakan aparat kepolisian, juga tidak ada tindakan tegas dari kepala kampung,¹⁵⁰ bahkan cenderung berpihak dengan para pelaku. Kondisi seperti ini menjadikan masyarakat suku Jawa mengalami akumulasi kekecewaan, kekesalan dan berujung pada kemarahan dan amuk massa. Masyarakat suku Jawa, baik yang terjadi pada konflik di kampung Kusumadadi, maupun yang terjadi di kampung Tanjung Harapan menghakimi sendiri dengan menghabisi nyawa pelaku.

b. Konflik Destruktif

Memperhatikan konflik yang terjadi, berdasarkan sifatnya, masuk dalam kategori konflik destruktif. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.

¹⁵⁰ Kepala kampung sebelum dijabat oleh Ibrahim.

Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, maka termasuk dalam konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama.

c. Konflik Horizontal

Berdasarkan penyebab konflik yang terjadi adalah kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras. Dalam hal ini, masyarakat Lampung Tengah cukup majemuk. Majemuk berdasarkan suku dan agama. Lampung, demikian Lampung Tengah dikenal dengan miniatur Indonesia, hampir semua suku dan agama ditemukan.

d. Lemahnya Kepemimpinan

Secara umum penyebab konflik sebagaimana dikemukakan oleh Sukardi ada 7: konflik nilai, kurangnya komunikasi, kepemimpinan yang kurang efektif, ketidakcocokan peran, produktivitas rendah, perubahan keseimbangan, dan konflik atau masalah yang belum terselesaikan.¹⁵¹ Berdasarkan hal tersebut, maka konflik yang terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa di Lampung Tengah bisa dimasukkan dalam kategori kepemimpinan yang kurang efektif. Kepemimpinan dalam hal ini, yang terjadi pada aparat kepolisian. Dalam hal ini, aparat kepolisian tidak bisa mewujudkan kepemimpinan yang efektif dalam hal keamanan.

¹⁵¹ Sukardi, Penanganan Konflik, h. 82.

e. Rendahnya Produktivitas dan Penguasaan Tanah

Demikian pula, hal tersebut berkaitan dengan penyebab lainnya, yaitu produktivitas yang rendah. Sebagian besar, masyarakat suku Lampung secara kultur bisa dikategorikan bukan pekerja keras. Pemanfaatan tanah/sawah cenderung kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan pernyataan seorang tokoh agama di Kuripan, bahwa ia menjual seluruh tanah/sawah yang dimiliki, hanya tersisa pekarangan sebagai lokasi tempat tinggal/rumah. Secara tegas ia menyatakan alasan menjual tanah/sawah yang dimiliki, karena mengurus tanah/sawah dengan memproduksi baik sebagai lahan berkebun, bertanam palawija maupun padi merupakan pekerjaan yang susah dan tidak enak. Sementara di sisi lain, yang bersangkutan tidak memiliki keahlian di bidang usaha lain. Sehingga bisa dikatakan yang bersangkutan tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap dan jelas. Padahal, jika tanah/sawah yang dimilikinya dimanfaatkan secara maksimal, baik dengan berkebun, menanam palawija atau padi, maka dapat dijadikan sumber penghasilan yang jelas. Akan tetapi dalam hal ini ia lebih memilih untuk menjual seluruh tanah/sawah yang dimilikinya.

Hampir senada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Abu Bakar yang diwarisi sangat banyak tanah dan sawah oleh orang tuanya. Namun ia nyatakan sebagian besar tanah yang diwariskan oleh orang tuanya sudah dijual. Ketika ditanyakan apa alasan yang bersangkutan menjualnya, apakah dikarenakan terlalu luas sehingga kewalahan dalam mengurusnya. Ternyata jawaban yang dilontarkan adalah karena butuh uang. Lagi-lagi dalam hal ini, seharusnya dengan peninggalan tanah/sawah yang

sangat banyak dari orang tuanya dapat memproduktifkan dengan berkebun, menanam palawija atau padi. Dengan memproduktifkan tanah dan sawah yang dimilikinya, seharusnya bisa menghasilkan penghasilan yang sangat memadai dan tidak perlu menjual sebagian besar tanah dan sawah yang diwariskan oleh orang tuanya.

Walaupun tindakan sedemikian tidak dilakukan oleh semua masyarakat suku Lampung. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Ibrahim, sampai hari ini menurutnya belum ada tanah/sawah peninggalan orang tuanya yang dijual. Walaupun ia belum menambah lahan berupa tanah/sawah berupa pembelian yang ia lakukan, namun yang bersangkutan dapat mempertahankan tanah/sawah yang diwariskan oleh orang tuanya. Peninggalan tanah/sawah orang tuanya cukup banyak dan ia bisa memanfaatkan dan memproduktifkannya. Selain Pak Ibrahim, di kampung Tanjung Harapan juga Pak Arifin merupakan suku Lampung yang bisa tetap mempertahankan tanah/sawah peninggalan orang tuanya. Namun mayoritas masyarakat suku Lampung yang berada di kampung Tanjung Harapan, sebagaimana dinyatakan oleh Pak Ibrahim rata-rata tanah/sawah yang mereka miliki sudah dijual dan berpindah tangan ke masyarakat suku Jawa. Demikian juga yang terjadi di kampung Kuripan, menurut Pak Abu Bakar, kebanyakan tanah/sawah masyarakat suku Lampung sudah dijual.

f. Tuntutan Upacara Adat

Kecenderungan masyarakat suku Lampung yang tidak tekun dalam mengurus dan mengelola tanah/sawah, demikian pula kebutuhan-kebutuhan dalam

kegiatan/prosesi adat, seperti marhaban, anak sunat (diistilahkan dengan *turun mandei*), pernikahan anak. Kegiatan-kegiatan tersebut dikaitkan dengan prosesi adat, maka membutuhkan dana yang cukup besar. Terlebih lagi bagi yang memiliki keinginan untuk *begawi cakak pepadun*-prosesi puncak dalam adat Lampung- untuk meraih gelar *setan*, membutuhkan dana puluhan juta. Bagi masyarakat suku Lampung yang telah melakukan *begawi cakak pepadun*, merupakan sebuah prestise bagi diri dan keluarga dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam rangka meraih dan mewujudkan hal tersebut, sebagai harga diri dan keluarga, menjadikan sebagian masyarakat suku Lampung memaksakan diri. Dinyatakan sebagai tindakan yang memaksakan diri, di mana secara ekonomi tidak/belum memungkinkan, namun semata-mata prestise dan harga diri tersebut nekat melakukannya. Tindakan tanpa perhitungan yang matang, menjadikan masyarakat suku Lampung yang sedemikian tidak segan-segan menjual tanah, sawah, atau bahkan rumah yang ditempati.

g. Pergeseran Penguasaan Sumber Daya

Di sisi lain, keuletan masyarakat suku Jawa, kesungguhan dalam bekerja, kesanggupan hidup prihatin, menjadikan mereka yang semula menjadi penggarap tanah/sawah milik masyarakat suku Lampung, lambat laun mereka memiliki tanah, sawah, dan cenderung bertambah. Bahkan bukan mustahil, masyarakat suku Lampung yang semula memiliki tanah, sawah banyak, mempekerjakan masyarakat suku Jawa, kemudian berbalik menjadi pekerja di tanah/sawah milik masyarakat suku Jawa.

Kondisi yang kontras tersebut, serta ketimpangan penguasaan sumber daya berupa tanah/sawah seringkali

menjadi pemicu terjadinya konflik. Hal ini yang disebut oleh M. Ato Mudzhar sebagai klaim terhadap sumber daya.¹⁵² Klaim terhadap sumber daya berupa tanah/sawah yang sedemikian seringkali dijumpai antara masyarakat suku Lampung dan masyarakat suku Jawa. Pertentangan, perselisihan, berkaitan dengan sumber daya berupa tanah/sawah ini sering terjadi, terutama di kampung Tanjung Harapan dan Kuripan. Sebagaimana digambarkan oleh Lewis A. Coser perselisihan mengenai sumber-sumber kekayaan.

Walaupun terjadinya pertentangan, perselisihan berkaitan dengan klaim sumber daya berupa tanah/sawah, namun tidak sampai memuncak terjadinya konflik massa atau penyerangan dan sebagainya. Pertentangan, perselisihan yang berkaitan dengan sumber daya berupa tanah/sawah cenderung bisa diselesaikan, tanpa terjadinya konflik massa atau penyerangan satu kelompok terhadap kelompok lain. Perselisihan, pertentangan yang disebabkan klaim sumber daya berupa tanah/sawah yang tidak meluas menjadi konflik massa/sosial, sebagaimana kualifikasi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012. Dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa:

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

¹⁵² M. Ato Mudzhar, *Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik sosial Bernuansa Agama*, dalam Moh. Soleh Isre, (ed), *Konflik Etno Religius*, h. 2

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.¹⁵³

Maka berdasarkan kualifikasi tersebut, perselisihan, pertentangan yang disebabkan klaim sumber daya berupa tanah/sawah tidak dikategorikan sebagai konflik. Perselisihan, pertentangan yang disebabkan klaim sumber daya berupa tanah/sawah tidak memuncak sampai terjadinya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok.

h. Peredaran Narkoba

Maraknya tindakan kriminal 2-3 tahun terakhir, disinyalir menurut kepala kampung Tanjung Harapan disebabkan banyaknya pengguna narkoba. Ia meyakini hal tersebut dengan mengilustrasikan, jika tindakan kriminal hanya dilatarbelakangi masalah ekonomi, kebutuhan hidup, maka tidak semarak yang terjadi belakangan ini. Maka ia bisa memastikan bahwa maraknya tindakan-tindakan kriminal disebabkan maraknya pengguna narkoba terutama di kalangan generasi muda.¹⁵⁴ Pak Anang pun menyatakan bahwa saat ini banyak generasi muda yang menggunakan narkoba.¹⁵⁵

Demikian pula yang dinyatakan oleh kepala kampung Kusumadadi, bahwa saat ini marak di kalangan generasi muda pengguna narkoba. Maraknya pengguna narkoba menyebabkan meningkatnya tindakan-tindakan

¹⁵³ Pasal 1, poin a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ibrahim.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Anang.

kriminal.¹⁵⁶ Ditegaskan pula oleh Pak Mujibullah, fenomena maraknya pengguna narkoba di kabupaten Lampung Tengah berakibat meningkatnya kriminalitas 2-3 tahun belakangan ini. Baru-baru ini termasuk pengedar besar ditangkap oleh aparat kepolisian.¹⁵⁷

i. Akar Utama Konflik Sosial

Berdasarkan fakta yang terjadi, baik konflik yang terjadi di kampung Kusumadadi maupun kampung Kuripan disebabkan tindakan menghakimi sendiri atau menghabiskan nyawa pelaku tindakan kriminal yang selama ini tidak tersentuh hukum atau tidak mendapat tindakan tegas dari aparat keamanan (kepolisian). Mencermati hal tersebut, terjadinya konflik disebabkan akumulasi kekecewaan terhadap aparat kepolisian dalam penanganan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi, belum dimasukkan sebagai salah satu penyebab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut, bahwa sumber konflik adalah:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha;

¹⁵⁶ Wawancara dengan Sarikun.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Mujibullah.

- e. atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.¹⁵⁸

B. Penegakan Hukum sebagai Solusi

Kondisi yang sedemikian, seharusnya menjadi catatan penting bagi aparat kepolisian dalam mewujudkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Aparat kepolisian seharusnya mampu menindak secara tegas setiap tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di wilayah kabupaten Lampung Tengah. Kekecewaan seperti yang disampaikan oleh Pak Sarikun, bahwa aparat kepolisian tidak cepat bertindak jika dilaporkan adanya tindakan kriminal. Walaupun pelaku tindakan kriminal ditangkap atau diserahkan oleh masyarakat, maka esok harinya yang bersangkutan sudah dilepas dan dibebaskan tanpa adanya sanksi yang tegas.¹⁵⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Pak Mujibullah, suatu hal yang ironis, jika tindakan-tindakan kriminal yang terjadi cenderung dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas oleh aparat kepolisian. Kecepatan terjadinya pembegalan, pemalakan, pencurian, bahkan terkadang dilakukan secara terang-terangan di siang hari, bahkan terkadang di hadapan pemiliknya, tanpa adanya tindakan tegas aparat kepolisian menimbulkan akumulasi kekecewaan masyarakat suku Jawa yang cenderung menjadi korban.

Manakala pemerintah, dalam hal ini tidak mampu hadir terhadap persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, maka tindakan main hakim sendiri itulah yang terjadi.

¹⁵⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Sarikun.

Tindakan menghabisi nyawa seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian sapi, akibat akumulasi kekecewaan masyarakat suku Jawa di satu sisi, sementara tidak menerimanya pihak keluarga korban yang meluas melalui solidaritas masyarakat suku Lampung, menyebabkan terjadinya konflik berupa penyerangan dengan membakar rumah. Demikian pula dibunuhnya dua orang pelaku pencurian yang kemudian ditenggelamkan oleh ketiga pelaku pembunuhan di dalam kali sebagai dampak kekecewaan terhadap penegakan hukum oleh aparat kepolisian, sehingga berujung pada kekesalan dan menghabisi pelaku tindak pencurian. Sementara di sisi lain muncul kemarahan sebagai sikap tidak menerima adanya pihak keluarga yang dibunuh tersebut, setelah terbongkar dan diketahui tindakan menghabisi nyawa tersebut. Kemarahan dan tidak menerimanya pihak keluarga dan ditambah dengan masyarakat suku Lampung lainnya sebagai wujud solidaritas kesukuan, menyebabkan mereka melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Jawa di dusun 2 kampung Tanjung Harapan. Kemudian dilakukan serangan balasan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa yang berdatangan dari kampung-kampung lain.

C. Menguatnya Solidaritas Internal

Konflik yang terjadi antara masyarakat suku Lampung dan Jawa ini disebut sebagai konflik horizontal, yaitu konflik yang berkembang di antara anggota kelompok yang berhubungan antara suku. Munculnya solidaritas kelompok didasarkan kesukuan, antara masyarakat suku Lampung dan masyarakat suku Jawa sebagaimana proposisi yang dikemukakan oleh Lewis A.

Coser, “kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar semakin bertambah. Konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal. Konflik dengan sebuah kelompok membantu menghasilkan kohesi karena ada serangkaian aliansi dengan kelompok-kelompok lain.¹⁶⁴ Demikian juga yang dikemukakan oleh George Simmel, solidaritas dan integrasi kelompok dalam semakin bertambah tinggi jika konflik dengan pihak luar makin bertambah. Sebab ketegangan atau konflik dengan pihak luar akan meningkatkan dan mempertahankan solidaritas.¹⁶⁵

Semakin menguatnya solidaritas internal dan integrasi kelompok (*in group*), terjadi pada masyarakat suku Jawa. Terbentuknya Paguyuban Masyarakat Bersatu (Pambers), sebagai upaya masyarakat suku Jawa mengantisipasi dan mengatasi tindakan-tindakan kriminal ataupun tindakan semena-mena yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung. Pambers, pertama kali terbentuk di kampung Jayasakti sekitar tahun 2010. Tindakan-tindakan kriminal atau semena-mena yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung seringkali dialami oleh masyarakat suku Jawa di Jayasakti, seperti pencurian motor, sawit, hewan ternak, lebaran minta THR. Sementara aparat kepolisian seakan tidak berdaya atau tidak mau memberantas dan melakukan tindakan tegas, pada akhirnya membuat beberapa tokoh di kampung Jayasakti bersepakat untuk membentuk Pambers.

¹⁶⁴ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung ...*, h. 210.

¹⁶⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi,*, h. 200.

Masyarakat suku Jawa di kampung Kusumadadi bergabung dengan Pambers dilakukan setelah terjadinya penyerangan yang dilakukan masyarakat suku Lampung dari Buyut dan dibantu dari kampung-kampung lainnya pada tahun 2011. Diinisiasi oleh Pak Mujibullah bersama beberapa tokoh masyarakat kampung Kusumadadi menemui ketua ataupun pengurus pusat yang berada di kampung Jayasakti. Pak Mujibullah menyatakan, sama halnya dengan kampung Kusumadadi, kampung-kampung lain yang bergabung dengan Pambers rata-rata adalah yang pernah mengalami konflik dengan masyarakat suku Lampung.¹⁶⁶ Pernyataan ini menguatkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser dan George Simmel, bahwa penguatan persatuan sebuah kelompok (*in group*) manakala kelompok tersebut mengalami konflik dengan kelompok lain.

Sebelum bergabung dengan Pambers, menurut Pak Mujibullah masyarakat suku Jawa kurang bersatu, tidak peduli dengan peristiwa orang lain, cenderung cari aman dan selamat masing-masing. Kondisi yang sedemikian menjadikan masyarakat suku Jawa seakan tidak berdaya menghadapi tindakan kriminal atau tindakan-tindakan semena-mena lainnya, seperti pemalakan, minta THR dan sebagainya. Aparat kepolisian yang seharusnya mampu memberikan perlindungan dan keamanan kepada mereka tidak sesuai harapan. Aparat kepolisian pun cenderung membiarkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap hal-hal tersebut.¹⁶⁷ Kondisi sedemikian selaras

¹⁶⁶ Wawancara dengan Mujibullah.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Mujibullah.

dengan yang dikemukakan Lewis A. Coser, bahwa dinamika kehidupan sebuah kelompok merapuh solidaritas sesama secara internal jika tidak ada konflik dengan kelompok lain. Dalam mewujudkan penguatan solidaritas dan soliditas sebuah kelompok akibat konflik yang terjadi dengan kelompok lain, disebutkan oleh Lewis Coser sebagai dampak positif terjadinya konflik. Dalam masyarakat tertentu secara internal bisa menampakkan kecenderungan disintegrasi, namun konflik dengan masyarakat lain dapat memulihkan integrasi internal tersebut.¹⁶⁸ Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

Keberadaan Pangers menumbuhkan solidaritas dan soliditas masyarakat suku Jawa, jika terjadi tindakan kriminal ataupun tindakan semena-mena seperti pemalakan, pembegalan, maka dalam hitungan menit masyarakat suku Jawa bisa berdatangan dan berkumpul dalam jumlah yang besar. Dengan fasilitas media komunikasi berupa handphone (hp), maka informasi tersebar dengan sangat cepat. Keberadaan Pangers menumbuhkan kepercayaan diri kelompok masyarakat suku Jawa. Semisal, ada masyarakat suku Lampung yang mencuri buah kelapa milik masyarakat suku Jawa dengan terang-terangan, di waktu siang hari, dengan membawa kendaraan untuk mengangkutnya, maka keluarga pemilik pohon kelapa melakukan perlawanan, dan pelakupun kabur. Kejadian sedemikian, sebelum terbentuknya Pangers, nyaris dibiarkan oleh pemiliknya karena takut

¹⁶⁸ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung ...*, h. 210.

kepada pelaku. Namun setelah ada Pambers muncul keberanian bagi masyarakat suku Jawa.

Peristiwa di Sukajawa, ada masyarakat suku Jawa yang dibegal (kebetulan pengurus Pambers) oleh masyarakat suku Lampung dari kampung Gunung Sugih, maka dengan cepat masyarakat suku Jawa berdatangan dan berkumpul dalam jumlah yang banyak. Berkumpul dan hadir dalam jumlah yang banyak, hanyalah untuk menunjukkan kekuatan bukan untuk melakukan penyerangan. Maka ketika pelaku sudah ditangkap, diproses secara hukum dan kendaraan motor akan kembali kepada pemiliknya, dengan sendirinya masyarakat suku Jawa kembali pulang ke kampung masing-masing.

Aksi masyarakat suku Jawa dalam menciptakan keamanan di Wates. Menurut Pak Mujibullah, selama ini masyarakat suku Jawa jika melewati dengan kendaraan perempatan Wates maka akan dipalak/diminta uang, jika menjemput saudaranya di Wates pun diminta uang. Maka masyarakat suku Jawa sepakat melakukan ronda pada saat lebaran, di mana intensitas dan jumlah penumpang ataupun masyarakat yang melintasi dan datang ke perempatan Wates meningkat. Melalui pos-pos keamanan yang mereka adakan pada titik-titik yang rawan, termasuk di perempatan Wates, menjadikan Wates dan sekitarnya menjadi aman.

D. Dampak Solidaritas Sosial

Keberadaan Pambers telah mampu mewujudkan keamanan dan menekan tindakan kriminal, sehingga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat suku Jawa.

Keberadaan Pambers menjadikan mereka lebih percaya diri, bisa melidungi kelompok mereka dari gangguan maupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok lain dalam hal ini adalah masyarakat suku Lampung. Terwujudnya Pambers satu bentuk *self depend/self help*; mampu mengatasi sebagai cara yang efektif, pengorganisasian sendiri sebagai kekuatan sipil, menjadi daya tangkal yang tangguh. Dengan sendirinya pelaku kriminal berpikir untuk berbuat kembali. Positif membentuk keseimbangan (*equilibrium*)/*bargaining position*.

Dampak positif yang dirasakan dengan kehadiran dan keberadaan Pambers, bisa jadi merupakan yang disebut oleh Lewis A. Coser sebagai 'katup penyelamat'. Katup penyelamat (*safety valve*). Kelompok-kelompok yang bertikai karena suatu sebab, pasti akan saling berusaha untuk meluapkan rasa permusuhannya pada kelompok bersangkutan. Untuk mencegah hal tersebut, Coser kemudian menjelaskan suatu mekanisme yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial tersebut, yaitu dengan menggunakan katup penyelamat. Katup penyelamat dapat diartikan sebagai jalan keluar meredakan permusuhan, atau dapat kita sebut dengan mediator. Dengan adanya katup penyelamat tersebut, kelompok-kelompok bertikai dapat mengungkapkan penyebab dari munculnya konflik tersebut.

Berdasarkan *social function* Lewis Coser, konflik pada saat yang sama menemukan jalan keluar/solusinya. Konflik itu adalah proses sosial yang cepat atau lambat membawa kebaikan di masa depan, menuju integrasi sosial harus ada konflik. Dari konflik menghasilkan formula sendiri, contoh adanya paguyuban.

Pambers selain mewujudkan peningkatan *bargaining position* masyarakat suku Jawa dengan masyarakat suku Lampung, karena menumbuhkan dan memperkuat solidaritas serta soliditas. Keberadaan Pambers juga meningkatkan *bargaining* masyarakat suku Jawa dengan aparat kepolisian. Aparat kepolisian yang selama ini cenderung membiarkan, tidak melakukan penindakan secara tegas terhadap tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan masyarakat suku Lampung terhadap masyarakat suku Jawa, walaupun ada pelaku yang diserahkan, keesokan harinya atau hari itu juga akan dibebaskan tanpa diproses secara hukum. Maka keberadaan Pambers cenderung cepat merespon dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum terhadap tindakan-tindakan kriminal yang terjadi pada masyarakat suku Jawa yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung. Sebagaimana ditegaskan oleh Pak Sarikun, jangan salahkan kami jika aparat kepolisian dilaporkan peristiwa tindakan kriminal tidak segera merespon dan bertindak, maka kami yang bertindak. Anggota Pambers dalam hitungan menit akan cepat berdatangan dan menyelesaikan dengan caranya, jika aparat kepolisian tidak merespon dan bertindak cepat.¹⁶⁹ Demikian pula yang dinyatakan oleh Pak Mujibullah, jangan salahkan masyarakat yang bergerak dan bertindak dengan caranya sendiri, jika aparat kepolisian tidak merespon dan melakukan tindakan secara tegas terhadap pelaku-pelaku kriminal.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Wawancara dengan Sarikun.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Mujibullah.

Keberadaan Pangers yang sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat suku Jawa yang selama ini cenderung mendapatkan perlakuan yang tidak wajar/tindakan semena-mena ataupun tindakan kriminal, menumbuhkan solidaritas dan soliditas, namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi pemicu terjadinya konflik yang besar. Walaupun disampaikan oleh Pak Mujibullah, bahwa keberadaan Pangers adalah untuk membantu pemerintah. Kami hanya menghendaki terwujudnya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Aparat kepolisian seharusnya bisa mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kriminal dan pembuat keonaran. Jika ada tindakan kriminal, maka kami serahkan kepada aparat kepolisian, tidak main hakim sendiri, dengan catatan ditindak secara tegas dan diproses secara hukum sebagaimana mestinya. Bahkan jika ada anggota Pangers yang melakukan tindakan kriminal atau keonaran, maka akan kami serahkan kepada aparat kepolisian, tidak akan dibela. Informasi yang masuk kepada kami, para anggota Pangers, tidak dengan serta merta direspon. Akan tetapi dilakukan *cross check* bagaimana kejadian yang sesungguhnya, dengan mengirimkan utusan yang melakukan investigasi ke lapangan.

E. Potensi Negatif Solidaritas Sosial

Namun di sisi lain, keberadaan Pangers bisa menimbulkan mala petaka yang lebih besar dan hebat. Solidaritas dan soliditas yang telah terbangun pada masyarakat suku Jawa, sehingga muncul keberanian untuk melawan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung, demikian pula keberanian

untuk melakukan penyerangan akan sangat berbahaya. Solidaritas dan soliditas masyarakat suku Jawa melalui Pambers sebagai sebuah komunal atau kelompok masyarakat, jika berhadap-hadapan dengan kelompok masyarakat suku Lampung, yang pasti tidak akan mundur atau surut jika diserang, mengingat mereka adalah warga pribumi, tidak akan kabur atau mengungsi, maka akan terjadi konflik yang besar antara dua kelompok ini. Saling serang, pertikaian yang sengit dengan berbagai senjata yang dibawa, pasti akan menimbulkan korban yang sangat banyak.

Kekhawatiran akan terjadi konflik yang besar, jika Pambers cenderung arogan, selalu mengedepankan penyelesaian secara massal, juga diharapkan oleh masyarakat suku Jawa yang berada di kampung Tanjung Harapan Pak Anang dan bu Asiyah. Bahkan mereka cenderung kurang setuju dengan keberadaan Pambers. Ketidaksetujuan ini bukanlah tanpa alasan, mengingat keberadaan mereka di kampung Tanjung Harapan yang berada di dusun 2 berhadapan dan dekat dengan dusun 1 yang warga masyarakatnya adalah suku Lampung. Mereka lebih menginginkan terwujudnya keamanan dan kenyamanan tanpa melakukan kekerasan, penyerangan, amuk massa dan sebagainya. Mereka berdua pun termasuk yang menyesalkan dan menyayangkan dibunuhnya dua orang pelaku pencurian di kampung mereka yang menyebabkan penyerangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Lampung terhadap mereka. Menurut mereka jika kedua pelaku pencurian tidak dihabisi nyawanya atau dibunuh, pasti ceritanya berbeda tidak terjadi penyerangan. Lebih lanjut mereka menyatakan, bahwa

mereka termasuk yang terkena getahnya akibat dibunuhnya kedua pelaku pencurian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka bagi masyarakat suku Jawa, utamanya yang tergabung dalam Pangers hendaknya jangan bertindak gegabah, dengan mudah melakukan penyerangan. Pelaku-pelaku kriminal, hendaknya tidak dihakimi sendiri apalagi sampai dibunuh karena akan menyulut kemarahan dan amuk massa masyarakat suku Lampung yang nota bene adalah warga pribumi. Tindakan menghakimi sendiri, apalagi sampai membunuh pelaku-pelaku tindakan kriminal, amuk massa atau penyerangan hanya akan menimbulkan amuk massa dan penyerangan dari masyarakat suku Lampung. Bagi masyarakat suku Lampung pun hendaknya mencermati fenomena ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, tindakan semena-mena kepada masyarakat suku Jawa, karena akan memicu terjadinya konflik yang besar.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat diformulasikan kesimpulan, bahwa akar permasalahan konflik yang terjadi di Lampung Tengah adalah tindakan kriminalitas yang tidak ditindak tegas oleh aparat hukum. Konflik yang terjadi bukan dikarenakan kebencian, tidak menerima suku pendatang (Jawa). Akan tetapi lebih dikarenakan akumulasi kekecewaan atas pembiaran dan tidak ditindak secara tegas pelaku-pelaku kriminalitas, menjadikan masyarakat suku Jawa menghakimi sendiri bahkan menghabisi nyawa pelaku yang menyulut kemarahan dan penyerangan oleh masyarakat suku Lampung.

Seiring dengan tindakan-tindakan kriminalitas yang tidak ditindak secara hukum, kemudian menimbulkan konflik masyarakat suku Lampung dengan masyarakat suku Jawa, mendorong munculnya Paguyuban Masyarakat Bersatu (PAMBERS). PAMBERS merupakan paguyuban masyarakat suku Jawa untuk mewujudkan soliditas dan kekuatan bagi masyarakat suku Jawa. Berdasarkan *social function* Lewis Croser, konflik pada saat yang sama menemukan jalan keluar/solusinya. Konflik itu adalah proses sosial yang cepat atau lambat membawa kebaikan di masa depan, menuju integrasi sosial harus ada konflik. Dari konflik menghasilkan formula sendiri, contoh adanya

paguyuban. Namun keberadaan paguyuban, bisa meredam dan menghindari terjadinya konflik, namun di sisi lain bisa menimbulkan konflik yang lebih besar antara masyarakat suku Lampung dengan masyarakat suku Jawa.

B. Rekomendasi

Untuk menghindari tindakan menghakimi sendiri, yang memicu penyerangan, amuk massa, maka pelaku tindak kriminalitas harus ditindak secara tegas. Aparat kepolisian harus menegakkan hukum secara berkeadilan, menindak tegas para pelaku tindakan-tindakan kriminalitas. Fungsi negara, dalam hal ini aparat keamanan harus hadir. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka keamanan, kenyamanan, hidup rukun dan harmoni masyarakat suku Lampung dengan masyarakat suku Jawa pasti dapat terwujud.

Keberadaan paguyuban perlu dikontrol, dalam artian harus bertindak dalam koridor, tidak menghakimi sendiri. Jika keberadaan paguyuban tetap berada dalam koridor, mewujudkan soliditas, posisi tawar, maka berdampak positif dalam menghindari terjadinya konflik. Namun sebaliknya, jika bertindak di luar koridor, menghakimi sendiri, muncul arogansi, maka konflik yang lebih besar akan terjadi.

Penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah. Program-program yang perlu dilakukan adalah program yang mengakar, dalam artian dibutuhkan dan sesuai keinginan masyarakat. Pendidikan perlu diperhatikan, terutama pendidikan agama. Tingkat kepatuhan keagamaan relatif rendah. Generasi muda perlu diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif.

Demikian pula maraknya tindakan kriminalitas yang disinyalir disebabkan pengaruh narkoba, kebutuhan untuk mendapatkan dan membeli narkoba, maka aparat kepolisian demikian pula Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menindak secara tegas baik pemakai, apalagi pengedar. Maraknya penggunaan narkoba, terutama oleh generasi muda sangat berbahaya, selain meningkatkan tindakan kriminalitas, juga merusak masa depan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mul Khan dkk. *Membongkar Praktik Kekerasan Mengagas Kultur Nir Kekerasan*, Yogyakarta: Sinergi Press, 2002.
- Ahimsa-Putra, Heddi Shri, *Makalah Short Course Sosial Keagamaan, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan*, Yogyakarta: CRCS, 2012.
- Ahmad Najib Burhani, *Islam Dinamis: Menggugat Peran Agama Membongkar Doktrin yang Membantu*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Ali, M. Sayuthi, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ariestha, Bethra, *Akar Konflik Kerusakan Antar Etnik Di Lampung Selatan (Studi Pada Kerusakan Antar Etnik Lampung dan Etnik Bali di Lampung Selatan)*. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, Cambridge, England: Cambridge University Press, 2004.
- Dahrendrof, Ralf, *Class and Class Conflict in Industrial society*, California: Standford University Press, 1956.

- Dany Haryanto, S.S and G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, Jakarta : Prestasi Pustakarya, 2011.
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung: Refika Aditama,2009.
- Doyle Paul Johnson , *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern (terjemahan)*, Robert M.Z. Lawang, Jilid 2; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (terjemahan)*, Jakarta: Kreasi Kencana, 2011.
- Ghazali, Abd Moqsith dan Rasyad, Mustafa Basyir, *Islam Pribumi: Mencari Model Keberislaman ala Indonesia*”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed.) *Menjadi Indonesia: 13 abad Eksistensi Islam di Nusantara*, Mizan: Bandung, 2006.
- Giddens, Anthony, *Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati, 2003.
- Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Haryatmoko, *Etika Politik Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.

- Humaedi, M. Alie. *Konflik Komunal Lampung-Bali: Anatomi dan Pemicu Konflik*. Laporan Penelitian. Jakarta: LIPI, 2013.
- I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Kartodirjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara" dalam *Koentjaraningrat* (ed), *Metode Penelitian Masyarakat*. cet. II. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002.
- Kymlicka, W, *Multicultural Citizenship: Liberal theory of Minority Rights*, Oxford: Clarendon Press, 1995.
- Lecey, Hoda, *How to Resolve Conflict in The Work Place*, terj. Bern. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2000.
- Mariam Liebmann, "Restorative Justice: How it Works", London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Moeslim Abdurrahman, *Islam sebagai Kritik Sosial*, Penerbit Erlangga: Jakarta 2003.

- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Morton Deutsch dalam Hugh F Halverstadt, *Conflict: Productive and Destructive* "Mengelola Konflik Gereja", Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Mudzhar, M. Atho, *Pluralisme, Pandangan Ideologis, dan Konflik sosial Bernuansa Agama*, dalam Moh. Soleh Isre, (ed), *Konflik Etno Religious*.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Parekh, B, *Rethinking Multiculturalism: Cultural diversity and Political Theory*, MacMillan: Press Ltd, 2000.
- Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pruitt, Dean G & Jeffrey, Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ritzer, George & Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Pustaka Media, 2003.
- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Sadewo, Putut Ary, *Dinamika Konflik Agraria dalam kehidupan sosial Masyarakat Sendangayu dan Surabaya Kecamatan Padangratu*, Tesis Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2014.
- Salmi, Jamil, *Violence and Democratic Society*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Soerjono Soekanto, *George Simmel: Beberapa Teori Sosiologis*, Jakarta: Rajawali, 1986.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suseno, Frans Magnis, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: PP Kesehatan Remaja Muhammadiyah, 2005.
- Sutopo, Heribertus, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*, Surakarta: Puslit UMS, 1988.
- Tadjoedin, Mohammad zulfan, *Anatomi Kekerasan Sosial di Indonesia: Kasus Indonesia 1999-2001*, Jakarta: UNSFIR, 2002.
- Titchen, Angie & Hobson, Dawn, *Reserch Methods in the Social Sciences*, London: SAGE Publications Ltd, 2005.
- Utsman, Sabian, *Anatomi Konflik & Solidaritas: Masyarakat Nelayan sebuah Penelitian Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Yeoh, Brenda SA, *Migration and Social Diversity in Singapore*, in *Singapore Perspectives*, edited by T.H. Tan, Singapore: World Scientific Publishing, 2007.
- Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya: LPAM, 2002.

Makalah/jurnal:

- Eka Hendry Ar., dkk, *Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnik*, "Walisongo", Volume 21, Nomor 1, Mei 2013.

Humaedi, M. Alie, *Kegagalan Akulturasi Budaya Dan Isu Agama Dalam Konflik Lampung*, Jurnal "Analisa" Volume 21 Nomor 02 Desember 2014.

Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal "Hukum & Pembangunan" Tahun Ke-46 No. 1, Januari - Maret 2016.

Sukardi, *Penerapan Konsep Restorative Justice dalam hukum Pidana*, "Jurnal hukum Univertistas Yapis Jayapura", Vol. 2 Nomor 1, Mei 2012.

Koran/Internat:

<http://www.pojoksamber.com/komunitas-sekelik-sedulur-sebuah-ikhtiar-membangun-persaudaraan/> diunduh 21 Februari 2016.

<http://www.radarlamteng.co/?p=516> diunduh 21 Februari 2016

<http://perilakuorganisasi.com/georg-simmel-masyarakat-sebagai-interaksi.html>, Ferry Roen, 8 Oktober 2016.

<https://nasional.tempo.co/read/news/2011/08/05/179350258/8-kesepakatan-atasi-konflik-dipasena>, diunduh 3 November 2016.

<http://kamusbahasainggris.org>, diunduh pada 21 November 2016.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integrasi>, diunduh pada 21 November 2016.

Kompas, *Bentrok Warga di Lampung Tengah 30 Rumah Dibakar*, 21 Februari 2016.

Lampung Post, *Anang Prihantoro Hadiri Dialog Kebudayaan Dan Pentas Seni*, 21 Februari 2016.

Tempo, *Pasca Bentrok, Lampung Tengah Masih Mencekam*, 28 November 2014.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA KAMPUNG KUSUMADADI BEKRI 1

PN:

Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala Kampung Kusumadadi?

IF:

Menjabat sudah 3 tahun.

PN:

Apa benar bahwa kampung Kusumadadi pernah konflik dengan Desa Buyut? Kapan hal itu terjadi?

IF:

Kampung Kusumadadi pernah konflik dengan desa Buyut, terjadi pada tahun 2011.

PN:

Apa tujuan didirikan Paguyuban? Siapa ketua paguyuban di kampung ini?

IF:

Paguyuban, tujuannya untuk mengamankan. Ketua paguyuban Pak Mujibullah. Pamong sampai dengan RT dilibatkan dalam paguyuban. Ini muncul dalam rangka mengamankan, karena selama ini selalu terjadi kriminalitas. Setelah ada paguyuban maka siapapun pelaku kriminalitas maka diamankan, dan polisi cepat turun. Setelah ada paguyuban cepat menyebar, kejadian di sini dari Pringsewu sudah meluncur. Paguyuban saat ini siaga, mengamankan, karena aparat tidak mampu kalau tidak dibantu masyarakat. Pada saat lebaran, paguyuban membuat pos-pos keamanan. Paguyuban ini terbuka untuk semua, semua yang mau guyub, siapa pun yang terjadi.

PN:

Bagaimana kronologis kejadian konflik tahun 2011 antara Desa Buyut dengan Kampung Kusumadadi?

IF:

Kejadian 2011, awalnya ada pencurian sapi, malam hari ada dua orang bawa sapi, maka ada 2 yang satu lari, yang satu tertangkap, maka diamankan. Setelah kejadian tidak ada lagi konflik-konflik yang berarti.

PN:

Apa tugas, fungsi dan tujuan Paguyuban ini?

IF:

Paguyuban intinya untuk mengamankan. Sekarang kalau ada pelaku kriminal, kalau tidak bisa diomongin langsung kita angkat dan bawa ke kantor polisi. Kita tekankan tidak bawa-bawa dan menyebut suku. Di Bekri ada suku Lampung, walaupun tidak banyak. Awalnya paguyuban ini tujuannya untuk mengantisipasi kekuatan suku Lampung, karena mereka ingin menang sendiri. Tapi sebetulnya hanya sebagian kecil saja yang reseh, tapi mewarnai dan semuanya terbawa. Dengan adanya paguyuban, alhamdulillah cukup membantu pengamanan. Semisal ada pembegalan, selama ini didiamkan saja, tapi dengan adanya paguyuban kalau ada tindakan kriminalitas cepat bertindak dan diserahkan ke polisi. Kalau kepolisian tidak respon dilaporkan, maka kita serahkan ke Tentara. Dengan adanya paguyuban gerakan masyarakat dalam mewujudkan keamanan semakin terkoordinir.

PN:

Bagaimana gerak paguyuban ini? Dari mana saja mereka?

IF:

Paguyuban ini gerakannya bisa cepat, informasi menyebar dan cepat datang, mereka datang dari Tulang Bawang, Lampung Timur, Kalirejo, Metro dan lain-lain. Masyarakat Bekri sebetulnya tidak jauh dari bedeng-bedeng dari Metro dan sebagainya. Jadi kalau ada kejadian di sini, cepat dari Metro

datang. Hubungan masyarakat sebenarnya tidak ada masalah, yang memicu hanya masalah tindakan kriminalitas. Maka seharusnya pihak aparat keamanan cepat bertindak, biar tidak ada tindakan massa. Jadi sebetulnya ada kekecewaan terhadap aparat kepolisian.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN TRI SUJATNO KAMPUNG KUSUMADADI**

PN:

Konflik apa yang pernah terjadi di Kampung Kusumadadi?

IF:

Konflik yang terjadi berupa penyerangan yang dilakukan oleh warga Buyut ke dusun 1 kampung Kusumadadi.

PN:

Apa penyebab konflik tersebut?

IF:

Masalahnya tidak jelas, asal main bunuh. Warga Buyut dianggap mencuri sapi tapi tidak ada barang bukti. Motor pelaku dipakai oleh kepala kampung, digadaikan dan ada yang mengetahuinya. Warga Buyut melakukan penyerangan ke kampung Kusumadadi dusun 1. Penyerangan yang dilakukan dengan membakar rumah warga dusun 1 Kusumadadi. Sepanjang jalan masuk ke Kusumadadi dengan membakar rumah di dusun 1.

PN:

Apakah ada korban jiwa dalam peristiwa pembakaran tersebut?

IF:

Tidak ada korban jiwa, tetapi rumah banyak yang dibakar.

PN:

Bagaimana penyelesaiannya?

IF:

Penyelesaiannya melalui Polres, yang terindikasi membunuh diproses secara hukum dan ada 4 orang yang dipenjara. Setelah diotopsi diketahui ada tindakan penganiayaan dan pembunuhan. Mayat dibuang di ladang.

PN:

Kapan peristiwa itu terjadi?

IF:

Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu.

PN:

Apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah turut bertanggung jawab dalam memperbaiki rumah-rumah yang dibakar?

IF:

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah turut bertanggung jawab dalam memperbaiki rumah-rumah yang dibakar.

PN:

Apakah sebelumnya pernah ada konflik?

IF:

Sebelumnya tidak pernah ada konflik, masyarakat hidup rukun.

PN:

Suku apa saja yang ada di Kampung Kusumadadi?

IF:

90% penduduknya Jawa. Ada Banten, Lampung, Sunda.

PN:

Batas-batas Kampung Kusumadadi?

IF:

Perbatasan desa Kusumadadi adalah desa Kusuma Jaya dan Poros Jaya.

PN:

Masih Jawa penduduknya?

IF:

Ya, masih Jawa, untuk kecamatan Bekri mayoritas penduduknya Jawa.

PN:

Kampung masyarakat Lampung yang terdekat?

IF:

Kampung Bumiratu yang diselingi dengan kampung Wates yang mayoritas penduduknya Jawa.

PN:

Interaksi dengan masyarakat Lampung jarang?

IF:

Ya, jarang.

PN:

Setelah penyelesaian yang difasilitasi oleh Pemkab, apakah terjadi lagi konflik?

IF:

Alhamdulillah, setelah itu tidak terjadi konflik yang berarti.

PN:

Apakah itu karena penyelesaian hukum dengan dipenjarakannya pelaku pembunuhan sehingga tidak ada dendam kembali dari pihak korban yang dibunuh?

IF:

Ya, pelakunya dipenjara, sekitar 3 tahun.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN BAPAK MUJIBULLAH KAMPUNG KUSUMADADI**

PN:

Menurut Bapak, apa motif terjadinya konflik di Kampung Kusumadadi?

IF:

Konflik, penyerangan yang terjadi lebih cenderung penjarahan. Awalnya memang ada kasus penggelapan, pribadi kakam. Kedua pengeroyokan massa, masyarakat Kusumadadi kehilangan sapi, pagi-pagi ada orang asing, massa datang tidak bisa dibendung, akhirnya meninggal di TKP. Isu yang berkembang ada warga Buyut nganjang di Kusumadadi, motornya diambil dan dimassa.

PN:

Selama terjadi pembakaran, di manakah masyarakat Kusumadadi mengungsi?

IF:

Mereka mengungsi di pesantren.

PN:

Bagaimana sikap para tokoh dengan kejadian pembakaran ini?

IF:

Para tokoh prihatin, negara sudah maju mengapa seperti ini. Maka, bagaimana kalau kita mengupayakan agar pemerintah/aparat memberikan perhatian terutama keamanan. Maka kami sliaturahmi ke Jayasakti, karena ada Paguyuban.

PN:

Apa yang menjadi pemicu konflik ini?

IF:

Aksi yang pertama di Wates, banyak terjadi pemalakan. Maka masyarakat sepakat ronda/ngepam, terutama waktu lebaran. Perempatan, sawit, sampai ujung danau warga ronda. Peristiwa di Sukajawa, ada warga yang dibegal (kebetulan pengurus), dengan warga Gunung Sugih, maka warga paguyuban berkumpul, sebetulnya hanya aksi hanya untuk menunjukkan kekuatan, bukan untuk penyerangan.

PN:

Apa manfaat dari didirikan Paguyuban?

IF:

Masyarakat sekarang kurang bersatu, tidak peduli dengan peristiwa orang lain, maka dengan adanya Paguyuban ini maka ada kebersamaan. Sekarang Paguyuban sudah meluas, bukan hanya Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji dan sebagainya. Prinsipnya, jika ada anggota yang terzalimi, tidak bersalah maka kita bela, kalau dari pemerintah tidak ada kepedulian maka sekejap ribuan orang bisa dikumpulkan. Dan kalau anggota yang salah kita, maka kita serahkan ke proses hukum.

PN:

Bagaimana setelah dibentuknya paguyuban? Apakah aman?

IF:

Alhamdulillah, sekarang sudah aman, kalau sebelumnya kebun sawit dipanen mereka seenaknya dan menganggap punya nenek moyang mereka.

PN:

Siapakah yang bergabung dengan PAMBERS?

IF:

Yang bergabung dengan PAMBERS rata-rata yang pernah mengalami kejadian seperti di Kusumadadi.

PN:

Dimana pusat PAMBERS?

IF:

Pusat di Jayasakti, dibentuk sejak ada tindakan-tindakan kriminal. Di Jayasakti, motor dicuri, sawit diambil, bawa senapan ayam ditembak, lebaran minta THR. Kemudian aksi yang terlihat di Tanjung Harapan, serangan balasan di dusun 1. Rumah dusun 2 dibakar sekitar 40 rumah. Serangan balasan, didukung oleh orang Cina, Batak dan sebagainya, partisipasi karena selama ini usaha yang mereka lakukan sering dipalak. Bahkan mereka malak dengan membawa senjata.

PN:

Menurut Bapak, bagaimana dengan keberadaan PAMBERS?

IF:

Dengan keberadaan PAMBERS alhamdulillah sudah mulai ada perhatian dari aparat keamanan.

PN:

Apakah motif pembakaran rumah yang terjadi di Kusumadadi sama dengan yang di Tanjung Harapan?

IF:

Sama dengan yang terjadi di Kusumadadi, cenderung yang terjadi penjarahan, mereka bawa mobil barang-barang yang berharga diambil, baru kemudian dibakar. Mereka bawa senpi, seharusnya ditahan.

PN:

Apa tujuan dari PAMBERS?

IF:

Niatnya kita membantu pemerintah, tapi kalau sudah kita laporkan tidak ada tindakan maka jangan salahkan kalau masyarakat yang bergerak. Selama ini pelaku-pelaku kriminal selalu dibela.

PN:

Apakah motif mereka?

IF:

Motif mereka adalah tindakan kriminalitas, bukan ekonomi, tapi sekarang marak narkoba. Kalau masalah ekonomi bisa diatasi. Saat ini memang sudah mulai banyak menjadi pemakai,

kecanduan, sehingga marak tindakan kriminal. Bandar besarnya di Gunung Sugih baru.

PN:

Bagaimana untuk mengantisipasi NARKOBA?

IF:

Yang penting adalah perhatian orang tua, pendidikan akhlak.

PN:

Apa manfaat dari adanya paguyuban?

IF:

Manfaat adanya paguyuban menjamin adanya keamanan. Setelah adanya paguyuban, pelaku-pelaku kriminal sudah merasa takut untuk melakukannya karena paguyuban cepat bertindak. Biasanya jam-jam pulang sekolah, anak-anak yang nakal masuk, sekarang tidak lagi.

PN:

Apa bentuk kegiatan Paguyuban?

IF:

Di Srikaton, pernah kumpul bersama istighasah bersama. Acara khusus kumpul setahun sekali.

PN:

Siapa pengurus Paguyuban ini?

IF:

Uyip Pirmanto ketua paguyuban, sekretaris Setyadi.

PN:

Apakah ada iuran dalam Paguyuban?

IF:

Tidak mengadakan iuran, jadi sifatnya spontan kalau dibutuhkan.

PN:

Apa yang memicu kriminal menurut Bapak?

IF:

Setelah maraknya narkoba semakin meningkatkan tindakan kriminal.

PN:

Apa saran Bapak untuk para Penegak Hukum?

IF:

Intinya penegakan hukum jangan tebang pilih, selama ini pelaku ditangkap tapi besoknya sudah bebas, ini yang membuat masyarakat jengkel.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG HARAPAN
DENGAN BAPAK IBRAHIM 1**

PN:

Apakah Bapak sudah lama menjabat kepala Kampung Tanjung Harapan?

IF:

Baru 3 bulan

PN:

Kapan peristiwa konflik itu terjadi?

IF:

Tahun 2014

PN:

Suku apa saja di kampung Tanjung Harapan ini?

IF:

Suku Lampung, Jawa, Sunda, dan Bali. Mayoritas Jawa, tapi tidak terlalu selisih jumlah antara Lampung dan Jawa, selanjutnya Sunda.

PN:

Di dusun manakah mereka menetap?

IF:

Dusun 1 Tanjung Harapan Lampung, dusun 2 Taman Rejo Jawa, dusun 3 Pardasuka Jawa dan Lampung

PN:

Apa penyebab konflik di kampung Tanjung Harapan ini?

IF:

Penyebab konflik, Kepala Kakam yang dulu, anak-anak sini kebanyakan nakal, kurangnya pendekatan dan sepertinya yang bersangkutan masuk dalam lingkaran tersebut. Saya walau suku Lampung, berusaha objektif. Suku Jawa sudah kesal, akhirnya timbul korban. Rumah tidak bisa tinggal, selalu ada kecurian. Peristiwanya, suku Jawa ini mau lamaran, dan ada seserahan, sudah belanja, sorenya dimaling, sedangkan acara besok, menyebabkan mereka sangat sakit, malu dengan besan. Dua anak ini diculik mereka dimasukkan di karung, dibunuh dan dimasukkan dalam kali. Kebetulan sendalnya 2 anak tersebut ditemukan di rumah pelaku pembunuhan. Setelah ketahuan ada sendal dan percikan darah, ada rokok, maka dicurigai daerah situ. Diserang oleh penduduk pribumi, karena kebanyakan laki lagi di ladang, maka ada yang mengaku bahwa benar kedua anak tersebut dibunuh. Maka dilakukan pembakaran rumah. Penyerangan balasan ada juga pembakaran rumah, tapi penyerangan pertama yang 117 rumah yang rusak, kebanyakan terbakar. Pada saat kejadian dusun 2 kosong, pada mengungsi. Termasuk saya yang membantu masyarakat dusun 2 mengungsi, sampai jam 2. Dusun 1 dan 2 hanya berbatasan jalan. Penyerangan balasan melibatkan daerah lain, yang dusun 2 sedikit yang ikut penyerangan.

PN:

Bagaimana setelah kejadian penyerangan?

IF:

Setelah kejadian penyerangan tidak terjadi lagi keributan, saya berusaha mendamaikan selaku kepala kampung antara 3 pelaku dan 2 korban (yang mencuri). 3 pelaku, 2 ditahan 2 tahun, 1 ditahan 18 bulan. Mereka bertiga sebenarnya baik, hanya saja karena sudah berulang terus, maka sebagai puncak kekesalan mereka akhirnya menghabisi 2 orang tersebut. Setelah saya sertijab, maka orang tua, istri dan anak-anaknya sekarang sudah saya pulangkan, sebelumnya mengungsi ada yang ke Mesuji. 3 bulan sejak dilantik, sekarang aman, 17 Agustus kemarin, sudah membaur antara warga dusun 1 dan 2.

PN:

Apa sebenarnya yang diharapkan masyarakat?

IF:

Harapan yang diinginkan masyarakat adalah keterbukaan, yang selama ini bahasa-bahasanya lebih banyak politik.

PN:

Keterbukaan apa yang diinginkan warga?

IF:

Keterbukaan dalam kegiatan, pembangunan dan sebagainya. Kita dapat dana 100 juta dari dinas sosial untuk membangun GSG. Dan yang paling penting diinginkan oleh warga aman.

PN:

Keamanan bagaimana yang diharapkan?

IF:

Yang penting pamong jangan melindungi yang salah.

PN:

Apa sebenarnya pemicu konflik di Tanjung Harapan ini?

IF:

Pemicunya adalah karena pelaku kriminal dilindungi.

PN:

Setelah Bapak menjadi kakam, apakah masih sering terjadi kerusuhan di Kampung Tanjung Harapan?

IF:

41 TKP kejadian kendaraan yang lewat tahun lalu, setelah saya menjadi kakam, alhamdulillah tahun ini tidak ada.

PN:

Perubahan-perubahan itu, apakah karena ada upaya Pak Lurah. Pendekatan kepada anak muda dan kerjasama dengan

masyarakat, bersama menjaga keamanan, siskamling, kalau ada, apa yang diharapkan?

IF:

Harapannya adalah Tanjung Harapan aman. Warga yang tidak dikenal ditanya, dalam hal ini saya tekankan tetap dilakukan dengan tata krama. Saat ini Tanjung Harapan dijamin aman, jalan jam 2/3 malam aman.

PN:

Bagaimana dengan Paguyuban Masyarakat Bersatu?

IF:

Paguyuban cenderung lebih banyak positif. Paguyuban adalah untuk silaturahmi, kebersamaan, tapi kalau mereka diganggu pasti mereka melawan.

PN:

Setelah kejadian informasinya masyarakat Jawa membentuk Paguyuban masyarakat bersatu, apakah pernah mendengar?

IF:

Belum pernah mendengar. Yang ada di sini MAJAKANI Masyarakat Asli Jawa. Saya mau masuk tapi tidak boleh karena dijelaskan mereka tidak bisa. Dan paguyuban ini positif untuk kebersamaan, ada uang kas.

PN:

Ketua MAJAKANI?

IF:

Nggak tahu, tapi ada pengurusnya Paryono di Pardasuka. Setia Hati: Suyatno. Pembina SH Pak Musthafa.

PN:

Penduduk asli apakah punya paguyuban?

IF:

Tidak punya.

PN:

Apa Gelar adat Bapak?

IF:

Gelar adat saya Minak Adat. Kalau anaknya pepadun, bapaknya pensiun, kalau disini, kala di Tanjung Ratu tidak. Walaupun belum nikah (kelas 2 SMA) anak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan adat. Saya hanya sebagai penasihat, kalau minta masukan-masukan. Pada saat anak kita cakak pepadun, ditanya gelar kita mau apa saya Minak, ada Mendiko. Dulu gelar saya Pangeran penutup adat, Setan penutup adat.

PN:

Warisan apa masih ikut adat?

IF:

Ya ikut adat. Anak laki-laki yang dapat dan yang tertua paling banyak. Peninggalan turun-temurun, dari nenek tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Untuk saat ini orang-orang tertentu saja yang masih mempertahankan, karena banyak yang sudah menjualnya. Contoh turun ke cucunya, kalau dijual oleh cucunya kan susah ada yang melarang. Di Kampung ini hanya beberapa orang yang punya kebun, sawah. Lainnya sudah dijual. Kebijakan anak yang tua anak perempuan bisa mendapatkan. Anak perempuan diambil orang, tanggung jawab terhadap anak-anaknya tanggung jawab anak yang tertua (pamannya) 50 %. Mau sunat, mau sekolah, apalagi mau menikah. Maka warisan dari mbah tidak dibagi, maksudnya untuk itu. Pertanggungjawaban anak laki-laki tua terhadap saudara perempuannya, menikahkan, membekali sesan, ikut bertanggungjawab mengurus anak-anaknya (50%). Lampung Abung tidak ada istilah cerai. Anti menceraikan istrinya. Kalau dilakukan bisa perang, karena menyinggung keluarga perempuan. Setan-setan ada yang memimpin penuntut adik. Masing-masing bilik ada perwakilan. Kalau mau cerai, dia harus mengumpulkan tokoh-tokoh adat, motong sapi, denda 24 juta. Di rapat itu dikumpulkan dan diputuskan apakah boleh dicerai atau tidak. Intinya cerai dipersulit. Orang yang sudah dimasukkan angkat saudara dalam adat, maka diperlakukan

sama dan menjadi pertanggungjawab masyarakat adat kampung. Marga anak tuha 11 kampung sama dengan Padang Ratu. Kalau ada yang pindah agama, dibuat baik dari keluarga dan adat. Masyarakat adat tidak mau mengakui keberadaannya. Kalau nikah, kemudian pasangannya masuk Islam ada, cukup banyak.

PN:

Bagaimana keadaan interaksi masyarakat di Tanjung Harapan?

IF:

Masyarakat di Tanjung Harapan berbaur, 50% bisa bahasa Lampung. Banyak juga yang angkat saudara, angkat sumpah. Kalau sudah seperti ini kedudukan sama.

PN:

Kalau semua anak sudah cakak pepadun, apakah anak laki tua tidak punya kuasa lagi?

IF:

Sebetulnya masih ada, hanya banyak yang tidak memahami, karena sudah sama begawi merasa sama. Kutomaro hanya anak laki-laki tertua yang boleh menggunakan, adik-adiknya tidak boleh.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KAKAM IBRAHIM 2

PN:

Pak Ibrahim tanahnya banyak?

IF :

Alhamdulillah, peninggalan orang tua tidak ada yang dijual.

PN:

Berapa % tanah masyarakat Lampung di Kampung Tanjung Harapan ini yang dijual?

IF:

70% tanah masyarakat Lampung, sudah dijual. Di sini hanya punya kita sama dengan Pak Arifin. Yang lain ada, tapi sebagian besar sudah dijual.

PN:

Bagaimana dengan masyarakat pribumi di Kampung Tanjung Harapan?

IF:

Di Tanjung Harapan jarang yang mau menjadi upahan. Beda dengan Kuripan, kadang membuat kisruh. Belum waktunya panen, sudah dipanen dengan memberitahu secara mendadak. Rata-rata tidak ada lagi tanah, sawah. Akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Maka seringkali terjadi sengketa, semisal orang tuanya menjual 1 bidang, 1 hektar, maka oleh anaknya diukur kelebihan dari 1 hektar diambil kembali. Demikian juga tanah yang sudah dijual, sudah ditanam sawit, kemudian dipatok oleh warga Lampung dari kampung lain, sekitar 20 hektar. Saya tanya kepada warga mereka memiliki surat, walaupun bukan sertifikat. Warga disuruh datang kepada mereka untuk minta uang damai. Maka saya yang datang dan jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah tanah mereka, saya ingatkan jika tetap dilanjutkan maka akan saya tempuh jalur hukum. Selagi ada bukti tertulis, berita acara, akta, maka saya pertahankan bagi pemiliknnya. Di lapangan memang butuh ketegasan.

PN:

Apa biasanya yang menjadi masalah besar dalam penanganan tanah pribumi di kampung Tanjung Harapan ini?

IF:

Yang menjadi masalah besar, kadang-kadang Kakam sebelumnya main mata dengan mereka. Kalau hanya motif ekonomi, setelah begal motor, seharusnya setengah bulan bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi yang terjadi tidak, hampir setiap hari terjadi tindakan kriminalitas. Ada 41 kasus lebaran sebelumnya. Alhamdulillah, setelah saya menjabat hanya ada 3 kasus, 2 pencurian, 1 pinjaman digadaikan selama 7 bulan terakhir.

PN:

Siapa yang mula-mula menyerang dusun 2?

IF:

Yang menyerang dusun 2 bukan warga dusun 1, dan yang menyerang dusun 1 bukan warga dusun 2. Pengerahan massa cenderung cepat, karena kecanggihan alat komunikasi. Kadang informasi yang beredar ditambah-tambah. Jadi motifnya penjarahan, setelah barang-barang berharga bisa diambil/dibawa, kemudian dibakar. Warga di sini cenderung bisa guyub, hidup bersama. Masih ada warga yang mengungsi yang belum mau pulang ke rumahnya.

PN:

Siapa yang ditahan dalam peristiwa itu?

IF:

Edi, Rusdi, Yanto ditahan di Way Hui. Mereka ipar-iparan. seharusnya mereka menyadari bahwa ketiga orang ini bisa dikatakan adalah pahlawan bagi mereka, karena berani melakukan tindakan seperti ini.

PN:

Apakah mereka masih dendam dari pihak keluarga korban?

IF:

Masih ada rasa dendam dari pihak keluarga korban, terutama orang tuanya. Maksud saya kita damaikan mereka, dari dusun 1 sudah mau, maksudnya dalam damai seharusnya pihak

keluarga pelaku menyiapkan uang damai. Sudah saya sampaikan dengan para penyimbang di kampung sini. Dari pihak keluarga pelaku hanya bisa menyiapkan dana 15 juta. Menurut tokoh adat di sini belum pantas, mengingat kejadian sebelumnya. 1 orang minimal 25 juta, berdua 50 juta (kompensasi korban). Korban 2 orang (kakak beradik sepupu). Untuk damai dalam tradisi Lampung harus diangkat sumpah, angkat saudara. Biasanya untuk kejadian seperti ini ada swadaya masyarakat, untuk di sini, warga dusun 2,3,4 belum ada.

PN:

Bagaimana dengan korban yang di rumah sakit ? Siapa yang menanggung?

IF:

Waktu korban di rumah sakit, setiap warga ditarik biaya berobat Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Menurut tokoh adat, mengapa untuk uang damai mereka tidak tahu. Dalam kehidupan masyarakat adat Lampung, walaupun korban adalah anak orang tuanya, tetapi seluruh masyarakat adat ikut bertanggung jawab.

PN:

Apakah ada di antara masyarakat yang enggan untuk turut membiayai korban di rumah sakit?

IF:

Memang ada kecenderungan warga merasa sudah dibuat susah, sehingga mereka tidak lagi mau memberikan sumbangan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN MASYARAKAT JAWA
(PAK ANANG, BU ASIJAH)**

PN:

Sudah lama Bapak dan Ibu tinggal di sini?

IF:

Sudah Lama.

PN:

Bagaimana, betah di sini?

IF:

Ya betah, bagaimana lagi, mau pulang ke mana.

PN:

Ini dusun berapa?

IF:

Dusun 2.

PN:

Di dusun 2 ini, berapa % masyarakat Jawa?

IF:

Dusun 2 ini, mayoritas Jawa, ada 90% Jawa, 10 % Lampung.

PN:

Masyarakat Jawa di dusun 2 ini, dari mana asal mereka?

IF:

Masyarakat Jawa di sini, rata-rata dari Jawa Timur.

PN:

Bagaimana dengan kehidupan masyarakat di sini, apakah ada masalah?

IF:

Masyarakat di sini cenderung aman, tidak ada masalah antara dusun 1 dengan 2. Hanya masalah tindak kriminal, kemudian

orang-orang dari luar yang menjarah dan melakukan pembakaran.

PN:

Apakah Bapak Ibu setuju dengan adanya PAMBERS?

IF:

Saya tidak setuju dengan adanya PAMBERS, jika ada masalah lebih baik diselesaikan secara baik-baik.

PN:

Pernahkah Bapak menjabat di Kampung ini?

IF:

Sebelumnya saya Kaur Pemerintahan.

PN:

Apakah rumah Bapak juga ikut dibakar massa?

IF:

Termasuk rumah ini kena bakar.

PN:

Apakah rumah-rumah yang dibakar mendapatkan bantuan dari Pemerintah kabupaten Lampung Tengah?

IF:

Ya, dapat dana bantuan rehab dari Pemkab sebesar 24 juta, secukupnya digunakan untuk membangun kembali.

PN:

Apakah Bapak dan Ibu trauma dengan kejadian penyerangan dan pembakaran?

IF:

Ya, trauma, apa salah saya.

PN:

Apa yang menjadi penyebab penyerangan dan pembakaran?

IF:

Mau serah-serahan malam, siangya dicuri, 2 Pelaku dibunuh dan dimasukkan ke dalam kali. Ada ceceran darah. Ada seorang

anak perempuan yang agak kurang waras mengetahui kejadian, akhirnya menyatakan 2 pelaku kriminal dibunuh.

PN:

Apakah pada saat penyerangan Bapak Ibu mengungsi?

IF:

Pada saat penyerangan, maka kami mengungsi masing-masing, bahkan tidak ketemu dengan saudara, mengungsi sekitar 1 minggu. Anak saya ini trauma tidak mau minap di sini, sekarang minap di dusun 3.

PN:

RT berapa yang kena pembakaran?

IF:

RT 6, 5, 3 yang kena pembakaran, RT 4 hanya 4 rumah. Kami tidak tahu, tiba-tiba sudah habis terbakar.

PN:

Pelaku yang membunuh, apakah keluarga yang dicuri?

IF:

Ya benar, pelaku 3 orang adalah adik kakak. Saya selaku RT pada saat itu, demikian juga Kadus sama sekali tidak tahu.

PN:

Sebenarnya kalau 2 pelaku kriminal ditangkap dan diserahkan kepada aparat, mungkin ceritanya beda ya pak?

IF:

Ya betul, ceritanya pasti beda.

PN:

Apakah Bapak Ibu menduga pelaku yang membunuh?

IF:

Pelaku 3 Orang di luar dugaan, paling ramah, sosial, sopan. Mungkin disebabkan habis kesabarannya, sampai 7 kali lebih (ayam dan lain-lain). Bahkan saya tidak percaya, jika mereka pelakunya, taat ibadah, aktif di masjid. Banyak orang yang tidak percaya.

PN:

Bagaimana kehidupan masyarakat dusun 1 dan 2?

IF:

Sebenarnya rukun, dusun 1 ada pindahan rumah, kita datang, demikian juga sebaliknya. Tindakan kriminal sebenarnya dilakukan oleh anak-anak dan dari keluarga itu-itu saja. Ayam, beras, HP yang dicuri, tindakan kriminal dilakukan anak-anak, tapi sudah keterlaluhan. Baru-baru ini juga baru terjadi keributan. Pada saat gotong royong, yang bersangkutan baru hari ke 3 ikut kerja, melihat orang Jawa lagi duduk, disuruh kerja, dia jawab saya baru kerja, ditendang pantatnya masuk lubang, maka dia tarik kaki ditendang, sama-sama masuk lubang dan berantem di lubang. Massa sudah ramai, tapi alhamdulillah aparat cepat turun tangan, dari kepolisian dan KODIM, akhirnya didamaikan. Sebenarnya yang nakal hanya dari satu keluarga.

PN:

Bagaimana dengan keamanan setelah di jabat Bapak Ibrahim?

IF:

Alhamdulillah, setelah dijabat Pak Ibrahim, relatif aman. Pada saat Agustus ada yang kecurian TV, maka langsung dilacak dan dapat dikembalikan. Pak Ibrahim bagus, lurah yang paling lurus selama ini. Hanya saja jika bawahannya tidak bagus, jadi tidak bagus juga. Pelaku yang menendang itu juga bawahannya.

PN:

Apakah tanah masyarakat pribumi di Dusun 1 sudah banyak yang dijual?

IF:

Dusun 1 rata-rata tanah sudah dijual, 90%. Sehingga sekarang mereka menjadi penggarap.

PN:

Apakah ada Orang Jawa yang menjadi Kakam selama ini?

IF:

Orang Jawa tidak mau nyalon Kakam, takut pusing.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KADES KURIPAN: (ABDULLAH)**

PN:

Kampung Kuripan terdiri dari berapa dusun? Dusun mana yang pribumi? Bagaimana dengan dusun yang lainnya?

IF:

Kampung ini terdiri dari 8 dusun, dusun 1 ini saja yang pribumi. Dusun lainnya mayoritas Jawa, sebagian ada sunda, bahkan Bali.

PN:

Berapa jumlah mata pilih yang pribumi dibandingkan dengan yang lainnya?

IF:

Mata pilih di kampung ini Orang Lampung tidak sampai 350 mata pilih, jumlah mata pilih 5000 mata pilih. Tetapi yang 350 bisa membuat keributan, sehingga bagaimana mengkondisikan agar tidak berbuat reseh.

PN:

Ada berapa agama di Kampung Kuripan?

IF:

Agama di kampung ini beragam, ada Islam, Hindu, Kristen, tempat ibadah juga beragam ada masjid, mushalla, gereja, pura.

PN:

Bagaimana hubungan antar warga? Apakah pernah terjadi konflik?

IF:

Walaupun kampung ini masyarakatnya beragam, namun mereka hidup rukun berdampingan, tidak pernah terjadi konflik, saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Pernah diadakan Prasmanan Kilat, 20 kecamatan (seputih banyak, rumbia) hadir di sini masyarakat lain dan pamong kampung mendukung kegiatan, sambutan dari masyarakat baik, dari segi keamanan juga dibantu. Agama Budha ada Pura, para Mangku banyak.

PN:

Apa yang membuat orang tua Bapak (Abu Bakar) menjadi kades selama 32 tahun?

IF:

Selama kepemimpinan orang tua saya sebagai kades bisa mengayomi. Setelah tidak menjabat kepala kampung diangkat masyarakat sebagai kepala BPK. Peraturan 60 tahun tidak boleh mencalonkan, tetapi karena kehendak masyarakat diangkat. 32 tahun menjabat rumah tidak kerehab. Beliau dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat di kampung, selalu menyerap aspirasi masyarakat. Beliau menjabat selama 32 tahun. Setiap pemilihan nggak ada calon. Pernah ada yang mencalonkan dapat suara sekitar 200, sementara bapak saya 3.000.

PN:

Dalam pemilihan Kakam kemaren, Pak Abdullah sebagai putra Bapak Abu Bakar memenangkan pemilihan Kakam? Berapa suara yang Bapak peroleh ketika itu?

IF:

Pemilihan kemarin, dapat suara 2.500, sementara lawannya sekitar 300, yakni calon perempuan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN PAK ABU BAKAR
(MANTAN KAKAM, KETUA BADAN
PERWAKILAN KAMPUNG)**

PN:

Berapa lama Bapak menjadi Kakam Kuripan?

IF:

Selama 33 tahun 2 bulan.

PN:

Ada berapa Dusun Kampung Kuripan ini?

IF:

Kampung Kuripan ini terdiri dari 8 dusun

PN:

Apakah mayoritas masyarakat Kuripan?

IF:

Mayoritas masyarakat Kuripan adalah Jawa, masyarakat Lampung tidak sampai 15%. Dusun 1 khusus penduduk asli.

PN:

Apakah masyarakat Kuripan ada yang ikut keluar ketika terjadi permusuhan antara Desa Kota Baru (Sunda) bermusuhan dengan Tanjung Harapan?

IF:

Desa Kota Baru (Sunda) bermusuhan dengan Tanjung Harapan, masyarakat Kota Baru sudah sering dibegal oleh masyarakat Tanjung Harapan, pemicunya keamanan. Dusun 1, dengan dusun 5 Bangun Sri, saya dapat informasi dari Camat, memang betul masyarakat Kuripan sudah menyiapkan tombak. Saya telpon kadus 5, saya minta tidak ada yang keluar. Kemudian saya panggil tokoh-tokoh dari suku asli, saya sampaikan yang punya anak, keponakan dan sebagainya agar disuruh pulang.

PN:

Apakah pemicunya karena kriminal?

IF:

Ya, benar.

PN:

Masyarakat Jawa dan Lampung, apakah sudah siap hidup berdampingan?

IF:

Siap, tidak ada permasalahan, khususnya di Kuripan, awalnya orang tua saya mencari kawan hidup di Kuripan dari Jawa, Pringsewu dan sebagainya, mereka diberi tanah untuk berkebun dan pekarangan. Kalau mereka ingat itu pasti mereka tidak akan buat gara-gara. Masyarakat yang diberi tanah tersebut diayomi dan merasa aman. Orang tua saya dulu Pesirah (Kepala Negeri). Masyarakat Lampung juga sudah menerima hidup berdampingan.

PN:

Apakah falsafah hidup pribumi?

IF:

Falsafah hidup pribumi adalah piil pesenggiri, malu melakukan perbuatan yang tercela dan menjaga kehormatan/harga diri.

PN:

Bagaimana dengan buku Adat, apakah juga diberlakukan untuk marga Anak Tuha saja?

IF:

Buku adat berlaku untuk satu marga anak tuha (11 kampung). Baru direvisi, beberapa bulan yang lalu.

PN:

Nemui nyimah, nengah nyapur, sakai sambaian, (bergaul, dan sebagainya), menurut pengamatan Pak Abu Bakar itu dijalankan?

IF:

Ya, dijalankan.

PN:

Apakah yang lebih menonjol dalam memahaminya, keakuan, tersinggung harus melakukan kekerasan?

IF:

Kalau sudah menyinggung harga diri memang ya.

PN:

Bagaimana sanksi adat yang diberikan, misalkan untuk seorang yang mencuri?

IF:

Secara adat mencuri pun bisa dikenakan sanksi adat. Tetapi karena itu mencakup tiga hukum, maka yang diberlakukan hukum pidana. Kecuali masalah perkosaan, maka secara adat pun mendapatkan sanksi. Kalau sudah merusak rumah tangga orang lain, maka ada sanksi adat bagi pelaku perkosaan, ia terkena juga KUHP.

PN:

Bagaimana melestarikan hukum adat?

IF:

Musyawarah adat pada kami (bidang suku) selalu berlaku, keputusan berlaku berdasarkan musyawarah.

PN:

Apakah bisa dikatakan bahwa 'adat' sebagai institusionalisasi hukum adat?

IF:

Ya, seperti itu.

PN:

Ada tidak penolakan-penolakan, kebencian masyarakat Lampung terhadap orang Jawa?

IF:

Tidak ada.

PN:

Apakah masyarakat Jawa sebagai pendatang dibagi tanah?

IF:

Waktu orang tua saya, masyarakat Jawa dibagi tanah, orang Lampung juga dibagi tanah. Yang menjadi masalah karena suku Lampung kalau ada acara, anak sunatan, nikah, maka tanah dijual. Maka sekarang kebanyakan hampir semuanya tanah-tanah suku Lampung sudah dijual. Tokoh adat, masalahnya tidak ada penghasilan, sehingga ketika butuh dana jual tanah. Yang banyak kejadian, orang tuanya menjual, anaknya menggugat kembali, mau mengambil kembali. Karena tidak ada surat menyurat.

PN:

Bagaimana dengan tanah wakaf?

IF:

Kalau kaitannya dengan tanah wakaf sudah ada Akta Ikrar Wakaf.

PN:

Bagaimana dengan harta warisan?

IF:

Kalau masalah harta warisan, masih ikut adat. Harta warisan untuk anak laki-laki tertua. Tapi ada tanggung jawab mengurus keluarga besarnya, bahkan termasuk keponakan. Tapi sekarang sudah mulai yang menggunakan hukum warisan agama.

PN:

Mengapa yang punya warisan adalah anak laki-laki tertua?

IF:

Yang punya warisan adalah anak laki-laki tertua (pertama), karena yang bersangkutan sebagai pengganti orang tuanya, maka adik-adiknya, saudara-saudaranya tanggung jawab anak laki-laki tertua. Anak perempuan, diambil orang, maka saat nikah diberi bekal untuk kehidupan rumah tangganya diberi sesan, itulah dianggap sebagai bagian anak perempuan. Tanggung jawab, tetap ada walaupun tidak sepenuhnya, umpamanya keponakan sunatan, maka harus manjau. Kalau adeknya terlilit hutang, maka ikut memikirkan. Maka anak laki-

laki tertua harus siap enak dan siap susah. Hanya saja kebanyakan hanya mau siap enak. Orang yang paham agama, sudah berpendidikan, menggunakan hukum waris Islam. Tidak perlu minta persetujuan adik-adiknya. Bahkan istilahnya adiknya adalah milik kakaknya yang tertua. Walaupun adik-adiknya sudah cakak pepadun, dalam adat istiadat sudah mandiri, tapi secara piil pesenggiri tetap ada kaitan dengan kakaknya yang tertua.

PN:

Apakah anak tertua boleh menjual harta warisan?

IF:

Anak laki-laki tertua, boleh menjual. Kalau adik-adiknya sudah setan. Tapi sekarang, orang Lampung sudah ada yang kemudian membeli tanah kembali.

PN:

Apakah tindakan kriminal dikarenakan adanya kebencian dengan suku pendatang?

IF:

Tindakan kriminal mencuri, begal adalah murni kriminal karena butuh uang, maka ia mencuri, bukan karena adanya kebencian dengan suku pendatang.

PN:

Bagaimana kalau nikah dengan adat lain (pesisir)?

IF:

Kalau nikah dengan adat lain (pesisir), maka harus diangkonkan, supaya ada persamaan adat. Bahkan walaupun sudah menikah kalau belum diselesaikan secara adat maka belum diakui kalau sudah nikah.

PN:

Bagaimana dengan Seni budaya?

IF:

Masalah seni budaya berjalan masing-masing, yang Lampung berjalan sendiri, yang Jawa berjalan sendirinya. Kalau masalah bahasa sudah ada pembauran.

PN:

Bagaimana dengan masalah keamanan di Kuripan?

IF:

Inti terwujudnya keamanan di Kuripan, karena masyarakat merasa terayomi. Kejahatan yang terjadi saat ini dilakukan oleh anak-anak bujang, karena mereka perlu rokok, pakaian, maka melakukan kriminal.

PN:

Mengapa masyarakat pribumi di Kuripan cenderung tidak banyak melakukan kriminal?

IF:

Karena kita banyak melakukan pendekatan kepada anak-anak muda, jangan melakukan tindakan kriminal, membangun kesadaran. Kalau ada pelaku kriminal, maka masyarakat (pamong) Kuripan yang menyerahkan kepada polisi.

PN:

Bagaimana jika terjadi perselisihan antara orang Lampung dengan Jawa?

IF:

Jika terjadi perselisihan orang Lampung dengan Jawa, maka yang Jawa diingatkan bahwa mereka ke Lampung tidak memiliki apa-apa, sedangkan bagi orang Lampung diingatkan agar tidak melakukan tindakan kesewang-wenangan.

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN KEPALA URUSAN (KAUR) PEMERINTAHAN
DI KANTOR KEPALA KAMPUNG KURIPAN:**

PN:

Sejak kapan Bapak tinggal di Kampung Kuripan?

IF:

Sejak tahun 1960.

PN:

Bapak tinggal di dusun mana?

IF:

Tinggal di dusun 3.

PN:

Apakah Bapak merasa nyaman tinggal di dusun 3?

IF:

Ya, Saya tinggal di sini merasa nyaman. Selama tinggal di sini tidak pernah mengalami pencurian, dibegal.

PN:

Apa yang menjadikan nyaman tinggal di Kampung Kuripan ini?

IF:

Karena kepala kampungnya benar-benar mengayomi. Bahkan sering keliling ke pos-pos ronda.

PN:

Pak Abu Bakar sudah menjabat 32 tahun?

IF:

Ya, jika tidak karena terbentur aturan kami sebagai warga masih menghendaki beliau menjadi kepala kampung, tetap selamanya.

PN:

Siapa yang berjasa membawa masyarakat Jawa di Kampung Kuripan ini?

IF:

Jasa orang tua (bapaknya) Pak Abu Bakar membawa masyarakat Jawa di kampung ini, diberi tanah, dilindungi, ini yang diingat masyarakat. Demikian pula Pak Abu Bakar sebagai anaknya, juga melakukan hal yang sama, bisa mengayomi, melindungi, mewujudkan rasa aman. Bahkan jika ada yang minta bantu, beliau pasti akan membantu.

PN:

Apakah pernah masyarakat Kampung Kuripan ini diresehin oleh masyarakat Kampung lain?

IF:

Masyarakat di kampung ini juga tidak pernah diresehin dari kampung lain. Karena kepala kampung melindungi warganya, baik suku Lampung, Jawa dan sebagainya dari gangguan, tindakan-tindakan kriminal dari pelaku-pelaku dari kampung lain. Bahkan ketika terjadi konflik di Tanjung Harapan, masyarakat suku Jawa dilindungi dan diamankan oleh kepala kampung. Istilahnya, satu batang singkong pun yang rubuh tidak ada, pengibaratan sangking dilindunginya warga di sini ketika terjadi konflik.

PN:

Apakah ada rombongan mobil dari kampung lain yang mau masuk ke kampung ini untuk menjarah?

IF:

Memang ada rombongan mobil dari kampung lain yang mau masuk ke kampung ini untuk menjarah, maka dengan sigap dan tegas kepala kampung melarang dan tidak mengizinkan masuk dan menjarah di kampung ini.

PN: Apakah masyarakat Kuripan ikut-ikutan ketika terjadi keributan di Tanjung Harapan?

IF:

Ketika terjadi keributan di tempat lain masyarakat di sini cenderung tidak ikut-ikutan.

PN:

Apakah masyarakat kampung Kuripan merasa aman dan nyaman?

IF:

Masyarakat di sini cenderung merasa aman dan nyaman, merasa terayomi. Bahkan di sini ada yang Hindu, walaupun sedikit tetapi dilindungi. Di sini masyarakat walaupun Jawa mayoritas, tetapi menghargai masyarakat Lampung.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN CARIK KURIPAN

PN :

Melihat tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, tindakan apa yang Bapak lakukan?

IF :

Tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, diingatkan sekali, dua kali. Jika tidak maka diproses secara hukum.

PN:

Bagaimana dengan latar belakang pendidikan masyarakat Kuripan?

IF :

Sebelum tahun 1990 masyarakat Kuripan banyak yang tidak tamat SLTA. Setelah ada SMA, banyak yang melanjutkan sekolah di SMA.

PN:

Bagaimana dengan keamanan di Kuripan?

IF:

Maju atau tidaknya suatu tempat tergantung pada keamanannya, maka keamanan di Kuripan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat pemerintah. Kuripan adalah kampung yang aman.

TRANSKRIP WAWANCARA

**DENGAN TOKOH AGAMA KURIPAN
DI KANTOR KEPALA KAMPUNG KURIPAN**

PN:

Menurut Bapak, apa sanksi bagi pelaku kejahatan?

IF:

Pelaku kejahatan, secara agama di akhirat pasti ada sanksinya, karena kita bukan negara hukum maka sanksi secara agama di adat tidak berlaku.

PN:

Agama, adat berlaku seiring. Apakah hukum adat bersumber dari agama?

IF:

Ya, hal-hal yang dilarang dalam agama, maka secara adat juga menjadi perbuatan yang terlarang, karena hukum adat bersumberkan dari hukum agama.

PN:

Apakah di Dusun I Kuripan ada Taman Pendidikan Al-Qur'an ataupun Madrasah?

IF:

Dusun 1 Kuripan tidak ada Taman Pendidikan Al-Qur'an, ngaji dengan guru ngaji. Tidak ada madrasah.

PN:

Bagaimana cara memenuhi kebutuhan pendidikan agama?

IF:

Kalau mau belajar agama, maka keluar kampung untuk belajar agama di pesantren atau madrasah.

PN:

Ada tidak pengajian-pengajian remaja dan sebagainya?

IF:

Kalau di Kuripan tidak ada.

PN:

Kalau pengajian anak-anak bagaimana?

IF:

Pengajian anak-anak(belajar ngaji) di masjid/mushala, atau di rumah.

PN:

Apakah ada bayaran untuk guru ngaji?

IF:

Bayaran guru ngaji sekarang sudah mulai ditetapkan, pendaftaran Rp 20.000, 00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan bulanan Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Kalau dulu tidak ada bayaran.

PN:

Siapa yang menjadi Imam Masjid?

IF:

Imam masjid digilir.

PN:

Apakah pernikahan orang Lampung dengan suku Jawa sudah banyak dilakukan di Kampung Kuripan ini?

IF:

Pernikahan orang Lampung dengan suku Jawa sudah banyak dilakukan. Harus dimasukkan dalam adat, dengan cara diangkat manjadi anak orang Lampung. Hal itu memerlukan biaya besar.

TENTANG PENULIS

Dr. SUHAIRI, MH lahir di Lampung Tengah, 1 Oktober 1972. Saat ini ia adalah dosen di IAIN Metro Lampung. Selain itu, Suhairi menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Ia menuntaskan studi S1 di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung pada 1998. Magister Hukum Bisnis ia selesaikan di Universitas Lampung pada 2007. Sedangkan Doktor Hukum Islam ia raih di UIN Walisongo Semarang pada 2015.

Sudah banyak buku yang Suhairi tulis, di antaranya *Buku Ajar Masail Al-Fiqhiyah* (2006), *Buku Ajar Fikih Mawaris* (2007), *Fikih Mawaris* ISBN 978-602-8686-11-2 (Yogyakarta: Idea Press, 2013), *Wakaf Produktif* ISBN 978-602-1508-66-4 (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), *Fikih Kontemporer* ISBN 978-602-0850-51-1 (Yogyakarta: Idea Press, 2015), dan *Hukum Waris Islam* ISBN 978-602-6910-44-8 (Metro, STAIN Press & CV. DVIKA, 2015).

Adapun publikasi Suhairi di antaranya adalah “Hukum Transeksual dan Kedudukan Pelakunya dalam Kewarisan Islam” (*Jurnal Nizam*, 2016), “Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum” (*Jurnal Tapis* Vol 1 No 1, 2017), “Mosque Management Response To Productive Waqf” (*Akademika* 24 (02), 2019, <https://doi.org/10.32332/akademika.v24i2.1818>), “Dialectics Islamic Inheritance Law and Law of Indigenous Heritage” (*Jurnal Opcion*, Vol 35 No 30), “The modus of Beggars in Lampung Urban Area : An Islamic Law

Perspective” (*Justicia Islamica*, Vol 17 No 1, 2020, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1872>), dan “PERAN UANG DALAM PRODUKSI (Telaah Economic Value of Time sebagai Penunjang Faktor Produksi)” (*Jurnal Adzkiya*, Vol 08 No 01, 2020, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v8i1.1871>).

Dalam bidang sosial, Suhairi aktif di beberapa kegiatan dan organisasi, misalnya, Ketua Bidang Sosial dan bantuan Pendidikan DPD Forum Dosen Indonesia Lampung (2020-2024) dan Ketua Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat IAIN Metro (2020-2024). Suhairi bisa dihubungi di suhairi@metrouniv.ac.id / suhairiyusuf@gmail.com dan HP/WA 081279208081.

Dr. MAHRUS AS'AD, M.Ag lahir di Kendal, 21 Desember 1961. Ia adalah dosen di IAIN Metro Lampung. Selain mengajar, ia menjabat Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro. Mahrus juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Moderasi Beragama IAIN Metro.

Mahrus menyelesaikan studi sarjana muda di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam prodi Tadris Bahasa Inggris pada 1984. Sarjana penuh ia raih di prodi dan kampus yang sama pada 1987. Jenjang S2 Mahrus selesaikan di kampus yang sama pada prodi Pengkajian Islam di tahun 1996. Di kampus yang sama pula, Mahrus menuntaskan S3 pada prodi Pengkajian Islam pada 2007.

Mahrus beberapa kali terlibat sebagai Chairman Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS) yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IAIN Metro setiap tahun. Ia juga narasumber di berbagai konferensi dan *reviewer* di berbagai jurnal akademik, seperti *Jurnal Tapis*, *Akademika*, dan *reviewer* penelitian Litapdimas Kemenag RI.

Beberapa publikasi Mahrus di antaranya adalah “Pembaruan Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama” (*Jurnal Nizham* 2 (2), 2017, “Islam dan Moral Bangsa” (*Jurnal Nizham* 2 (1), 2017, “Agama dan Keadaban Publik”, *Millah: Jurnal Studi Agama* 15 (2), 2017, “Pengaruh Neosufisme terhadap Perkembangan Tasawuf dan Tarekat Baru”, *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 36 (1), “Tajdīd al-Tarbīyah al-Islāmīyah ‘inda al-Shaykh al-Ḥājj Imam Zarkasyi”, *Studia Islamika* 22 (2), 2015. Mahrus bisa dihubungi mahrusasadsyarif@gmail.com.

Dr. H. KHOIRURRIJAL, MA lahir di Metro, 21 Maret 1973. Ia adalah dosen IAIN Metro Lampung yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Arab Program Pascasarjana IAIN Metro Lampung.

Khoirurrijal menuntaskan studi S1 di prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung (Lulus 1999). Ia kemudian melanjutkan di Prodi S-2 Psikologi Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (Lulus 2004). Khoirurrijal meraih S3 di bidang Adab Bahasa Arab, Konsentrasi Linguistik Terapan, Teknologi Informatika dan Komunikasi di Universitas Moulay Ismail Meknes, Maroko (Lulus 2013).

Beberapa publikasinya di antaranya adalah, “Empowering Learning Ethics Culture in Islamic Education” *Global Perspectives on Teaching and Learning Paths in Islamic Education*, 244-267 (2020), “Maharah al-Kalam al-‘Arabiy wa Mukawwanatuha wa Ahdafuha wa Taqwimuha”, *International Journal of Arabic Language Teaching* 1 (01), 30-41, 2019.

“Perception of Stake Holder About Graduates’ Profile and Its Implications for Curriculum Development” *Jurnal Al-*

Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 11 (1), 90-110, "Minat Lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab PTKI Lampung terhadap Lanjut Studi S2 PBA Pascasarjana, *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 3 (02), 69-83, 2018, "Islam Nusantara As A Counter-Hegemony Againsts The Radicalism Of Religion In Indonesia", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 3 (01),, 2018.

"Reconstruction of the Islamic Educational Development in Indonesia in Dealing with ASEAN Economic Community (AEC)" *Scientific Journal of PPI-UKM* 3 (3), 89-93 (2016). Ia juga menerbitkan buku *Interpretasi Makna (Prosedur Penerjemahan Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Idea Press, 2019). Ia dapat dihubungi di khoirurrijal@yahoo.com.

Dr. ABDUL MUJIB, M.Pd.I lahir di Metro, pada 5 Oktober 1982. Ia adalah dosen IAIN Metro Lampung. Ia menyelesaikan studi Prodi D2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di STAIN Jurai Siwo Metro (lulus 2003). Ia melanjutkan S1 Pendidikan Agama Islam di STIT Agus Salim (lulus 2008). Prodi S2 diselesaikan di Prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Jurai Siwo Metro (lulus 2012). Sedangkan S3 dituntaskan di Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung pada 2019.

Beberapa publikasi terakhir Abdul Mujib adalah "Re-Inventing The Role of Femaleulama in The Intellectual Tradition Of Islam Malay", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4 (02), 2019, "Hakekat Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam", *Ri'ayah* 4 (01), 2019, "Pendidikan Islam dan Politik", *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 3 (01), 2019, "Design of Library Application System, *International Journal of Engineering and Technology* 7 (7(27):199-204), 2018, "Pengaruh Metode Bercerita terhadap Akhlak Anak Usia Prasekolah", *Jurnal I'tibar* 1 (2), 113-133, 2017. Abdul Mujib dapat dihubungi di abdul.mujib1082@yahoo.com. []

